

**ANALISIS PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN
STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK XYZ**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi**

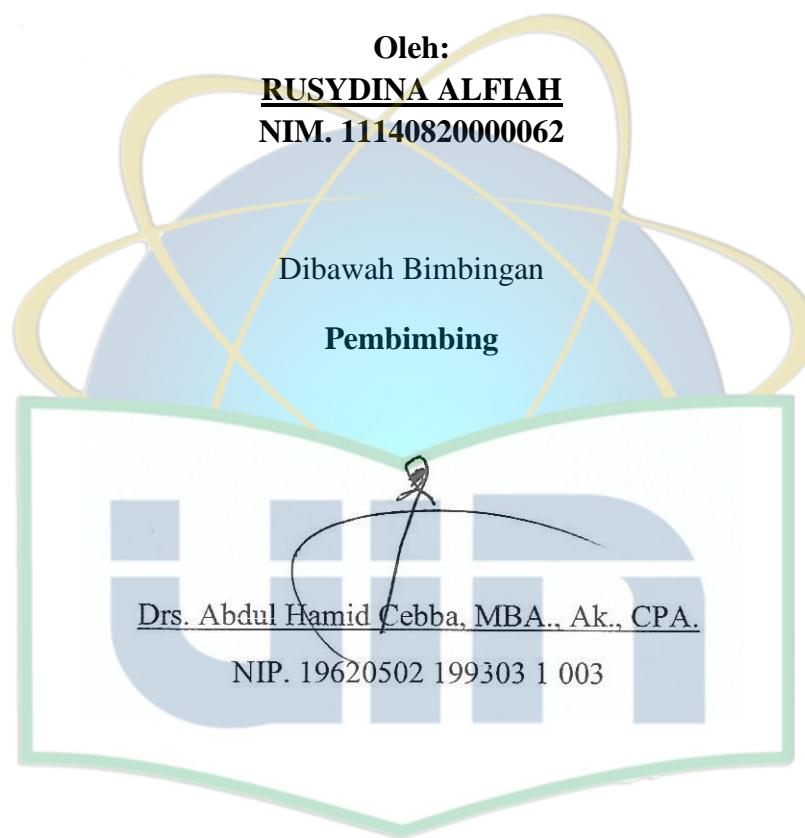


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M**

**ANALISIS PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN
STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK XYZ**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

Hari ini Kamis, 8 Maret 2018 telah dilakukan Ujian Komprehensif atas mahasiswa:

1. Nama : Rusydina Alfiah
2. NIM : 11140820000062
3. Jurusan : Akuntansi (Audit)
4. Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Studi pada Kantor Akuntan Publik XYZ

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan komprehensif ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 8 Maret 2018

1. Dr. Rini, Ak., C.A
NIP. 19760315 200501 2 002

(
Pengaji 1)

2. Reskino, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19740928 200801 2 004

(
Pengaji 2)

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Hari ini Senin, 21 Mei 2018 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:

1. Nama : Rusydina Alfiah
2. NIM : 11140820000062
3. Jurusan : Akuntansi
4. Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Studi pada Kantor Akuntan Publik XYZ

Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang bersangkutan selama proses ujian skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 21 Mei 2018

1. Yessi Fitri, S.E., M.Si. Ak.
NIP. 19760924 200604 2 002

(
Ketua)

2. Yusrro Rahmah, SE., M.Si.
NIP. 19800506 200801 2 016

(
Penguji Ahli)

3. Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., Ak., CPA.
NIP. 19620502 199303 1 003

(
Pembimbing)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusydina Alfiah
Nomor Induk Mahasiswa : 11140820000062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi/Audit

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan**
- 2. Tidak melakukan plagiat terhadap naskah orang lain**
- 3. Tidak menggunakan karya ilmiah orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa menyebut pemilik karya**
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini**

Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggungjawabkan, ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan di atas, maka saya siap untuk dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Mei 2018

Yang menyatakan,

(Rusydina Alfiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Rusydina Alfiah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Mei 1996
3. Alamat : Jl. Pondok Pinang III No. 60 RT/RW 003/02 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310.
4. No. Telp : 0821-1052-7943
5. Alamat e-mail : rusydinaalfiah.fifi@gamil.com

II. PENDIDIKAN

- Tahun 2002 – 2008 : SD Negeri 02 Petang Pondok Pinang
- Tahun 2008 – 2011 : SMP Negeri 87 Jakarta
- Tahun 2011 – 2014 : SMK Negeri 18 Jakarta
- Tahun 2014 – 2018 : S1 Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

III. PENGHARGAAN

1. Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)
2. Semifinalis ACTION Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (2016)
3. Top 35 National Accounting Olimpiad Universitas Gadjah Mada (2017)
4. Semifinalis ATV Universitas Indonesia (2017)
5. Penerima Beasiswa Karya Salemba Empat (2016-2018)

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota divisi Olahraga HMJ Akuntansi UIN Jakarta (2014 – 2015)
2. Anggota divisi Pendidikan Karang Taruna Unit RW 02 Pondok Pinang (2015 – 2017)
3. Anggota divisi Event Tax Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2016 – 2017)
4. Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017 – 2018)
5. Ketua divisi Event Tax Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017 – 2018)
6. Bendahara Paguyuban Karya Salemba Empat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2017 – 2018)

V. PENGALAMAN KERJA

1. PT Hyundai Mobil Indonesia sebagai staf Magang periode Januari – Maret 2013
2. PT Sumber Sarana Group sebagai staf Keuangan periode Juni – Agustus 2014
3. Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) sebagai staf Magang divisi Akuntansi periode Agustus 2016
4. KAP Suganda Akna Suhri sebagai Junior Auditor periode Januari – Februari 2017
5. Moore Stephens Indonesia sebagai Junior Auditor periode Januari – April 2018

VI. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Ayah : Zainuddin
2. Ibu : Juleha
3. Anak ke : 3 dari 3 bersaudara

ANALYSIS OF AUDIT PLANNING FINANCIAL REPORT STUDY IN XYZ PUBLIC ACCOUNTING FIRM

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the conformity of audit planning of financial statement audited by KAP XYZ with its execution and its accordance to Professional Standard of Public Accountant. The research uses descriptive method based on Professional Standard of Public Accountant issued by Indonesian Institute of Public Certified (IAP) established in 2013. This research used judgement sampling method in choosing sample by selecting a client which is PT ABC audited by KAP XYZ in 2017. This research analyzes the design of audit planning in according to SPAP that consist of the overall audit strategy, determining and utilizing materiality, audit team discussions, identifying congenital risks, assessing significant risks, understanding internal controls, evaluate internal controls, communicating the weaknesses of internal control, and complete the risk examination stage.

The result of this research show that the execution of audit planning PT ABC has conformity with the design of audit planning designed by KAP XYZ and its audit planning accordance to standard on auditing issued by Indonesian Institute of Public Certified (IAP) that is SPAP.

Keywords: *Public Accounting Firm, Audit Planning, Professional Standards of Certified Public Accountants*



ANALISIS PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN STUDI PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK XYZ

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ dengan pelaksanaannya dan juga kesesuaian dengan SPAP. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode *judgement sampling* dalam melakukan pemilihan sampel dengan memilih sampel satu klien yaitu PT ABC yang diaudit oleh KAP XYZ pada tahun 2017. Penelitian ini menganalisis aspek-aspek perencanaan audit sesuai dengan SPAP yaitu strategi audit menyeluruh, menentukan dan menggunakan materialitas, diskusi tim audit, mengidentifikasi risiko bawaan, menilai risiko signifikan, memahami pengendalian internal, mengevaluasi pengendalian internal, mengomunikasikan kelemahan pengendalian internal, dan menyelesaikan tahap penilaian risiko.

Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan audit laporan keuangan PT ABC telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP XYZ, dan desain perencanaan audit KAP XYZ telah sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yaitu SPAP.

Kata Kunci: Kantor Akuntan Publik, Perencanaan Audit, Standar Profesional Akuntan Publik.

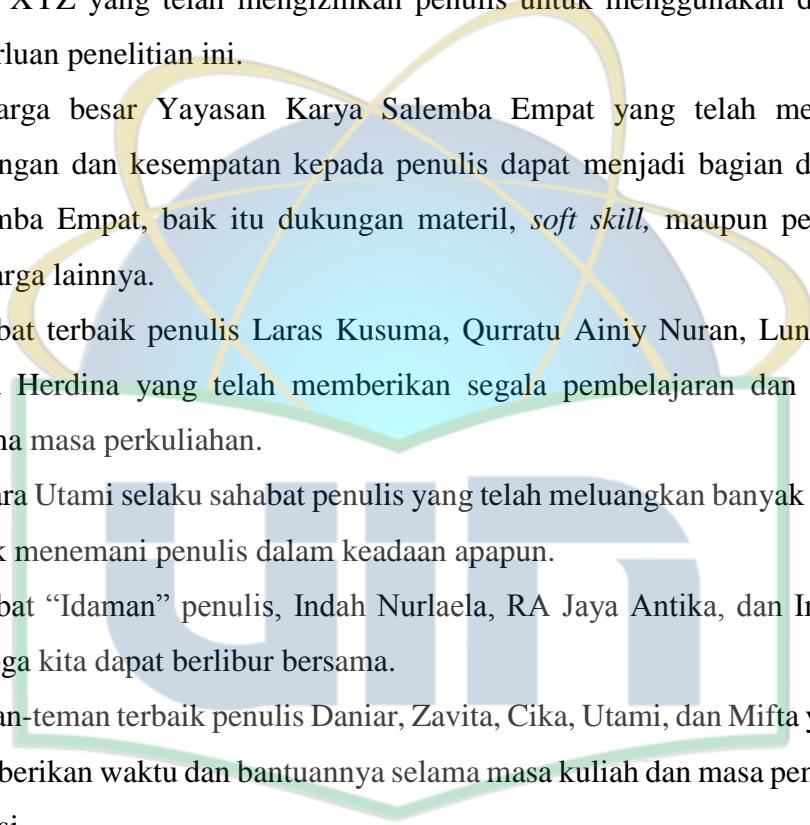
KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuhu.

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis, dan tak lupa pula, *shalawat* serta salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad *Sahallahu Allaihi Wassalam*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Studi pada Kantor Akuntan Publik XYZ**". Penulis sangat bersyukur atas selesaiannya penulisan dan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dukungan, semangat dan doa, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Zainuddin dan Mama Juleha, yang telah menjadi sumber kekuatan penulis dan selalu memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Seluruh keluarga yang telah menyemangati, memberikan banyak dukungan dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini, terkhusus untuk Abang-abangku tersayang, Ridlwan Afandi dan Rio Permadi, semoga adikmu ini dapat menjadi kebanggan bagi keluarga.
3. Bapak Dr. Arief Mufraini,Lc.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Ibu Yessi Fitri SE., M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Bapak Hepi Prayudiawan,SE.,MM.,CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- 
6. Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba MBA.,Ak.,CPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala bantuan, masukan, dukungan, perhatian, motivasi, dan nasihat kepada penulis yang telah diberikan selama ini.
 7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu, bantuan, dan pelayanan kepada penulis.
 8. KAP XYZ yang telah mengizinkan penulis untuk menggunakan data untuk keperluan penelitian ini.
 9. Keluarga besar Yayasan Karya Salemba Empat yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dapat menjadi bagian dari Karya Salemba Empat, baik itu dukungan materil, *soft skill*, maupun pengalaman berharga lainnya.
 10. Sahabat terbaik penulis Laras Kusuma, Qurratu Ainiy Nur'an, Luniar Aulia, Tiara Herdina yang telah memberikan segala pembelajaran dan kenangan selama masa perkuliahan.
 11. Andara Utami selaku sahabat penulis yang telah meluangkan banyak waktunya untuk menemani penulis dalam keadaan apapun.
 12. Sahabat "Idaman" penulis, Indah Nurlaela, RA Jaya Antika, dan Irwansyah, semoga kita dapat berlibur bersama.
 13. Teman-teman terbaik penulis Daniar, Zavita, Cika, Utami, dan Mifta yang telah memberikan waktu dan bantuannya selama masa kuliah dan masa penyelesaian skripsi.
 14. Muhammad Fakhri Anshori selaku senior penulis yang telah memberikan seluruh ilmu, bantuan, semangat, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 15. Seluruh akuntansi 2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kalian yang terbaik.

See you on top!

16. Keluarga Reboisasi Akuntansi, Ka Jehan, Ka Ajeng, Ka Nabil, Ka Cakra, Farda, Febi, Sofi, Mutiara, Rida, Ammar, Pascal, Ayu dan semua yang tidak bisa dituliskan satu per satu.
17. Keluarga Tax Center Ka Dila, Ka Hani, Ka Badrus, Mas Al, Ka Zaki, Siska, Fiqih, Wicak, Fatih, Bening, Bagas, Hardi, Shafira, dan semua yang tidak bisa dituliskan satu per satu.
18. Keluarga besar Paguyuban Karya Salemba Empat (KSE) UIN Jakarta Fizna, Maya, Ulya, Anjar, Karvin, atas segala pengertian dan dukungan dalam penyusunan skripsi. *Sharing, Networking, and Developing!*
19. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Jakarta, 21 Mei 2018

Rusydina Alfiah

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Literatur	10
1. Pengertian Audit.....	10
2. Jenis-jenis Audit.....	12
a. Berdasarkan Luas Pemeriksaan.....	12
b. Berdasarkan Jenis Pemeriksaan.....	13
3. Audit Laporan Keuangan	14
a. Tujuan Umum.....	15
b. Tujuan Khusus.....	16

4. Standar Profesional Akuntan Publik	18
a. Kode Etik Profesi Akuntan Publik	19
b. Kerangka untuk Perikatan Asurans	19
c. Standar Audit (SA)	20
d. Standar Pengendalian Mutu (SPM)	23
e. Standar Perikatan Reviu	25
5. Tahap-tahap Audit atas Laporan Keuangan	26
6. Perencanaan Audit Laporan Keuangan	32
7. Tahap-tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan	33
a. Menentukan Audit Menyeluruh	46
b. Menentukan dan Menggunakan Materialitas	48
c. Diskusi tim audit.....	52
d. Mengidentifikasi Risiko Bawaan	53
e. Menilai Risiko Bawaan	59
f. Risiko Signifikan	61
g. Memahami Pengendalian Internal	64
h. Mengevaluasi Pengendalian Internal.....	67
i. Mengomunikasikan Kelemahan Pengendalian Internal	68
j. Menyelesaikan Tahap Penilaian Risiko.....	69
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	70
C. Kerangka Pemikiran	73
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	74
A. Ruang Lingkup Penelitian	74
B. Metode Penentuan Sampel.....	75
C. Metode Pengumpulan Data.....	75
D. Metode Analisis Data.....	78
BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	80
1. Profil Singkat KAP XYZ	80
2. Struktur Organisasi KAP XYZ	80
B. Hasil Penelitian	82

1.	Desain Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan di KAP XYZ	82
a.	<i>E-1 Audit Strategy Memorandum</i>	83
b.	<i>E-2 Audit Planning Memorandum</i>	88
c.	<i>E-3 Assessment of Fraud Risk</i>	104
d.	<i>E-4 Audit Risk Assessment and Commentary</i>	110
e.	<i>E-5 Planning and Performance Materiality</i>	113
2.	Membandingkan Desain Perencanaan Audit dengan Operasional ..	115
a.	Karakteristik Perikatan	119
b.	Tujuan Pelaporan, Saat Pelaporan, dan Sifat Komunikasi	123
c.	Arahan Audit	125
d.	Penentuan Materialitas	128
e.	<i>Sampling</i>	131
f.	<i>Staffing</i>	132
g.	Asersi Manajemen	133
h.	Pendekatan Audit per Area.....	134
3.	Membandingkan Perencanaan Audit KAP XYZ dengan SPAP	136
a.	Analisis Strategi Audit Menyeluruh	139
b.	Analisis Menentukan dan Menggunakan Materialitas	140
c.	Analisis Diskusi Tim Audit	141
d.	Analisis Mengidentifikasi Risiko Bawaan	142
e.	Analisis Menilai Risiko Bawaan	144
f.	Analisis Risiko Signifikan	145
g.	Analisis Memahami Pengendalian Internal	147
h.	Analisis Mengevaluasi Pengendalian Internal.....	148
i.	Analisis Mengomunikasikan Kelemahan Pengendalian Internal	150
j.	Analisis Menyelesaikan Tahap Penilaian Risiko	151
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	154
A.	Kesimpulan	154
B.	Implikasi	154
C.	Keterbatasan Penelitian.....	154
D.	Saran	155

DAFTAR PUSTAKA	156
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	159



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tingkat Materialitas dan Penggunaannya	50
Tabel 2.2 Sumber-Sumber Risiko	55
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu	71
Tabel 4.1 Perbandingan Perencanaan Audit antara Operasional PT ABC dan KAP	117
Tabel 4.2 Perbandingan Perencanaan Audit antara KAP dan SPAP	137

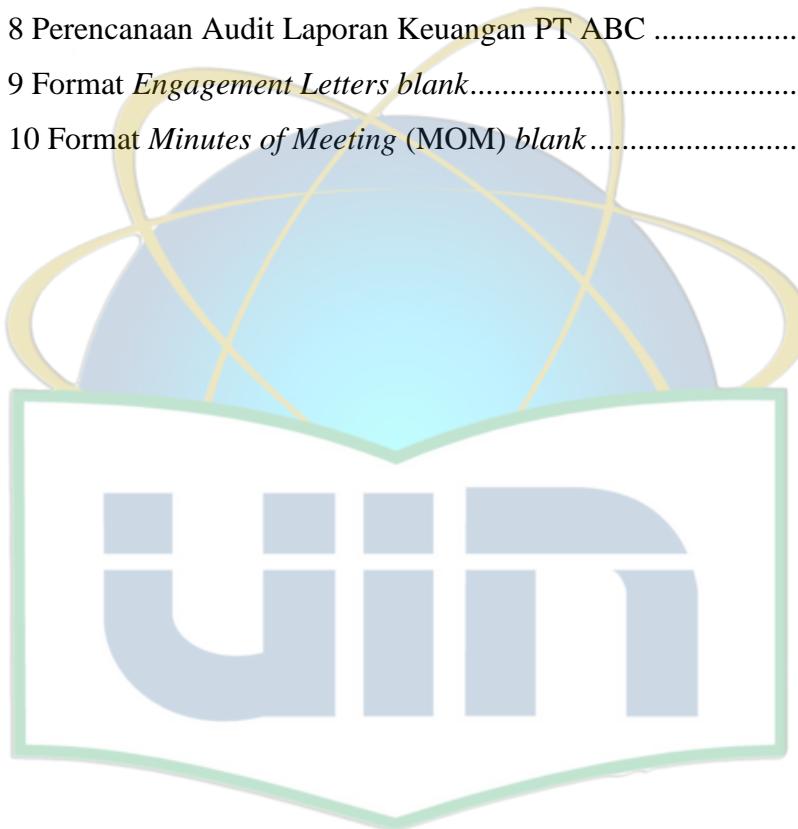


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	73
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KAP XYZ	81
Gambar 4. 2 Stuktur Organisasi	82
Gambar 4. 3 <i>Audit Scope</i>	88
Gambar 4. 4 <i>Commercial Environment</i>	91
Gambar 4. 5 <i>Financial Reporting Environment</i>	92
Gambar 4. 6 <i>Comercial Environment</i>	93
Gambar 4. 7 <i>Sampling and Selection Approaches</i>	95
Gambar 4. 8 <i>Staffing and Time Cost</i>	100
Gambar 4. 9 <i>Overall Audit Approach</i>	102
Gambar 4. 10 <i>Assignment Timetable and Responsibility</i>	103
Gambar 4. 11 <i>Preliminary Assessment of Fraud Risk</i>	104
Gambar 4. 12 <i>Assessment of Fraud Risk</i>	106
Gambar 4. 13 <i>Significant Risk</i>	110
Gambar 4. 14 <i>Detailed Significant Risk</i>	112
Gambar 4. 15 <i>Basis for Computation of Materiality</i>	113
Gambar 4. 16 <i>Summary of Materiality Factors Selected</i>	115
Gambar 4. 17 Ringkasan Pembahasan	136
Gambar 4. 18 Ringkasan Pembahasan	153

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Magang dari KAP XYZ.....	160
Lampiran 2 BAP Wawancara dan daftar pertanyaan Wawancara	161
Lampiran 3 Form E-1 <i>Audit Strategy Memorandum</i>	165
Lampiran 4 Form E-2 <i>Audit Planning Memorandum</i>	173
Lampiran 5 Form E-3 <i>Assessment of Fraud Risk</i>	187
Lampiran 6 Form E-4 <i>Audit Risk Assessment and Commentary</i>	196
Lampiran 7 Form E-5 <i>Planning and Performance Materiality</i>	199
Lampiran 8 Perencanaan Audit Laporan Keuangan PT ABC	202
Lampiran 9 Format <i>Engagement Letters blank</i>	227
Lampiran 10 Format <i>Minutes of Meeting (MOM) blank</i>	232



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha di Indonesia memberikan dampak bagi peningkatan kegiatan usaha perusahaan. Disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan perusahaan, perusahaan dituntut untuk mengembangkan kemampuan bersaingnya (Dewi dan Widasedana, 2015). Manajemen perusahaan harus memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material, maka perusahaan membutuhkan jasa akutan publik karena laporan keuangan yang teruji secara independen dapat menunjang pembuatan keputusan bisnis (Hidayat, 2011).

Laporan audit yang berisi opini dari akuntan publik diharapkan dapat memberikan kepercayaan hingga tingkat *reasonable assurance*. Opini tersebut diberikan atas hasil penilaian atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik terhadap suatu perusahaan. Namun, dewasa ini, banyak akuntan publik yang memberikan opini yang menyesatkan sehingga pelaksanaan audit dianggap gagal dan merugikan berbagai pihak.

Kegagalan pelaksanaan audit ini semakin terasa saat terjadinya kasus audit indosat pada tahun 2012 dimana laporan keuangan PT Indosat Tbk yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro, dan Surja yang merupakan afiliasi dari Ernest and Young Global menerbitkan laporan audit yang menyesatkan. Pada tahun 2017, *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) melalui situs resminya menyematkan label penyimpangan

pemeriksaan dan memberikan denda sebesar US \$ 1 Juta atau sekitar Rp 13 Milyar kepada KAP Purwantoro, Sungkoro, dan Surja yang merupakan afiliasi dari Ernest and Young Global. Sanksi ini diberikan karena KAP Purwantoro, Sungkoro, dan Surja gagal dalam melaksanakan audit dengan memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan PT. Indosat Tbk untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2011. Opini tersebut diberikan oleh KAP kepada PT Indosat Tbk. berdasarkan bukti audit yang tidak memadai. Alasan lain yang muncul yaitu karena audit tergesa-gesa dalam menerbitkan laporan keuangan audit kepada PT. Indosat Tbk, sehingga firma dan mitra yang bertugas yaitu Roy Iman Wirahardja dan James Randall Leali lalai dalam tugas dasarnya untuk menyajikan bukti audit yang memadai. Setelah kasus ini terungkap, Ernest and Young (EY) mengakui kesalahan perilaku mitra yang melanggar kode etik global dan menyatakan akan memperketat proses audit dan kebijakan audit KAP (Majalah ICT, 2017).

Selain kasus EY sebagai KAP *Big Four* di Indonesia, kasus kegagalan audit datang dari KAP *Big Ten* yaitu Grant Thornton. Tahun 2017, *Financial Reporting Council* (FRC) memberikan denda sebesar £2,3 Juta atau sekitar Rp 36 Milyar kepada KAP Grant Thornton (GT). Denda ini diberikan kepada GT karena KAP GT dan mitra bisnisnya Robert Napper gagal dalam melakukan audit perusahaan produsen mesin pemadam kebakaran, AssetCo. Secara resmi GT dan mitra bisnisnya mengakui kesalahannya karena GT kekurangan tenaga profesional dan tingkat kehati-hatian, sehingga audit Laporan Keuangan AssetCo dilakukan secara tidak benar. Karena kasus tersebut, Robert Napper

didenda senilai £130,000 atau sekitar Rp 2 Miliar dan dilarang melakukan proses audit selama tiga tahun. Sementara GT harus membayar £200,000 atau sekitar Rp 3 Miliar dengan biaya tambahan (Warta Ekonomi, 2017).

Kedua kasus di atas terletak pada ketidakmampuan auditor dalam melaksanakan audit secara tepat, sehingga laporan audit yang disajikan tidak terbebas dari salah saji material dan memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan (Knechel, 2013). Terdapat banyak variabel dalam mengukur kualitas audit, namun tidak ada definisi atau ukuran audit yang diterima secara umum. Para peneliti telah mengadopsi dua pendekatan untuk mengukur kualitas audit yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung (Kilgore *et al.*, 2014)

Pendekatan langsung didasarkan pada asumsi bahwa kemungkinan penemuan dan pelaporan pelanggaran akan tercermin dalam hasil audit. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan yang signifikan karena sangat sederhana dan memiliki generalisabilitas terbatas, atau karena kegagalan audit rendah (Francis, 2011). Pendekatan langsung mengukur kualitas audit dengan menggunakan pengganti dari, atau proxy untuk kualitas, seperti meningkatkan pendidikan profesional auditor (Handayani, 2009; Bajuri, 2011; Uswatun, 2013), independensi auditor (Handayani, 2009), *due professional care* (Bajuri, 2011), pengalaman bekerja (Bajuri, 2011).

Sedangkan pendekatan tidak langsung didasarkan pada pertimbangan dalam menilai kualitas audit dari perspektif perilaku dan menilai kualitas audit dengan memeriksa atribut yang dianggap terkait dengan kualitas audit oleh

pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses audit dan terpengaruh langsung oleh hasil audit. Studi perilaku ini meliputi perencanaan audit (Handayani, 2009; Uswatun, 2013), dan pengumpulan bukti audit yang cukup (Handayani, 2009).

Menurut Handayani (2009) bahwa cara meningkatkan kualitas audit yaitu dengan meningkatkan pendidikan profesional auditor, mempertahankan independensi dalam sikap mental, kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, perencanaan pekerjaan audit, bukti audit yang cukup dan kompeten serta melakukan audit kinerja meliputi ekonomi efisiensi perusahaan.

Perencanaan audit merupakan tahap penting bagi auditor dalam setiap hendak melakukan audit baik dalam audit keuangan, audit kinerja maupun audit investigatif. Setiap penugasan audit kinerja, auditor harus menyusun rencana audit. Rencana audit dimaksudkan untuk menjamin bahwa tujuan audit tercapai secara berkualitas, ekonomi, efisien, dan efektif (Hasanah, 2013). Menciptakan audit yang efisien dan efektif diperlukan perencanaan audit yang baik sebelum melaksanakan audit. Kegagalan untuk merencanakan penugasan audit secara tepat dapat menyebabkan penerbitan laporan keuangan yang keliru atau audit menjadi tidak efisien dan tidak efektif (Utami, 2013). Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan audit merupakan tahapan yang harus menjadi salah satu perhatian yang serius dari auditor.

Kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh EY terhadap PT Indosat Tbk. yang telah disebutkan di atas terjadi akibat kurangnya pengungkapan bukti

audit yang cukup sehingga memengaruhi opini yang diberikan. Selain bukti audit yang tidak tepat dan cukup, alasan lain yaitu ketidakcermatan dalam penerbitan laporan keuangan auditan perusahaan. Sedangkan kasus kegagalan audit yang dilakukan oleh GT terhadap kliennya AssetCo. yang telah disebutkan di atas terjadi akibat kurangnya tenaga professional.

Berdasarkan alasan terjadinya kedua kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kegagalan audit terjadi akibat bukti yang tidak cukup dan tepat, kesalahan *timing*, dan kesalahan *staffing*. Ketiga alasan tersebut merupakan bagian dari tahapan perencanaan audit yang harus dibuat dan didokumentasikan secara tepat.

Analisis di atas didukung dengan pendapat Arens (2010) bahwa perencanaan audit harus dilakukan sebaik-baiknya agar auditor memperoleh bukti kompeten yang cukup, mengefisiensikan dan menekan biaya audit, dan menghindari kesalahpahaman dengan klien. Perencanaan bukan merupakan suatu fase audit yang terpisah dari fase audit lainnya, tetapi lebih merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan berulang yang sering dimulai seketika setelah (atau dalam hubungannya dengan) penyelesaian audit periode sebelumnya dan berlanjut hingga penyelesaian perikatan audit periode kini.

Dalam Standar Audit (SA) 300 menyatakan bahwa prosedur audit lainnya yang direncanakan harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Standar Audit (SA) (Rachmawati *et al.*, 2016). SPAP SA 300 (2013:2) menyebutkan bahwa perencanaan audit melibatkan penetapan

strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, perencanaan audit merupakan suatu proses yang sangat penting dalam menentukan proses audit lanjutan hingga proses pelaporan. Kesalahan dalam tahap perencanaan audit akan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan audit. Oleh karena itu, perencanaan audit merupakan proses yang harus mendapat perhatian serius bagi auditor.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013) dan Pranestya (2013). Pengembangan penelitian terletak pada objek penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Seperti yang dilakukan oleh Danti Putri Utami (2013) melakukan penelitian mengenai Analisis Perencanaan audit pada KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (KAP ARHJ). Hasil penelitian ini perencanaan audit laporan keuangan pada KAP ARHJ telah memadai dan secara tertulis sudah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP (Utami, 2014). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu pada KAP XYZ.

Studi lainnya yang dilakukan oleh Fika Arizta Pranesya (2013) melakukan penelitian mengenai Perencanaan Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo dan Rekan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu pada KAP XYZ.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengamatan guna mencari tahu fenomena proses perencanaan audit yang berada di lapangan. Selain itu, pentingnya proses perencanaan audit menjadikan alasan bahwa perencanaan audit yang cermat sangat memengaruhi pengambilan keputusan prosedur audit yang akan digunakan pada tahap pelaksanaan audit. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul “Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Studi pada KAP XYZ”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka identifikasi masalah yang diteliti ini adalah permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Akuntan Publik, misalnya:

1. Kurangnya pengumpulan bukti audit yang cukup dan tepat sehingga berdampak pada perumusan opini yang tidak sesuai.
2. Kurangnya penjadwalan tim audit sehingga berdampak pada waktu pelaporan yang tidak sesuai dengan jadwal.
3. Kurangnya perencanaan audit yang matang sehingga berdampak pada *staffing* tidak memadai.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka pembatasan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ terhadap SPAP.

2. Data perencanaan audit yang diteliti merupakan PT ABC sebagai salah satu klien KAP XYZ.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah operasional perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan di KAP XYZ sesuai dengan desain perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ?
2. Apakah perencanaan audit laporan keuangan pada KAP XYZ sesuai dengan perencanaan audit berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)?

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan di KAP XYZ dengan desain perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ.
2. Menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memberikan informasi mengenai perencanaan audit laporan keuangan yang sesuai dengan SPAP.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana perencanaan audit laporan keuangan pada KAP XYZ. Selain, itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi KAP XYZ

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi bagi KAP XYZ mengenai kesesuaian desain dan pendokumentasian perencanaan audit laporan keuangan yang telah disusunnya dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Literatur

1. Pengertian Audit

Audit adalah suatu proses mengumpulan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen (Alvin *et al.*, 2015:2).

Menurut Boynton dan Johnson (2006:6) menyebutkan bahwa:

“A systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the result to interested users”

Dari kalimat di atas dapat didefinisikan bahwa:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Boynton (2006:6) terdapat beberapa ciri penting yang terdapat dalam definisi tersebut dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Suatu proses yang sistematis, logis, terstruktur, dan terorganisir dalam rangkaian langkah atau menjalani suatu prosedur. Pedoman profesional yang digunakan dalam proses audit berupa Standar

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

- b. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, berarti memeriksa dasar asersi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut secara objektif dan tidak berprasangka kepada atau terhadap perorangan atau entitas yang membuat asersi tersebut.
- c. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi merupakan representasi yang dibuat oleh peorangan atau entitas. Asersi merupakan subjek pokok auditing dan meliputi informasi yang dimuat dalam laporan keuangan, laporan operasi intern, dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT).
- d. Derajat kesesuaian menunjuk pada kedekatan di mana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ekspresi kesesuaian ini dapat berbentuk kuantitatif, seperti jumlah kekurangan dana kas kecil, atau dapat juga berbentuk kualitatif, seperti kewajaran atau keabsahan laporan keuangan.
- e. Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Kriteria dapat berupa peraturan-peraturan spesifik yang dibuat oleh badan legislatif, anggaran atau ukuran kinerja lainnya yang ditetapkan oleh manajemen.
- f. Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah

ditetapkan. Penyampaian hasil ini dapat meningkatkan atau menurunkan derajat kepercayaan pemakai informasi atas asersi yang dibuat oleh pihak yang diaudit.

- g. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan atau mengandalkan temuan-temuan auditor. Pada lingkungan bisnis, mereka adalah pemegang saham, manajemen, kreditor, kantor pemerintah, dan masyarakat luas.

Menurut Agoes (2012:4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis yang dilakukan oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan, catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung yang telah disusun oleh manajemen, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa auditing merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pihak kompeten dan independen, untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif dan menentukan serta melapor derajat kesesuaian antara asersi manajemen dengan kriteria yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2. Jenis-jenis Audit

a. Berdasarkan Luas Pemeriksaan

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas (Agoes, 2012:10):

1) Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen dengan tujuan agar dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atau Standar Audit (SA) atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memerhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik serta Standar Pengendalian Mutu.

2) Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas atau sesuai permintaan *auditee* yang dilakukan oleh auditor independen, namun pada akhir pemeriksannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan oleh auditor independen terbatas pada masalah tertentu yang diperiksa, oleh karena itu prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

b. Berdasarkan Jenis Pemeriksaan

Sedangkan apabila ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas (Agoes, 2012:11):

1) Manajemen Audit

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan

operasi tersebut sudah ditentukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2) Pemeriksaan Ketaatan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peaturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan seperti manajemen dan dewan komisaris, maupun pihak eksternal seperti Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak (DJP), dan lain-lain. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh auditor independen maupun bagian auditor internal perusahaan.

3) Pemeriksaan Intern (*internal audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

4) *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh auditor independen terhadap perusahaan yang menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System* dalam proses data akuntansinya.

3. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap posisi

keuangan, hasil operasi, dan arus kas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Boynton dan Johnson, 2006:8). Sedangkan audit laporan keuangan menurut Arens (2015:8) adalah suatu bentuk pemberian jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit ini merupakan jasa *assurance* yang paling umum dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Berdasarkan pengertian Boynton (2006) dan Arens (2015) dapat disimpulkan bahwa audit laporan keuangan merupakan jasa *assurance* yang paling umum dilakukan oleh suatu KAP, dimana pada jasa ini auditor melakukan evaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap laporan keuangan dan menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

a. Tujuan Umum

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 200 (2013:1) menyebutkan tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan keyakinan atas keandalan laporan keuangan kepada pihak pengguna laporan keuangan yang dituju. Tujuan audit umum ini dicapai melalui

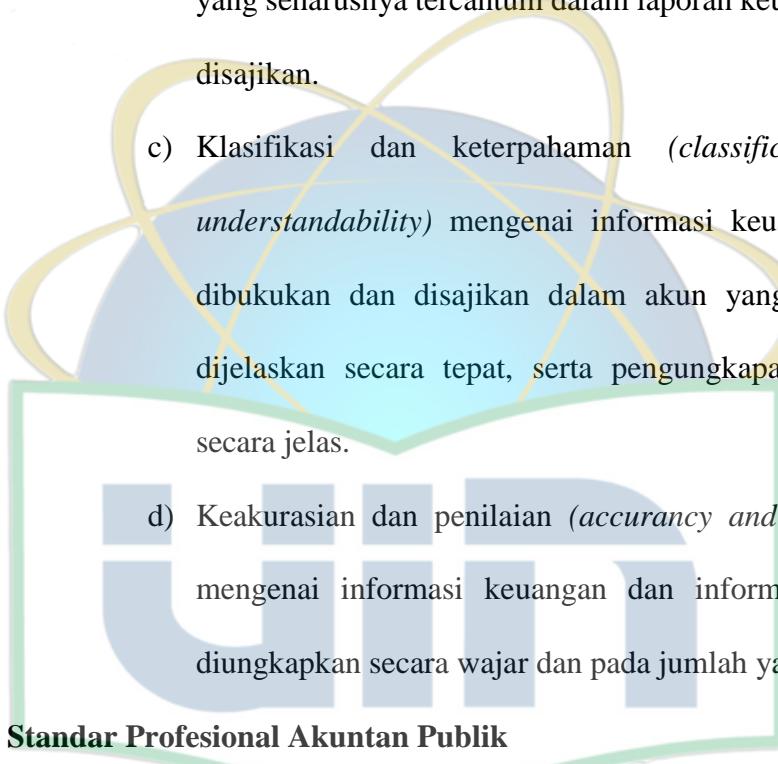
pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kebanyakan kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka.

b. Tujuan Khusus

Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi adalah representasi oleh manajemen, secara eksplisit (dalam bentuk pernyataan) maupun implisit (tersirat), yang terkandung dalam laporan keuangan. SA 315 menyebutkan bahwa representasi ini digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kesalahan penyajian potensial yang mungkin terjadi (SPAP SA 315, 2013:1). Asersi yang digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan jenis-jenis kesalahan potensial yang berbeda yang dapat terjadi digolongkan ke dalam tiga kategori dan dapat berbentuk sebagai berikut (SPAP SA 315, 2013:49):

- 1) Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit:
 - a) Keterjadian (*occurrence*), yaitu transaksi dan peristiwa yang telah dicatat benar telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.

- b) Kelengkapan (*completeness*) yaitu seluruh transaksi dan peristiwa yang seharusnya terbukukan telah dicatat.
 - c) Keakurasian (*accuracy*) yaitu jumlah-jumlah dan data lainnya yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa telah dibukukan dan dicatat dengan tepat.
 - d) Pisah batas (*cut-off*) yaitu transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam periode akuntansi yang tepat.
 - e) Klasifikasi (*classification*), yaitu transaksi dan peristiwa telah dibukukan dalam akun yang tepat.
- 2) Asersi tentang saldo akun pada akhir periode:
- a) Eksistensi (*existence*), merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas ada pada akhir periode.
 - b) Hak dan kewajiban (*right and obligation*) mengenai apakah entitas memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas.
 - c) Kelengkapan (*completeness*) yaitu seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas yang seharusnya terbukukan telah dicatat.
 - d) Penilaian dan pengalokasian (*valuation and allocation*) tentang aset, liabilitas, dan ekuitas tercantum dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat dan penyesuaian penilaian atau pengalokasian yang terjadi dibukukan dengan tepat.

- 
- 3) Asersi tentang penyajian dan pengungkapan:
 - a) Keterjadian serta hak dan kewajiban (*occurrence and right and obligations*), tentang peristiwa, transaksi, dan hal-hal lainnya yang diungkapkan, telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.
 - b) Kelengkapan (*completeness*) yaitu seluruh pengungkapan yang seharusnya tercantum dalam laporan keuangan telah disajikan.
 - c) Klasifikasi dan keterpahaman (*classification and understandability*) mengenai informasi keuangan telah dibukukan dan disajikan dalam akun yang tepat dan dijelaskan secara tepat, serta pengungkapan disajikan secara jelas.
 - d) Keakurasi dan penilaian (*accuracy and valuation*), mengenai informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat.

4. Standar Profesional Akuntan Publik

Sampai saat ini IAPI telah menerbitkan standar-standar yang digunakan sebagai acuan KAP dalam melaksanakan kegiatannya. Standar ini disebut dengan nama Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Saat ini, SPAP yang digunakan di Indonesia telah mengadopsi *International Standards on Auditing* (ISA). Berikut ini standar-standar yang terdapat di dalam SPAP (IAPI, 2016):

Terdapat lima tipe Standar Profesional yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Auditing (SA), Standar Pengendalian Mutu (SPM), dan Standar Perikatan Reviu (SPR).

a. Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode Etik Akuntan Publik terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian A dan Bagian B. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2013:2).

Kode Etik Profesi Akuntan Publik menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik (KAP) atau jaringan KAP, baik yang merupakan anggota IAPI maupun yang bukan, yang memberikan jasa profesional yang meliputi jasa asurans dan jasa selain asurans. Anggota IAPI yang tidak berada dalam KAP atau jaringan KAP dan tidak memberikan jasa profesional tetap harus mematuhi dan menerapkan Bagian A dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2013:2).

b. Kerangka untuk Perikatan Asurans

Kerangka ini menjelaskan unsur-unsur dan tujuan perikatan asurans dan mengidentifikasi perikatan-perikatan yang diterapkan

oleh Standar Audit (SA), Standar Perikatan Reviu (SPR), dan Standar Perikatan Asurans (SPA). Kerangka ini menyediakan kerangka acuan untuk (2013:1):

- 1) Akuntan profesional dalam praktik publik (praktisi) pada waktu melaksanakan perikatan asurans. akuntan profesional yang tidak dalam praktik publik atau tidak berpraktik dalam sektor publik didorong untuk mempertimbangkan kerangka ini bila melaksanakan perikatan asurans.
- 2) Pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans, termasuk pengguna laporan asurans yang dituju dan pihak yang bertanggung jawab terhadap hal pokok.
- 3) Dewan Standar Profesi (DSP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada waktu mengembangkan SA, SPR, dan SPA selain audit dan reviu.

c. Standar Audit (SA)

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas kode etik profesi akuntan publik, SA 200, 300, 400, 500, 600, 700, dan 800. Delapan bagian SA ini dirinci ke masing-masing bagian SA. Pada tahun 2013 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadopsi *International Standard Auditing (ISA)* yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountant (IFAC)* sebagai acuan melakukan kegiatan auditing.

Adapun rincian SA sebagai berikut (SPAP, 2013):

- 1) SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berbasis Standar Audit.
 - a) SA 210: Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit
 - b) SA 220: Pengendalian Mutu untuk Auditor atas Laporan Keuangan
 - c) SA 230: Dokumentasi Audit
 - d) SA 240: Tanggung Jawab Auditor terkait dengan Kecurangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
 - e) SA 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
 - f) SA 260: Komunikasi dengan Pihak yang Pertanggung Jawab atas Tata Kelola
 - g) SA 265: Pengomunikasikan Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
- 2) SA 300: Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
 - a) SA 315: Pengidentifikasi dalam Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya.
 - b) SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
 - c) SA 330: Respon Auditor terhadap Risiko yang telah dinilai

- 3) SA 402: Pertimbangan Auditor Terkait dengan Entitas yang menggunakan Suatu Organisasi Jasa
- a) SA 450: Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit.
- 4) SA 500: Bukti Audit
- a) SA 501: Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
- b) SA 505: Konfirmasi Eksternal
- c) SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal
- d) SA 520: Prosedur Analitis
- e) SA 530: Sampling Audit
- f) SA 540: Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar dan Pengungkapan yang Bersangkutan
- g) SA 550: Pihak Berelasi
- h) SA 560: Peristiwa Kemudian
- i) SA 570: Kelangsungan Usaha
- j) SA 580: Representasi Tertulis
- 5) SA 600: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
- a) SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
- b) SA 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
- 6) SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan

- a) SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Keuangan Auditor Independen
 - b) SA 706: Alinea Penekanan Suatu Hal dan Alinea Hal Lain dalam Laporan Keuangan Auditor Independen
 - c) SA 710: Informasi Komparatif – Angka Koresponding dan Laporan keuangan Komparatif
 - d) SA 720: Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditor
- 7) SA 800: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus
- a) SA 805: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan.
 - b) Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan

d. Standar Pengendalian Mutu (SPM)

SPM 1 (2013:1) menyebutkan bahwa Standar Pengendalian Mutu (SPM) mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asuransi. Tujuan SPM yaitu memberikan konteks ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk membantu KAP dalam memahami hal-hal yang perlu dicapai dan memutuskan ada tidaknya hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

SPM 1 (2013:3) menyebutkan tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus ditetapkan dan dipelihara oleh setiap KAP dalam suatu sistem, harus mencakup sebagai berikut (SPAP SPM 1, 2013:6):

- 1) Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
- 2) Ketentuan etika profesi yang berlaku
- 3) Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu
- 4) Sumber daya manusia
- 5) Perlaksanaan perikatan
- 6) Pemantauan

Kerangka ini tidak menetapkan standar atau menyediakan prosedur untuk melaksanakan perikatan asurans. prinsip dasar dan panduan terkait untuk melaksanakan perikatan asurans yang konsisten dengan kerangka ini dituangkan dalam SA, SPR, dan SPA.

Hubungan antara kerangka dengan SA, SPR, dan SPA ini digambarkan dalam Struktur Standar Profesional Akuntan Publik

yang diterapkan oleh DSPAP. (Kerangka Untuk Perikatan Asuransi, 2013:1).

e. Standar Perikatan Reviu

Tujuan Standar Perikatan Reviu (SPR) adalah untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika seorang praktisi, yang bukan merupakan auditor suatu entitas, melaksanakan suatu perikatan untuk mereviu laporan keuangan dan tentang bentuk dan isi laporan yang diterbitikan oleh praktisi tersebut dalam kaitan dengan reviu tersebut. Seorang praktisi yang merupakan auditor entitas tertentu, membuat perikatan untuk mereviu informasi keuangan interim berdasarkan SPR 2410 tentang “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (SPAP SPR 2400, 2013:1).

Menurut SPR 2400 tujuan perikatan reviu atas laporan keuangan adalah untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah, atas prosedur yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SPAP SPR 2400, 2013:1).

5. Tahap-tahap Audit atas Laporan Keuangan

Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan berbasis risiko menurut Tuanakotta (2013:96), dibagi menjadi tiga tahap yaitu penilaian risiko (*risk assessment*), menanggapi risiko (*risk response*), dan pelaporan (*reporting*). Tahapan-tahapan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Kutipan SPAP SA 315 alinea 3 mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap satu (2013:1):

“Tujuan auditor adalah mengidentifikasi dan menilai salah saji material, karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi, melalui pemahaman terhadap entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas, yang memberikan dasar untuk merancang dan mengimplementasi tanggapan terhadap risiko salah saji material yang dinilai”.

Dalam *risk assessment*, hal-hal yang perlu dilakukan antara lain (Tuanakotta, 2013:96):

- 1) Melibatkan senior auditor dalam melakukan perencanaan audit, serta ikut berpartisipasi dalam diskusi di antara anggota tim audit.
- 2) Menekankan skeptisme (kewaspadaan) profesional seorang auditor. Auditor diharapkan dapat menggunakan pengalaman bekerjanya untuk menilai kejujuran integritas manajemen klien. Apabila auditor sudah pernah mengaudit pada entitas tersebut dan mengetahui integritas pihak manajemen klien, bukan berarti auditor terbebas dari keharusan

mempertahankan skeptisme profesionalnya, atau merasa cukup dengan bukti audit yang kurang persuasif dalam upaya mencari asuransi yang layak.

- 3) Melakukan perencanaan audit, yaitu menentukan waktu yang digunakan untuk mengembangkan strategi audit menyeluruh dan rencana audit, memastikan tujuan audit dipenuhi dengan benar, dan pekerjaan staf auditor terfokus pada pengumpulan bukti pada hal-hal paling kritis untuk terjadinya salah saji.
- 4) Melaksanakan diskusi tim audit dan komunikasi berkelanjutan.

Hal ini perlu dilakukan guna mendapat manfaat sebagai berikut (Tuanakotta, 2013:97):

- a) Menginformasikan kepada staf tentang klien secara umum dan membahas area yang berpotensi mengandung risiko;
- b) Membahas efektifnya strategi audit menyeluruh dan rencana audit, dan jika perlu, membuat perubahan;
- c) Bertukar pikiran mengenai bagaimana kecurangan mungkin terjadi dan kemudian merancang tanggapan yang tepat;
- d) Menetapkan tanggung jawab audit kepada staf dan menetapkan waktu penyelesaian tugas mereka.

Komunikasi berkelanjutan yang terus berjalan dalam tim audit selama penugasan itu penting, misalnya untuk

membahas permasalahan audit atau kemungkinan adanya indikasi kecurangan. Hal ini memungkinkan komunikasi tepat waktu dengan manajemen, dan jika perlu, mengubah strategi dan prosedur audit.

- 5) Fokus pada identifikasi risiko, hal ini penting untuk mengidentifikasi semua risiko yang relevan. Jika faktor risiko bisnis dan kecurangan tidak teridentifikasi oleh auditor, risiko tidak akan dinilai atau didokumentasikan, dan tanggapan audit tidak akan dirancang. Oleh karena itu, prosedur penilaian risiko yang dirancang dengan baik sangat penting untuk suksesnya audit. Prosedur penilaian risiko juga harus dilaksanakan oleh staf yang tepat.
- 6) Menanggapi respon manajemen mengenai risiko. Bagaimana manajemen merancang atau melaksanakan pengendalian untuk memitigasi risiko (salah saji material dalam laporan keuangan) yang sudah diidentifikasi oleh manajemen (sendiri) dan/atau auditor. Dalam entitas yang lebih kecil tekanan akan diberikan kepada lingkungan pengendalian yang lebih tradisional (seperti pemisahan tugas).
- 7) Menggunakan kearifan profesional (*auditor judgement*)
SA mengharuskan penggunaan dan kemudian pendokumentasian kearifan profesional yang penting oleh auditor selama audit. Beberapa contoh penggunaan kearifan

profesional dalam proses penilaian risiko antara lain (Tuanakotta, 2013:97):

- a) Penentuan untuk menerima/melanjutkan hubungan dengan klien;
- b) Mengembangkan strategi audit menyeluruh;
- c) Menetapkan materialitas;
- d) Menilai risiko salah saji material, termasuk mengidentifikasi risiko signifikan dan area lain di mana pertimbangan audit khusus mungkin diperlukan; dan
- e) Mengembangkan ekspektasi untuk melaksanakan prosedur analitis.

b. Menanggapi Risiko (*Risk Response*)

Kutipan dari SA 330 alinea tiga mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap dua yaitu (2013:1):

“Tujuan auditor adalah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang risiko salah saji material yang dinilai, dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat terhadap risiko tersebut”.

Dalam tahap ini, auditor (Tuanakotta, 2013:98):

- 1) Menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi (untuk setiap jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan);
- 2) Mengembangkan prosedur audit responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi risiko yang dinilai.

Tanggapan auditor terhadap risiko yang dinilai untuk risiko salah saji material, didokumentasikan dalam suatu rencana audit yang (Tuanakotta, 2013:98):

- 1) Berisi tanggapan menyeluruh atas risiko yang diidentifikasi pada tingkat laporan keuangan;
- 2) Menangani area laporan keuangan yang material; dan
- 3) Berisi sifat, luas, dan penjadwalan prosedur audit spesifik untuk menanggapi risiko salah saji material, pada tingkat asersi.

Tanggapan menyeluruh atas risiko yang dinilai untuk risiko salah saji material, pada tingkat laporan keuangan. Tanggapan itu juga akan meliputi penugasan dan supervisi staf yang tepat, perlunya skeptisme profesional, luasnya bukti tambahan untuk menguatkan penjelasan dan representasi manajemen, pertimbangan menganai jenis prosedur audit yang dipilih, dan dokumentasi apa yang akan diperiksa (Tuanakotta, 2013:98).

Prosedur audit selanjutnya umumnya terdiri atas prosedur audit substantif seperti uji rincian, prosedur analitis, dan uji pengendalian. Uji pengendalian lazimnya digunakan jika ada ekspektasi bahwa pengendalian tersebut berfungsi dengan efektif dalam periode berjalan (Tuanakotta, 2013:99).

c. Pelaporan (*Reporting*)

Kutipan SA 700 alinea enam mengenai tujuan auditor dalam proses audit tahap tiga yaitu (2013:2):

“Tujuan auditor adalah merumuskan opini mengenai laporan keuangan berdasarkan evaluasi atas kesimpulan yang ditarik atas bukti audit yang diperoleh dan memberikan opini dengan jelas, melalui laporan tertulis yang juga menjelaskan dasar dalam memberikan opini tersebut”.

Tahap terakhir dalam audit adalah menilai bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit itu cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima (Tuanakotta, 2013:100).

Dalam tahap ini sangatlah penting untuk menentukan (Tuanakotta, 2013:100):

- 1) Setiap perubahan dalam tingkat risiko yang dinilai;
- 2) Apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit sudah tepat;
- 3) Apakah terdapat situasi mencurigakan yang dialami; dan
- 4) Risiko tambahan yang sebelumnya tidak teridentifikasi sudah dinilai dengan tepat dan apakah prosedur audit selanjutnya sudah dilaksanakan sebagaimana diwajibkan dalam SA.

Pertemuan *team briefing* atau pertemuan menjelang berakhirnya penugasan bukan merupakan kewajiban yang secara spesifik ditetapkan oleh SA, tetapi dapat berguna untuk staf membahas temuan audit mereka, mengidentifikasi setiap indikasi

kecurangan, dan menentukan perlunya prosedur audit selanjutnya (Tuanakotta, 2013:101).

Jika semua prosedur sudah dilaksanakan dan kesimpulan dicapai, maka temuan audit dilaporkan kepada manajemen dan *Those Charged With Governance* (TCWG) dan opini audit dirumuskan serta membuat keputusan mengenai redaksi yang tepat untuk laporan auditor (Tuanakotta, 2013:101).

6. Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Berdasarkan tahap-tahap audit atas laporan keuangan, salah satu tahap yang terpenting ialah melakukan perencanaan audit. Standar Audit (SA) 300 alinea kedua menyatakan bahwa, perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit (2013:1). Perencanaan yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut (SPAP SA 300, 2013:1):

- a. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit.
- b. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu.
- c. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

- d. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka.
- e. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka.
- f. Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.

7. Tahap-tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Menurut Boynton *et al.* (2006:185) langkah-langkah penting dalam merencanakan audit terdiri dari 6 tahap, yaitu:

- a. Memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien.
- b. Melaksanakan prosedur analitis.
- c. Membuat pertimbangan awal tentang tingkat materialitas.
- d. Mempertimbangkan risiko audit.
- e. Mengembangkan strategi awal untuk asersi signifikan.
- f. Memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern klien.

Menurut Arens (2015:246) perencanaan audit terdiri dari 8 langkah berikut ini:

- a. Menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal.
- b. Memahami bisnis dan industri klien.
- c. Menilai risiko bisnis klien.
- d. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan.

- e. Menetapkan materialitas, dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko bawaan.
- f. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian.
- g. Mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan.
- h. Mengembangkan strategi audit dan program audit secara keseluruhan.

Menurut Tuanakotta (2013:247) perencanaan audit terdiri dari empat langkah berikut ini:

- a. Memutuskan untuk menerima, melanjutkan, atau menolak penugasan atau perikatan audit.
- b. Merencanakan audit.
 - 1) Menentukan materialitas
 - 2) Melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka perencanaan
 - 3) Merumuskan strategi audit menyeluruh
- c. Melaksanakan prosedur penilaian risiko
 - 1) Menentukan dan menilai risiko bawaan
 - 2) Menentukan dan menilai risiko pengendalian
 - 3) Mengomunikasikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan
- d. Dokumentasikan temuan dan segala perubahan atas rencana audit semula.

Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut Standar Auditing (SA) 300 alinea sembilan bahwa auditor harus

mengembangkan suatu rencana audit yang harus mencangkup hal-hal sebagai berikut (2013:3):

- a. Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, yaitu pengidentifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya (SA 315).
- b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang direncanakan pada tingkat asersi, yaitu tanggapan auditor terhadap risiko yang telah dinilai (SA 330).
- c. Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilakukan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh SA.

Berdasarkan tahapan perencanaan audit dari berbagai sumber di atas, peneliti menggunakan tahapan audit menurut SPAP dikarenakan SPAP merupakan standar yang berlaku di Indonesia dan digunakan oleh Kantor Akuntan Publik yang berada di Indonesia. Langkah-langkah perencanaan menurut SA 300 terdiri atas berikut ini (2013:2):

a. Menetapkan strategi audit menyeluruh

Auditor harus menetapkan strategi audit secara keseluruhan yang menetapkan ruang lingkup, waktu, dan arah audit, serta yang memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit (SPAP SA 300.7:2).

Dalam menetapkan strategi audit, auditor harus (SPAP SA 300, 2013:2):

1) Mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya (SPAP SA 300, 2013:12):

- a) Kerangka pelaporan keuangan yang menjadi dasar penyusun informasi keuangan yang diaudit, termasuk kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi dengan kerangka pelaporan keuangan lainnya.
- b) Ketentuan pelaporan industri tertentu seperti pelaporan yang diharuskan oleh badan pengatur industri.
- c) Cakupan audit yang diharapkan, termasuk jumlah dan lokasi komponen yang dicakup.
- d) Sifat hubungan pengendalian antara entitas induk dengan komponennya yang menentukan bagaimana kelompok tersebut dikonsolidasi.
- e) Luas komponen yang diaudit oleh auditor lain.
- f) Sifat segmen bisnis yang diaudit, termasuk kebutuhan untuk pengetahuan khusus.
- g) Mata uang pelaporan yang digunakan, termasuk kebutuhan penjabaran mata uang untuk informasi keuangan yang diaudit.
- h) Kebutuhan untuk dilakukannya audit atas laporan keuangan tersendiri, jika disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, sebagai tambahan atas audit untuk tujuan konsolidasi.
- i) Ketersediaan hasil kerja auditor internal dan seberapa besar auditor akan mengandalkan hasil kerja tersebut.

- j) Penggunaan jasa oleh entitas dan bagaimana auditor dapat memperoleh bukti tentang rancangan atau operasi pengendalian yang dilakukan oleh organisasi jasa tersebut.
 - k) Penggunaan yang diharapkan dari bukti audit yang diperoleh dari audit sebelumnya.
 - l) Dampak teknologi informasi terhadap prosedur audit, termasuk ketersediaan data dan penggunaan teknik audit berbantuan komputer yang diharapkan.
 - m) Koordinasi atas cakupan dan saat pekerjaan audit yang diharapkan dengan penelaahan atas informasi keuangan interim, beserta pengaruhnya terhadap audit atas informasi yang diperoleh selama penelaahan tersebut.
 - n) Ketersediaan personel dan data klien.
- 2) Memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanaan waktu audit dan sifat komunikasi yang disyaratkan (SPAP SA 300, 2013:13):
- a) Jadwal pelaporan entitas, seperti pelaporan interim dan final
 - b) Pengorganisasian rapat dengan manajemen dan pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola untuk mendiskusikan sifat, saat, dan luas pekerjaan audit.
 - c) Pembahasan dengan manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tipe dan saat penerbitan laporan, dan komunikasi lainnya, baik secara tulisan maupun lisan,

termasuk laporan auditor, surat rekomendasi kepada manajemen, dan komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

d) Pembahasan dengan manajemen tentang komunikasi yang diharapkan atas status pekerjaan audit selama perikatan berlangsung.

e) Komunikasi dengan auditor komponen tentang tipe dan saat penerbitan laporan, dan komunikasi lainnya dalam hubungan dengan audit komponen.

f) Sifat dan waktu komunikasi yang diharapkan antara anggota tim perikatan, termasuk sifat dan waktu pertemuan tim perikatan, dan saat penelaahan hasil kerja tim perikatan.

g) Apakah terdapat komunikasi lain dengan pihak ketiga yang diharapkan, termasuk tanggungjawab pelaporan yang diharuskan oleh ketentuan yang berlaku atau tanggung jawab pelaporan yang diharuskan menurut kontrak.

3) Mempertimbangkan faktor-faktor yang, menurut pertimbangan profesional auditor, signifikan dalam mengarahkan usaha tim perikatan (SPAP SA 300, 2013:13):

a) Penentuan materialitas sesuai dengan SPAP SA 320 dan jika relevan:

- Penentuan materialitas untuk komponen dan komunikasi dan komunikasi dengan auditor komponen yang terkait sesuai dengan SA 600.
 - Identifikasi awal atas komponen signifikan dan golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan material.
- b) Identifikasi awal atas area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi.
- c) Dampak risiko kesalahan penyajian material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan terhadap arahan, supervisi dan penelaahan.
- d) Cara auditor menekankan kepada anggota tim perikatan tentang kebutuhan untuk selalu memiliki sikap kritis dalam berpikir dan menggunakan skeptisme profesional dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit.
- e) Hasil audit sebelumnya yang melibatkan pengevaluasian efektivitas operasi pengendalian internal, termasuk sifat defisiensi yang diidentifikasi dan tindakan yang diterapkan untuk mengatasinya.
- f) Pembahasan hal-hal yang dapat memengaruhi audit dengan personel KAP yang bertanggungjawab atas pelaksanaan jasa lain yang diberikan kepada entitas.
- g) Bukti atas komitmen manajemen terhadap rancangan, implementasi, dan pemeliharaan pengendalian internal yang

baik, termasuk bukti adanya dokumentasi yang tepat atas pengendalian internal tersebut.

h) Volume tansaksi, yang dapat menentukan apakah lebih efisien bagi auditor untuk mengandalkan pengendalian internal.

i) Pentingnya pengendalian internal entitas secara keseluruhan untuk mencapai keberhasilan operasi bisnis.

j) Perkembangan bisnis signifikan yang memengaruhi entitas, termasuk perubahan dalam teknologi informasi dan proses bisnis, perubahan dalam manajemen inti, serta akuisisi, merger, dan divestasi.

k) Perkembangan industri signifikan, seperti perubahan dalam regulasi industri dan ketentuan pelaporan yang baru.

l) Perubahan signifikan dalam kerangka pelaporan keuangan, seperti perubahan dalam standar akuntansi.

m) Perkembangan signifikan lain yang relevan, seperti perubahan dalam lingkungan hukum yang memengaruhi entitas.

4) Mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan dan jika relevan, apakah pengetahuan yang diperoleh dari perikatan adalah relevan untuk entitas yang akan diaudit.

5) Memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan (SPAP SA 300, 2013:15):

a) Pemilihan tim perikatan termasuk jika relevan, penelaahan pengendalian mutu perikatan, dan penugasan pekerjaan audit

kepada anggota tim perikatan, termasuk penugasan anggota tim perikatan dengan pengalaman yang tepat pada area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi.

- b) Penugasan perikatan, termasuk pertimbangan yang tepat atas lamanya waktu yang dibutuhkan untuk area yang mengandung risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi.

b. Mengembangkan Rencana Audit

Auditor harus mengembangkan suatu rencana audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut (SPAP SA 300, 2013:3):

- 1) Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan (SA 315)

Prosedur penilaian risiko merupakan prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, apakah karena kecurangan atau kesalahan, pada tingkat laporan keuangan dan asersi (SPAP SA 315, 2013:2).

Auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Namun, prosedur penilaian risiko semata tidak menyediakan bukti audit yang cukup dan tepat sebagai dasar opini

audit. Prosedur penilaian risiko harus mencakup permintssn keterangan dari manajemen, prosedur analitis, dan observasi dan inspeksi (SPAP SA 315, 2013:2).

Auditor harus mempertimbangkan apakah informasi yang diperoleh dari proses penerimaan atau keberlanjutan hubungan dengan klien relevan untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material. Jika auditor bermaksud untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya dengan entitas tersebut dan dari prosedur audit yang dilaksanakan dalam audit sebelumnya, auditor harus menentukan apakah informasi tersebut relevan dengan audit kini. Rekan perikatan dan anggota tim perikatan harus mendiskusikan kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kesalahan penyajian material, dan penerapan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku terhadap fakta dan kondisi entitas tersebut. Rekan perikatan harus menentukan hal mana yang dikomunikasikan kepada anggota tim perikatan yang tidak terlibat dalam diskusi. (SA 315, SPAP, 2013:3)

- 2) Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjut yang direncanakan pada tingkat asersi (SPAP SA 330, 2013:3).

Auditor harus merancang dan mengimplementasikan prosedur audit lebih lanjut yang sifat, saat, dan luasnya didasarkan pada dan merupakan tanggapan terhadap risiko kesalahan

penyajian material yang telah dinilai pada tingkat asersi (SPAP SA 330, 2013:2).

Dalam merancang prosedur audit lebih lanjut, auditor harus (SPAP SA 330, 2013:2):

- a) Mempertimbangkan dasar penilaian yang dilakukan atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi untuk setiap golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan, termasuk:

- Kemungkinan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh karakteristik tertentu yang relevan dengan golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan (contoh: risiko bawaan); dan
- Apakah penilaian risiko memperhitungkan pengendalian yang relevan (contoh, risiko pengendalian), dan dengan demikian menuntut auditor untuk memperoleh bukti audit untuk menentukan apakah pengendalian berjalan secara efektif.

- b) Memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan ketika auditor menilai risiko yang lebih tinggi.

- 3) Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh SA (SPAP SA 330, 2013:3).

c. Memutakhirkan dan Mengubah Strategi Audit Secara Keseluruhan dan Rencana Audit Jika Diperlukan Selama Pelaksanaan Audit

Sebagai akibat dari peristiwa yang tidak diduga, perubahan dalam kondisi, atau bukti audit yang diperoleh dari hasil prosedur audit, auditor mungkin perlu untuk memodifikasi strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit, dan oleh karena itu turut memodifikasi sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang direncanakan, berdasarkan pertimbangan yang telah direvisi atas risiko yang dinilai. Hal ini terjadi ketika informasi yang menjadi perhatian auditor berbeda secara signifikan dengan informasi yang tersedia ketika auditor merencanakan prosedur audit (SPAP SA 300.A13, 2013:8).

Sebagai contoh, bukti audit yang diperoleh melalui pelaksanaan prosedur substantif mungkin bertentangan dengan bukti audit yang diperoleh melalui pengujian pengendalian (SPAP SA 300.A13, 2013:9).

d. Supervisi Anggota Tim Perikatan dan Penelaahan Atas Pekerjaan Anggota Tim

Sifat, saat, dan luas arahan dan supervisi anggota tim perikatan, dan penelaahan hasil kerja mereka bervariasi, tergantung dari banyak faktor, termasuk (SPAP SA 300.A14, 2013:9):

- 1) Ukuran dan Kompleksitas Entitas
- 2) Area audit

- 3) Risiko kesalahan penyajian material yang dinilai. Sebagai contoh, suatu perikatan dalam risiko kesalahan penyajian material yang dinilai untuk suatu area audit umumnya sejalan dengan peningkatan dalam luas dan ketepatan waktu dari arahan dan supervisi anggota tim perikatan, dan penelaahan yang lebih detail atas hasil kerja mereka.
- 4) Kemampuan dan kompetensi setiap anggota tim perikatan dalam melaksanakan pekerjaan audit.

Jika suatu audit dilakukan kepada entitas yang lebih kecil, biasanya satu tim perikatan hanya terdiri dari satu staf dan satu rekan. Terdapat keadaan dimana klien tersebut cukup ditangani oleh seorang rekan. Jika demikian, maka rekan akan memahami seluruh isu yang material karena seluruh aspek pekerjaan telah dilakukannya sendiri. Pembentukan suatu pandangan yang objektif atas ketepatan pertimbangan yang dibuat dalam pelaksanaan audit dapat menimbulkan masalah ketika individu yang sama juga melakukan audit secara keseluruhan. Jika isu yang dihadapi adalah kompleks atau tidak biasa, dan audit dilakukan oleh praktisi tunggal, maka disarankan untuk berkonsultasi dengan auditor lain dengan pengalaman yang sesuai atau asosiasi profesi auditor (SPAP SA 300.A125, 2013:9).

e. Dokumentasi

Dokumentasi strategi audit merupakan suatu catatan atas keputusan-keputusan utama yang dipandang perlu untuk

merencanakan audit dengan tepat dan untuk mengomunikasikan hal-hal signifikan kepada tim perikatan. Sebagai contoh, auditor dapat meringkas strategi audit secara keseluruhan dalam bentuk suatu memorandum yang berisi keseluruhan dalam bentuk suatu memorandum yang berisi keputusan-keputusan utama tentang ruang lingkup, saat, dan pelaksanaan audit secara keseluruhan (SPAP SA 300.A16, 2013:9).

Dokumentasi rencana audit merupakan suatu catatan atas sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan dan prosedur audit lanjutan pada tingkat asersi sebagai tanggapan atas risiko yang dinilai. Dokumentasi tersebut juga berfungsi sebagai suatu catatan atas perencanaan prosedur audit yang tepat yang daat ditelaah dan disetujui sebelum prosedur tersebut dilaksanakan. Auditor dapat menggunakan program audit standar atau *checklist* penyelesaian audit, yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan untuk mencerminkan kondisi perikatan tertentu (SPAP SA 300.A17, 2013:10).

Pada penjelasan perencanaan audit menurut SPAP dan menurut Tuanakotta (2013) di atas, dapat disimpulkan dan dijabarkan secara poin-poin perencanaan audit, sebagai berikut:

a. Menentukan Audit Menyeluru

SA yang berhubungan dengan menentukan audit menyeluruh yaitu SA 300 yang terdapat pada berbagai alinea. SA 300 alinea 4 menyatakan bahwa tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit

sehingga audit tersebut dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif.

SA 300 alinea 7 menyatakan bahwa auditor wajib menyusun strategi audit secara menyeluruh berisi lingkup, pengaturan waktu dan arahan audit, yang menjadi petunjuk pengembangan rencana audit (2013:2).

Auditor wajib mempertimbangkan hal berikut ini dalam menyusun strategi audit menyeluruh (SPAP SA 300.8, 2013:3):

- 1) Mengidentifikasi sifat perikatan yang menjadi acuan bagi lingkup auditnya.
- 2) Memastikan tujuan pelaporan dalam suatu perikatan untuk merencanakan aturan waktu audit dan sifat komunikasi yang harus dilakukan.
- 3) Memperhitungkan faktor-faktor yang dalam kearifan profesionalnya penting untuk mengarahkan upaya-upaya tim audit.
- 4) Memperhitungkan hasil dari kegiatan-kegiatan perencanaan audit, termasuk menentukan pemahaman entitas dengan cara membandingkan pengetahuan yang dimiliki oleh partner mengenai entitas lain yang sejenis.
- 5) Memastikan sifat, waktu, dan luasnya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu perikatan.

Menurut Tuanakotta (2013:275) strategi audit menyeluruh mendokumentasikan keputusan kunci yang dianggap penting dalam merencanakan audit dan mengomunikasikan hal-hal penting kepada

anggota tim dengan baik. Setelah menyusun strategi audit menyeluruh pada tahap perencanaan, selanjutnya dalam menentukan audit menyeluruh juga melakukan pengembangan terhadap rencana audit dan memutakhirkan atau mengubah strategi audit dan rencana audit jika diperlukan (SPAP SA 300.10, 2013:3).

Tahap pengembangan rencana audit, auditor akan membahas mengenai (SPAP SA 300.9, 2013:3):

- 1) Sifat, waktu, dan luasnya prosedur penilaian risiko yang direncanakan, sebagaimana ditetapkan pada SA 315, yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian lain subbab ini.
- 2) Sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit selanjutnya yang direncanakan.
- 3) Prosedur audit lainnya yang direncanakan, yang diwajibkan agar penugasan audit sesuai dengan SPAP.

b. Menentukan dan Menggunakan Materialitas

Menurut Tuanakotta (2013:284) materialitas adalah dasar untuk penilaian risiko (*risk assessment*) dan penentu luasnya prosedur audit. Menentukan materialitas merupakan latihan dalam kearifan profesional. Materialitas didasarkan pada persepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan secara umum dari pemakai laporan keuangan sebagai suatu kelompok.

SA 320 alinea 14 menyebutkan bahwa dalam dokumentasi perencanaan audit, auditor wajib memasukan jumlah angka

materialitasnya beserta penjelasannya, dengan mempertimbangkan faktor-faktor dalam menentukan (2013:5):

- 1) *Overall materiality* (materialitas menyeluruh)
- 2) Tingkat materialitas untuk jenis asersi, saldo akun, atau pengungkapan (jika perlu)
- 3) *Performance materiality* (materialitas pelaksanaan)
- 4) Revisi angka yang disebutkan pada poin-poin di atas selama audit berlangsung apabila diperlukan.

Istilah materialitas secara menyeluruh (*overall materiality*) merujuk kepada materialitas yang diterapkan pada laporan keuangan secara keseluruhan. Jika salah saji dalam laporan keuangan melebihi jumlah yang secara umum diperkirakan wajar dan dapat memengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan, maka jumlah tersebut (secara menyeluruh) adalah material (Tuanakotta, 2013:284).

Tahap perencanaan audit membahas mengenai materialitas secara menyeluruh dan materialitas secara spesifik, dan penggunaan *performance materiality* (materialitas pada tingkat pelaksanaan audit) untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Materialitas digunakan selama audit berlangsung untuk perencanaan audit, penilaian risiko, dan pelaporan (Tuanakotta, 2013:284). Tingkat materialitas dan penggunaan *performance materiality* diringkas dalam

Tabel 2.2 berikut (Tuanakotta, 2013:290):

Tabel 2.1
Tingkat Materialitas dan Penggunaannya

	<i>Overall Materiality</i>	<i>Spesific Materiality</i>	<i>Performance Materiality</i>
Tujuan	Sebagai ambang batas untuk menentukan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik karena <i>error</i> atau <i>fraud</i> .	Sebagai ambang batas (lebih rendah dari <i>overall materiality</i>) yang diterapkan pada jenis transaksi, saldo akun, atau <i>disclosures</i> tertentu di mana salah saji yang lebih kecil dari <i>overall materiality</i> dapat memengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan.	Sebagai ambang batas (lebih rendah dari <i>overall materiality</i>) yang memastikan salah saji yang <i>immateril</i> (di bawah <i>overall</i> atau <i>spesific materiality</i>) ditemukan, dan memberikan kepada auditor suatu margin pengaman.
Dasar perhitungan	Salah saji yang dapat diterima (<i>tolerable error</i>) oleh pemakai laporan keuangan, karena tidak memengaruhi keputusan ekonomisnya.	Tingkat salah saji terkait dengan jenis transaksi, saldo akun, atau <i>disclosures</i> tertentu, yang secara wajarnya dapat memengaruhi keputusan ekonomis pemakai.	Berapa banyak pekerjaan audit agar: <ol style="list-style-type: none"> 1. Salah saji di bawah <i>over all</i> atau <i>spesific materiality</i> dapat ditemukan; dan 2. Ada margin pengaman untuk salah saji yang tidak terdeteksi.
Ancer-ancer sebagai titik awal	Materialitas berurusan dengan kearifan profesional dan bukan sekedar hitungan mekanis. Oleh karena itu, SA tidak memberikan petunjuk yang spesifik. Dalam praktiknya, laba dari operasi perusahaan yang berjalan normal (3-7%) sering digunakan sebagai acuan yang paling signifikan bagi	Tentukan angka yang lebih rendah, berdasarkan kearifan profesional, untuk area atau unsur laporan keuangan yang sensitif atau spesifik.	Standar Audit (SA) tidak memberikan petunjuk yang spesifik. Persentase bervarisasi dari 60% (dari <i>overall</i> atau <i>spesific materiality</i>), dimana risiko salah saji yang material lebih besar, sampai 85% dimana risiko salah saji yang material lebih kecil.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.1
Tingkat Materialitas dan Penggunaannya

	<i>Overall Materiality</i>	<i>Spesific Materiality</i>	<i>Performance Materiality</i>
	<p>pemakai laporan. Jika laba bukan acuan yang tepat (misalnya untuk entitas nirlaba) atau bukan <i>stable base</i>, acuan lain yang dapat digunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Revenues</i> atau <i>expenditures</i>: 1-3%, 2. <i>Assets</i> 1-3%; atau 3. <i>Equity</i> 3-5%. 		
Penggunaan dalam audit	<p>Menentukan apakah salah saji yang tidak dikoreksi terpisah atau tergabung, melampui <i>overall materiality</i>.</p>	<p>Menentukan apakah salah saji yang tidak dikoreksi, terpisah atau tergabung, melampui <i>spesific materiality</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai risiko salah saji yang material. 2. Rancang prosedur audit selanjutnya sebagai tanggapan atas <i>assessed risk</i>.
Revisi selama audit berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan situasi selama audit seperti penjualan sebagian bisnis. 2. Informasi baru 3. Perubahan pemahaman auditor mengenai entitas dan usahanya, sesudah melakukan prosedur audit selanjutnya. 	<p>Perubahan dalam situasi khusus.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan dalam <i>assessed risk</i>. 2. Sifat dan luasnya salah saji ditemukan sewaktu melaksanakan prosedur audit selanjutnya. 3. Perubahan dalam pemahaman auditor mengenai entitas.

Sumber: Tuanakotta (2013:290)

c. Diskusi tim audit

Tahap ini membahas tujuan dan sifat diskusi di antara anggota tim audit, mengenai kerentanan laporan keuangan entitas terhadap salah saji material (Tuanakotta, 2013:299). Menurut SA 240 alinea 15 (2013:5) mewajibkan diskusi di antara anggota tim penugasan dan keputusan partner yang memimpin penugasan mengenai hal-hal yang harus dikomunikasikan kepada anggota tim yang tidak terlibat dalam diskusi. Diskusi ini harus memberikan penekanan mengenai bagaimana dan di mana laporan keuangan entitas rentan terhadap salah saji yang material karena kecurangan, termasuk bagaimana kecurangan bisa terjadi. Diskusi ini harus dilakukan, dengan mengenyampingkan pendapat anggota tim tentang kejujuran dan integritas manajemen dan TCWG (SPAP SA 240, 2013:20).

Auditor wajib memasukkan hal-hal berikut dalam dokumentasi audit mengenai pemahaman auditor, mengenai entitas dan lingkungannya, dan penilaian mengenai risiko salah saji yang material sebagaimana diharuskan SA 315 (SPAP SA 240.44, 2013:15):

- 1) Keputusan penting yang diambil dalam diskusi di antara anggota tim penugasan mengenai kerentanan laporan keuangan entitas terhadap salah saji yang material karena kecurangan.
- 2) Salah saji yang material karena kecurangan, yang diidentifikasi dan dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi.

Partner yang memimpin penugasan dan anggota kunci tim penugasan wajib membahas kerentanan laporan keuangan entitas terhadap salah saji yang material, dan penerapan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku terhadap fakta dan situasi. Partner yang memimpin penugasan wajib menentukan hal-hal yang harus dikomunikasikan kepada anggota tim yang tidak terlibat dalam diskusi (SPAP SA 315.10, 2013:3).

d. Mengidentifikasi Risiko Bawaan

Menurut Tuanakotta (2013:313) identifikasi risiko merupakan pondasi dari suatu audit. Identifikasi risiko didasarkan kepada, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur yang dilaksanakan auditor untuk memahami entitas dan lingkungannya.

Tanpa pemahaman yang mendalam tentang entitas, auditor akan mengabaikan faktor risiko tertentu. Tujuan tahap penilaian risiko adalah mengidentifikasi sumber-sumber risiko, dan kemudian menilai apakah risiko-risiko ini mungkin menjadi sebab salah saji yang material dalam laporan kauangan. Langkah ini memberikan auditor informasi yang diperlukan untuk mengarahkan upaya audit langsung pada area di mana risikonya tinggi, dan menjauhi area di mana risikonya rendah (Tuanakotta, 2013:311).

1) Jenis risiko

Menurut Tuanakotta (2013:313) terdapat dua klasifikasi utama mengenai risiko, yakni risiko bisnis (*business risk*) dan

risiko kecurangan (*fraud risk*). Pada kedua risiko ini, terdapat kemungkinan salah saji yang material. Perbedaannya ialah, risiko kecurangan mengandung unsur kesengajaan. Untuk tujuan pembahasan, kerentanan terhadap risiko (*risk exposure*) dikelompokkan menjadi risiko rendah (*low risk*), risiko sedang (*moderate risk*), dan risiko tinggi (*high risk*). Berikut ini definisi risiko bisnis dan risiko kecurangan (Tuanakotta, 2013:313):

a) **Risiko bisnis**

Istilah risiko bisnis bukan merupakan sekedar risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Risiko bisnis berasal dari kondisi, peristiwa, situasi, tindakan, bahkan “tidak mengambil tindakan” (*inactions*) yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan perusahaan mencapai tujuannya dan melaksanakan strateginya. Termasuk, di dalamnya, penetapan tujuan dan strategi yang tidak tepat.

b) **Risiko Kecurangan**

Risiko kecurangan berhubungan dengan peristiwa atau kondisi yang berindikasi adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan atau adanya peluang untuk melakukan kecurangan.

2) Sumber informasi risiko mengenai entitas

Menurut Tuanakotta (2013:314) langkah pertama dalam proses penilaian risiko ialah mengumpulkan dan memutakhirkkan

sebanyak mungkin informasi yang relevan mengenai entitas.

Informasi ini memberikan kerangka rujukan yang penting untuk mengidentifikasi dan menilai faktor risiko yang mungkin ada.

Pada tabel 2.3 ini sumber-sumber risiko bisnis dan risiko kecurangan (Tuanakotta, 2013:317):

**Tabel 2.2
Sumber-Sumber Risiko**

Sumber informasi	Penjelasan
Tujuan dan strategi entitas	<ul style="list-style-type: none">a. Tujuan dan strategi entitas yang tidak tepat, tidak realistik, terlalu agresif.b. Produk atau jasa baru, atau memasuki bisnis baru.c. Masuk ke area bisnis/transaksi di mana entitas tidak mempunyai (atau sedikit) pengalaman.d. Tidak konsistennya strategi IT (<i>Information Technology</i>) dan strategi bisnis.e. Tanggapan terhadap pertumbuhan yang cepat, atau sebaliknya, penjualan yang menurun signifikan, menjadi beban bagi pengendalian internal dan keterampilan pegawai.f. Pengaturan keuangan melalui transaksi yang kompleks.g. Restrukturisasi korporasi.h. Banyaknya transaksi dengan pihak-pihak terkait.
Faktor eksternal	<ul style="list-style-type: none">a. Keadaan perekonomian (seperti resesi, krisis keuangan) dan perubahan dalam ketentuan perundang-undangan.b. Permintaan menurun akan produk atau jenis entitas.c. Tingkat kerumitan yang besar dalam ketentuan perundang-undangan.d. Perubahan dalam industri.e. Ketidakmampuan memperoleh sumber daya (bahan baku, mesin-mesin, tenaga terampil).f. Sabotase terhadap produk atau jasa entitas.g. Keterbatasan untuk memperoleh modal dan kredit.
Sifat entitas	<ul style="list-style-type: none">a. Budaya perusahaan dan <i>governance</i> yang buruk.b. Pegawai dalam posisi kunci dengan kemampuan yang meragukan.

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 2.2
Sumber-Sumber Risiko

Sumber informasi	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> c. Perubahan dalam posisi kunci, termasuk perginya eksekutif penting. d. Kompleksitas atau kerumitan dalam operasi, struktur organisasi, atau produk. e. Kegagalan dalam produk atau jasa yang menimbulkan tuntutan dan risiko reputasi. f. Gagal mengantisipasi kebutuhan untuk berubah (tenaga terampil atau teknologi). g. Kelemahan dalam pengendalian internal, khususnya yang ditangani manajemen. h. Hubungan yang buruk dengan penyedia/penyandang dana, seperti bank. i. Masalah kesinambungan usaha (<i>going concern</i>) dan likuiditas, termasuk hilangnya pelanggan penting. j. Instalasi sistem baru berkenaan dengan pelaporan keuangan.
Indikator Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengukuran kinerja tidak dilakukan oleh manajemen dalam menilai kinerja entitas dan capaian tujuan. b. Pengukuran tidak digunakan untuk memperbaiki operasi atau untuk mengambil tindakan perbaikan.
Kebijakan akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan kebijakan akuntansi secara tidak konsisten. b. Penerapan kebijakan akuntansi secara tidak tepat.
Pengendalian Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan yang lemah oleh manajemen atas operasi sehari-hari. b. Pengendalian lemah atau tidak berfungsi, atas kegiatan di tingkat entitas seperti Sumber Daya Manusia (SDM), kecurangan, dan pembuatan informasi akuntansi seperti estimasi akuntansi dan laporan keuangan. c. Pengendalian lemah atau tidak berfungsi, atas transaksi seperti penjualan, pembelian, beban biaya, dan gaji. d. Pengamaan yang lemah terhadap aset.

Sumber: Tuanakotta (2013:317)

3) Langkah-langkah Identifikasi Risiko

Menurut Tuanakotta (2013:323) terdapat 3 langkah dalam mengidentifikasi risiko yaitu sebagai berikut:

- Mengumpulkan informasi dasar tentang entitas

Langkah permulaan ialah memperoleh pemahaman dasar atau mempunyai kerangka acuan untuk merancang prosedur penilaian risiko. Tanpa langkah ini, akan sulit bahkan tidak mungkin, mengidentifikasi kesalahan dan kecurangan apa yang dapat terjadi dalam laporan keuangan. Langkah mengumpulkan informasi dasar tentang entitas adalah proses memutakhirkan informasi yang relevan mengenai entitas, tujuan entitas, budaya entitas, operasional entitas, pegawai dan eksekutif kunci, mengetahui struktur organisasi dan pengendalian internal.

- Merancang, melaksanakan, dan mendokumentasikan prosedur penilaian risiko

Kegiatan atau prosedur penilaian risiko ini harus dilakukan agar sumber risiko salah saji yang material dapat diidentifikasi, mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai entitas, dan dapat memperoleh bukti-bukti yang dapat mendukung proses audit.

Merancang dan melaksanakan prosedur penilaian risiko kegiatan yang terkait dengan pemahaman dasar entitas yang

telah didapatkan pada tahap sebelumnya. Apabila hal tersebut sudah dilaksanakan, lakukan pertemuan dengan anggota tim audit mengenai kerentanan laporan keuangan tentang salah saji yang material. Selanjutnya, tanyakan kepada manajemen bagaimana manajemen mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko, khususnya risiko kecurangan, dan faktor risiko apa yang telah mereka identifikasi dan kelola. Selain itu, juga tanyakan kepada manajemen apakah kesalahan atau kecurangan benar-benar terjadi dalam tahun berjalan. Proses akhir yaitu dokumentasikan semua faktor risiko yang diidentifikasi.

- c) Menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan area dalam laporan keuangan.

Menentukan dampak salah saji yang spesifik seperti kesalahan atau kecurangan yang dapat terjadi dalam laporan keuangan pada setiap faktor risiko yang diidentifikasi. Satu faktor risiko dapat mengakibatkan sejumlah salah saji yang berbeda, yang mungkin berdampak terhadap lebih dari satu area laporan keuangan.

Selanjutnya yaitu mengidentifikasi saldo akun, jenis transaksi, dan penyajian dan pengungkapan akun dan nominal yang material dalam laporan keuangan. Jika risiko yang diidentifikasi bersifat pervasif, hubungkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Identifikasi dampak risiko

menurut area dalam laporan keuangan untuk membantu penilaian risiko di tingkat asersi. Terakhir yaitu, mengidentifikasi dampak risiko pervasif untuk membantu penilaian risiko ditingkat laporan keuangan.

e. Menilai Risiko Bawaan

Berdasarkan SA 240 alinea 25 (2013:8) menyebutkan bahwa auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Hal tersebut mengacu pada SA 315 alinea 25 (2013:8) yang menyebutkan bahwa auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Untuk tujuan tersebut auditor wajib (SPAP SA 315, 2013:26):

- 1) Mengidentifikasi risiko melalui proses memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian yang relevan dengan risiko tersebut, dan dengan mempertimbangkan jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
- 2) Menilai risiko yang diidentifikasi dan mengevaluasi apakah risiko tersebut berhubungan lebih pervasif dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempunyai dampak terhadap banyak asersi.

- 3) Menghubungkan risiko yang diidentifikasi kepada apa yang bisa salah pada tingkat asersi, dengan memperhitungkan pengendalian yang relevan dengan apa yang ingin diuji oleh auditor.
- 4) Mempertimbangkan kemungkinan salah saji, termasuk salah saji ganda, dan apakah besaran dari salah saji yang potensial ini bisa mengakibatkan salah saji yang material.

Langkah berikutnya menurut Tuanakotta (2013:335) ialah menilai risiko yang diidentifikasi dan menentukan berapa pentingnya risiko tersebut untuk mengaudit laporan keuangan. Lebih baik, menilai terlebih dahulu risiko bawan (*inherent risk*) sebelum mempertimbangkan penggunaan pengendalian intern yang mungkin dapat memitigasi risiko tersebut.

Penilaian atas risiko yang diidentifikasi mempertimbangkan dua atribut mengenai risiko, yakni (Tuanakotta, 2013: 336):

- 1) Peluang terjadinya salah saji

Berapa probabilitas risiko itu terjadi? Auditor dapat mengevaluasi probabilitas ini dengan sederhana, yakni apakah probabilitasnya tinggi, sedang atau rendah. Atau, ia dapat memberi skor dalam bentuk angka, misalnya antara 1 sampai dengan 5, dimana skor yang lebih tinggi berarti peluang terjadinya lebih besar.

- 2) Besaran (dampak moneter) jika risiko terjadi

Jika risiko itu memang terjadi, berapa besar dampak moneternya? Pendapat mengenai hal ini harus dinilai terhadap suatu jumlah tertentu sebagai acuan. Jika tidak, orang yang berbeda (dengan angka materialitas yang berbeda dalam benaknya) bisa berkesimpulan yang berbeda. Untuk tujuan audit, angka yang ditetapkan berhubungan dengan apa yang merupakan salah saji material dalam laporan keuangan secara menyeluruh. Penilaian ini dievaluasi secara sederhana, sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Atau, ia dapat memberi skor dalam bentuk angka, misalnya antara 1 sampai dengan 5, dimana skor yang lebih tinggi berarti peluang terjadinya lebih besar.

f. Risiko Signifikan

SA yang berhubungan dengan tahap ini yaitu SA 240, 315, dan 330. SA 240 alinea 26 (2013:8) menjelaskan tentang apabila auditor mengidentifikasi risiko salah saji material yang terjadi akibat kecurangan, auditor wajib berdasarkan *judgementnya* menilai bahwa adanya indikasi kecurangan dalam aktivitas tersebut dan menilai asersi apa saja yang timbul akibat risiko tersebut. Hal ini didukung dengan SA 315 (2013:2) bahwa istilah untuk makna yang telah dijelaskan pada SA 240 merupakan risiko signifikan (*significant risk*) yaitu risiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai (*identified and assessed*), yang menurut pendapat auditor, memerlukan pertimbangan khusus.

Sebagai bagian dari penilaian risiko yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, auditor wajib menentukan apakah risiko yang diidentifikasi merupakan risiko signifikan. Proses penentuan apakah risiko tersebut termasuk risiko signifikan, auditor wajib mengeyampingkan pengendalian yang terkait dengan risiko tersebut (SA 315:27). Pertimbangan auditor untuk menentukan risiko tersebut merupakan risiko signifikan disebutkan dalam SA 315 alinea 28 yaitu (2013:9):

- 1) Apakah risiko tersebut merupakan risiko kecurangan;
- 2) Apakah risiko tersebut berkaitan dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, perkembangan akuntansi atau perkembangan lain yang signifikan dan karenanya memerlukan perhatian khusus;
- 3) Tingkat kompleksitas transaksi;
- 4) Apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan dengan pihak terkait;
- 5) Tingkat subjektivitasnya dalam pengukuran informasi keuangan terkait dengan risiko tersebut, khususnya pengukuran yang melihatkan banyak ketidakpastian; dan
- 6) Apakah risiko tersebut melibatkan transaksi signifikan di luar jalur bisnis entitas, atau yang terlihat “aneh” berdasarkan *judgement* auditor.

Selanjutnya, setelah auditor menentukan bahwa risiko signifikan memang ada, auditor wajib memperoleh pemahaman

pengendalian entitas, termasuk kegiatan pengendalian yang relevan untuk menangkal risiko tersebut (SPAP SA 315, 2013:29). Selain itu, auditor juga wajib melakukan prosedur substantif yang khusus menanggapi risiko tersebut (SPAP SA 330, 2013:21).

Setelah menanggapi risiko signifikan, menurut Tuanakotta (2013:347) auditor mendokumentasikan risiko signifikan yang diidentifikasinya dan mendokumentasikan tanggapan audit yang akan dilakukannya.

Salah satu tahap penentuan risiko signifikan menurut SA 315 yaitu apakah risiko tersebut merupakan termasuk risiko kecurangan. Selama proses perencanaan audit, auditor membuat penilaian atas *overall fraud risk assessment* berdasarkan faktor-faktor risiko kecurangan yang telah diidentifikasi. Penilaian risiko tersebut diperbarui setelah menyelesaikan evaluasi bukti berdasarkan hasil pengujian. Penilaian awal risiko menghasilkan keputusan auditor mengenai apakah terdapat perubahan pada program audit apabila diperlukan. Oleh karena itu, penilaian ini merupakan tahapan penting atas keefektifan audit, karena kesalahan dalam identifikasi peningkatan risiko merupakan salah satu alasan adanya kegagalan audit dalam memodifikasi prosedur yang direncanakan. Namun, perubahan dalam identifikasi risiko kecurangan tidak selalu menunjukkan bahwa auditor tahu akan mengubah program audit yang diperlukan. Akhirnya, sulit untuk menentukan kecurangan yang telah

teridentifikasi selama perencanaan audit karena bukti audit belum dikumpulkan. Akibatnya, yang penting adalah apakah auditor dapat mengidentifikasi faktor risiko kecurangan berdasarkan kearifan profesionalnya dalam menilai peningkatan risiko kecurangan dan terhadap sinyal-sinyal yang terlihat dalam penilaian risiko kecurangan (Hammershley, 2011).

g. Memahami Pengendalian Internal

Acuan dalam memahami pengendalian internal yaitu SA 315. Pertama-tama pada SA 315 alinea 4c (2013:2) menjelaskan mengenai definisi pengendalian internal yaitu proses yang dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk menyediakan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan suatu entitas yang berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Istilah pengendalian mengacu pada setiap aspek dari satu atau lebih komponen pengendalian internal.

Auditor harus memperoleh pemahaman atas pengendalian yang relevan dengan audit. Meskipun sebagian besar pengendalian yang relevan dengan audit kemungkinan berhubungan dengan pelaporan keuangan, namun tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan relevan dengan audit. Ini merupakan hal yang berkaitan dengan pertimbangan profesional auditor apakah suatu

pengendalian, secara individu atau bersama-sama dengan yang lain, merupakan hal yang relevan dengan audit (SPAP SA 315, 2013:12).

Ketika memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan dengan audit, auditor wajib mengevaluasi rancangan pengendalian tersebut dan menentukan apakah pengendalian tersebut memang diimplementasi dengan melakukan prosedur tertentu di samping bertanya kepada pihak manajemen (SPAP SA 315, 2013:13).

Auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai sistem informasi termasuk proses bisnis terkait yang relevan bagi pelaporan keuangan, termasuk berikut (SPAP SA 315.18, 2013:6):

- 1) Jenis transaksi dalam operasi entitas yang penting dalam laporan keuangan.
- 2) Prosedur, dalam sistem IT (*information technology*) maupun non-IT (*manual system*), yang digunakan untuk mengolah transaksi sejak penyiapan, pencatatan, pengolahan, pembetulan, pemindahan ke buku besar dan pelaporannya dalam laporan keuangan.
- 3) Catatan akuntansi, yang mendukung informasi dan akun tertentu dalam laporan kauengan yang digunakan untuk menyiapkan, mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi, termasuk pembetulan informasi yang salah, dan bagaimana informasi dipindah ke buku besar. Catatan ini dapat berbentuk catatan elektronis dan non-elektronis (manual).

- 4) Bagaimana sistem informasi merekam peristiwa dan keadaan di luar transaksi yang penting dalam laporan keuangan.
- 5) Proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menghasilkan pelaporan keuangan entitas, termasuk estimasi akuntansi dan pengungkapan yang penting.
- 6) Pengendalian atas *journal entries*, termasuk *non-standard journal entries* yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berulang (*non-recurring transactions*), transaksi luas biasa (*unusual transactions*) atau penyesuaian dan koreksi (*adjustment*) (SA 315:18).

Berdasarkan SA 315 alinea 19 (2013:7) auditor juga wajib memperoleh pemahaman mengenai bagaimana entitas mengomunikasikan peran dan tanggung jawab pelaporan keuangan dan hal-hal penting lainnya berkenaan dengan pelaporan keuangan, termasuk komunikasi antara manajemen dan TCWG dan komunikasi eksternal misalnya dengan regulator. Dalam memahami kegiatan pengendalian entitas, auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai bagaimana entitas tersebut menanggapi risiko yang timbul dari teknologi informasi (SPAP SA 315, 2013:21).

Alinea 22 SA 315 (2013:7) juga menjelaskan mengenai bagaimana auditor menggunakan pemahaman bisnis entitas untuk memantau pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk juga pengendalian yang relevan dengan audit, dan bagaimana entitas

mengambil tindakan perbaikan terhadap kekurangan atau kelemahan pengendalian. Selain itu, auditor juga wajib memperoleh pemahaman mengenai sumber informasi yang digunakan entitas untuk memantau kegiatan dan dasar yang digunakan manajemen untuk menyimpulkan bahwa informasi itu cukup andal untuk tujuan pemantauan (SPAP SA 315, 2013:24).

h. Mengevaluasi Pengendalian Internal

Dalam memperoleh pemahaman mengenai pengendalian yang sesuai dengan audit, auditor wajib mengevaluasi rancangan dari pengendalian tersebut dan menentukan apakah pengendalian tersebut sudah diimplementasi, dengan melaksanakan prosedur tambahan di samping melakukan prosedur *inquiry* (SPAP SA 315, 2013:13).

Hal ini juga didukung dengan pernyataan SA 315 alinea 29 (2013:10) yang menyatakan bahwa jika auditor sudah menentukan adanya risiko signifikan, auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai pengendalian entitas, termasuk kegiatan pengendalian yang relevan dengan risiko tersebut.

Setelah melakukan penilaian, hasil dari penilaian tersebut didokumentasikan, antara lain (SPAP SA 315, 2013:32):

- 1) Pembahasan di antara anggota tim (penugasan) audit dan keputusan signifikan yang dicapai;
- 2) Unsur utama pemahaman yang diperoleh mengenai setiap aspek tentang entitas dan lingkungannya dan setiap komponen

pengendalian internal; setiap informasi dari mana pemahaman itu diperoleh; dan prosedur pengendalian yang dilaksanakan.

- 3) Risiko salah saji material yang diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi; dan
- 4) Risiko yang diidentifikasi dan pengendalian terkait yang dipahami sebagai hasil pelaksanaan kewajiban.

i. Mengomunikasikan Kelemahan Pengendalian Internal

Tahap ini menjelaskan mengenai komunikasi kepada pihak manajemen dan *Those Charge With Governance* (TCWG) mengenai kelemahan pengendalian internal yang telah diidentifikasi. Acuan SA mengenai hal tersebut yaitu SA 260 dan SA 265. Menurut SA 265 alinea 7 (2013:7) auditor harus mengidentifikasi satu atau beberapa kelemahan dalam pengendalian internal yang dilakukannya selama pekerjaan audit yang dilaksanakan. Selanjutnya, auditor menentukan apakah kelemahan pengendalian internal tersebut signifikan (SPAP SA 265, 2013:8). Apabila signifikan, kelemahan pengendalian tersebut didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada manajemen dan TCWG secara tepat waktu (SPAP SA 265, 2013:9).

Auditor melakukan komunikasi kepada manajemen atau TCWG secara tertulis yang menjelaskan mengenai uraian kelemahan dan penjelasan tentang dampak potensial atas kelemahan pengendalian internal (SPAP SA 265, 2013:11). Informasi yang dikomunikasikan haruslah cukup untuk memungkinkan TCWG dan manajemen

memahami konteks komunikasi tersebut. Khususnya, auditor wajib menjelaskan bahwa (SA 265:11):

- 1) Tujuan audit adalah untuk auditor memberikan pendapat tentang laporan keuangan;
- 2) Audit tersebut meliputi pertimbangan mengenai pengendalian internal yang relevan untuk pembuatan laporan keuangan, untuk merancang prosedur audit yang tepat dalam situasi yang dihadapi, tetapi tidak untuk memberikan pendapat tentang efektifnya pengendalian internal; dan
- 3) Hal-hal yang dilaporkan, terbatas pada kelemahan pengendalian internal yang diidentifikasi auditor selama audit dan bahwa auditor menyimpulkan cukup penting untuk dilaporkan kepada TCWG.

j. Menyelesaikan Tahap Penilaian Risiko

Tahap ini merupakan tahap terakhir pada perencanaan audit, tahap ini merupakan tahap *me-review* dan mendokumentasikan atas risiko yang telah dinilai pada tingkat laporan keuangan maupun tingkat asersi. Selain mendokumentasikan hasil dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko pada tingkat laporan keuangan dan asersi, menurut SA 315 alinea 32 (2013:10), auditor juga wajib mendokumentasikan hal-hal berikut ini:

- 1) Diskusi di antara anggota tim audit (tim penugasan) dan keputusan signifikan yang dicapai.

- 2) Unsur-unsur kunci dalam memahami entitas dan lingkungan serta setiap komponen pengendalian internal; sumber-sumber informasi dari mana pemahaman itu diperoleh; dan prosedur penilaian risiko yang dilaksanakan.
- 3) Risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan pada tingkat asersi, yang diidentifikasi dan dinilai;
- 4) Risiko yang diidentifikasi dan pengendalian yang relevan untuk menangkal risiko yang diidentifikasi sesuai pemahaman auditor, yang diperolehnya sebagai hasil dari persyaratan.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.4.



Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
1.	Rachmawati, jenny Morasa, Meily Y.B. Kalalo (2016)	Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik. (Studi Kasus pada KAP Ariesman Auly, Drs)	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Sumber data: Primer 4. Metode Analisis: deskriptif Kualitatif	1. Objek Penelitian: KAP Ariesman Auly, Drs	Perencanaan audit laporan keuangan yang diterapkan oleh KAP Drs. Ariesman Auly telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
2.	Danti Putri Utami (2014)	Evaluasi Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (Kap Arhj).	1. Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Metode Pengumpulan data: Kepustakaan, wawancara, Dokumentasi, Konfirmasi	1. Objek Penelitian: Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (KAP ARHJ)	Perencanaan audit laporan keuangan pada KAP ARHJ telah memadai dan secara tertulis telah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP. Tetapi pada praktiknya, masih terdapat sedikit ketidaksesuaian yang kemudian penulis masukan sebagai kelemahan.
3.	Hasanah Uswatun (2013)	Pengaruh Perencanaan Audit dan Pelatihan Teknis Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	1. Variabel independen: Perencanaan Audit 2. Variabel Dependen: Kualitas Audit	1. Metode Penelitian: Kuantitatif 2. Sampel Penelitian: 26 auditor pada	Perencanaan audit dan pelatihan teknis secara signifikan memengaruhi kualitas hasil audit.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Persamaan	Perbedaan	
				Inspektorat Kabupaten Jepara 3. Metode Analisis: analisis korelasi dan analisis regresi linier ganda.	
4.	Jacqueline S. Hammersley (2011)	A Review and Model of Auditor Judgement in Fraud- Related Planning Tasks	1.Jenis Penelitian: Kualitatif 2. Variabel penelitian: Perencanaan Audit	3. Metode Analitis: <i>Literature Review</i>	Memberikan kerangka model dan teori yang dapat mempengaruhi auditor dalam melakukan fraud risk assessment sebagai bagian dari planning audit.

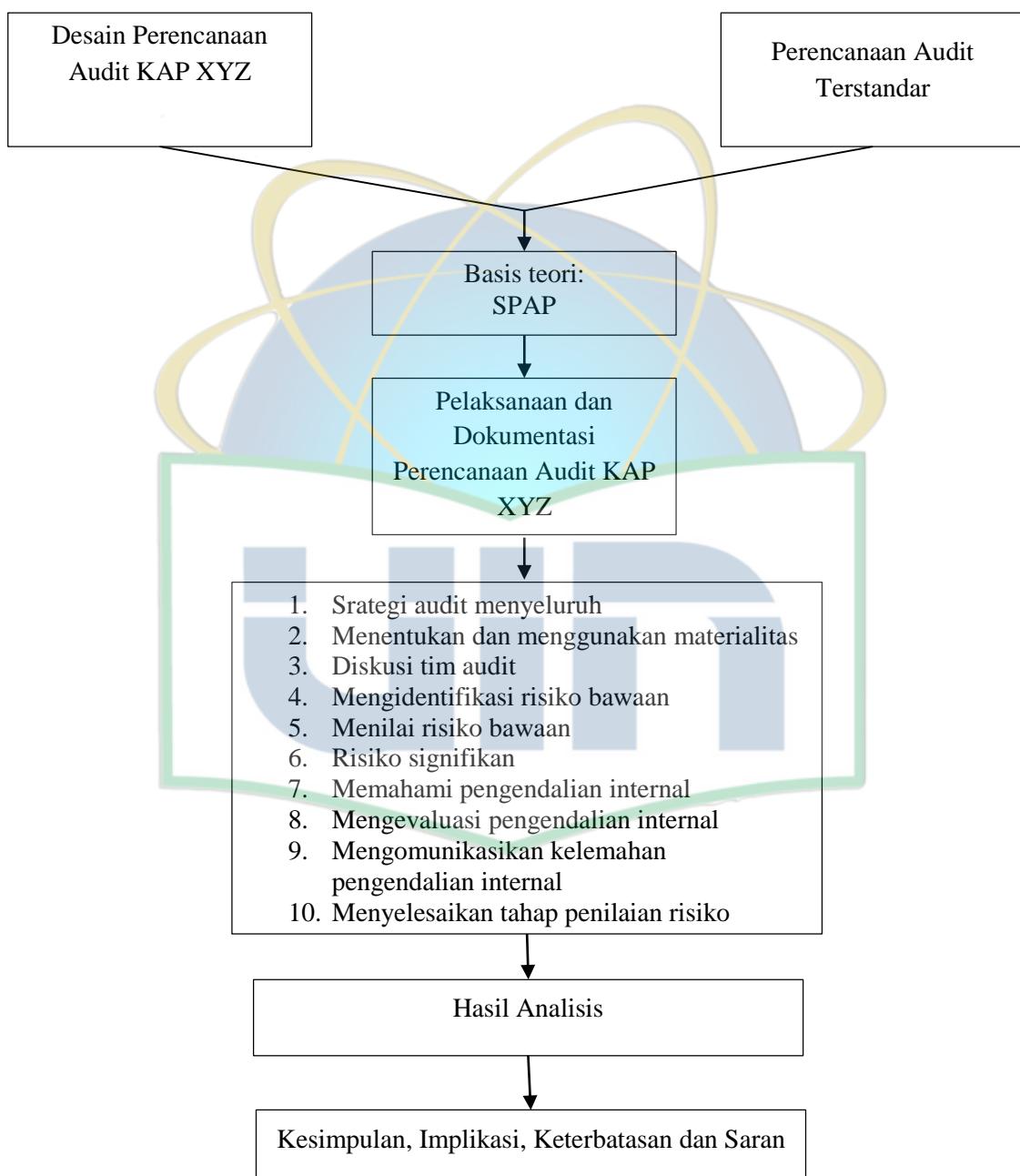
Sumber: Dari berbagai sumber yang diolah

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang akan menganalisis kesesuaian perencanaan audit dengan proses audit yang dilaksanakan pada KAP XYZ. Penelitian ini mendeskripsikan desain perencanaan audit hasil dari observasi peneliti di KAP XYZ.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan jenis data primer dan sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui media perantara. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda secara fisik, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Supomo dan Indrianto, 2002:146). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara.

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yaitu data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Supomo dan Indrianto, 2002:147). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang tersedia di KAP XYZ yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam analisis data. Data sekunder

yang dimaksud dapat berupa dokumentasi perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ dan implementasi perencanaan audit pada PT ABC.

B. Metode Penentuan Sampel

Pemilihan sampel penelitian ini berdasarkan pertimbangan (*judgement sampling*), merupakan tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan. Elemen populasi yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan (Supomo dan Indriantoro, 2002:131).

Objek penelitian ini yaitu KAP XYZ. Pemilihan KAP XYZ dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. KAP XYZ merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik bertaraf Internasional.
2. KAP XYZ merupakan salah satu KAP *second tier* yang berlokasi di Jakarta.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek

penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka atau komunikasi secara langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan (Supomo dan Indriantoro, 2002:152).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan pada tingkat Manajer KAP XYZ. Proses wawancara dilakukan pada sela-sela waktu kerja dan dilakukan di kantor klien Jl. Wolter Mongsidi, Jakarta Selatan. Proses wawancara dilakukan secara semi formal, oleh karena itu hasil wawancara tidak di rekam karena percakapan juga berhubungan dengan proses audit pada klien tersebut. Namun, untuk menunjang keabsahan proses wawancara, dibutuhkan berita acara dengan tanda tangan subjek yang diwawancarai serta dilampirkan pertanyaan yang diajukan kepada subjek wawancara.

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda, atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik observasi dalam penelitian bisnis dapat dilakukan dengan observasi langsung. Penggunaan teknik observasi langsung memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Peneliti dalam observasi langsung

tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati (Supomo dan Indriantoro, 2002:157).

Tujuan observasi adalah untuk memahami perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial. Teknik observasi lingkungan sosial yang digunakan peneliti yaitu *participant observation*. *Participant observation* merupakan teknik observasi dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal maupun nonformal (Supomo dan Indriantoro, 2002:158).

Observasi dilakukan selama kurang lebih 4 bulan selama peneliti menjadi staf magang sebagai junior auditor di KAP XYZ. Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mengikuti proses audit mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan.

3. Dokumentasi

Data dapat diperoleh dengan cara menelaah dokumen. Berdasarkan sumbernya, dokumen dapat diklasifikasikan sebagai dokumen yang bersifat personal, privat, atau publik (Payne dan Payne dalam Sarosa, 2012: 62). Dokumen personal adalah dokumen yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau individu. Contoh dokumennya adalah surat pribadi, buku harian, catatan, buku, dan lainnya. Dokumen privat adalah dokumen yang dihasilkan oleh organisasi atau institusi untuk kepentingan internal. Contoh dokumen privat antara lain notulen rapat, memo, anggaran, catatan

kepegawaian, dan lainnya. Dokumen publik adalah dokumen yang dibuat untuk konsumsi umum. Contoh dokumen publik antara lain artikel dimedia massa, laporan tahunan, *press release*, dan lainnya (Sarosa, 2012: 62).

Data yang digunakan berupa data primer yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ. Selain itu, data sekunder yang digunakan dengan memeriksa secara teliti dan mendalam atas dokumen dan catatan yang berhubungan dengan perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ.

D. Metode Analisis Data

Data penelitian disajikan dengan metode deskriptif. Studi deskriptif merupakan penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri, atau perspektif lain. Tujuan studi ini untuk menjelaskan aspek-aspek yang diamati. Studi ini membantu peneliti untuk menjelaskan karakteristik subjek yang diteliti, mengkaji berbagai aspek dalam fenomena tertentu, dan menawarkan ide masalah untuk pengujian atau penelitian selanjutnya (Supomo dan Indriantoro, 2002: 88).

Studi deskriptif menjelaskan karakteristik atau fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Pengumpulan data melalui studi ini, kadang dimaksudkan juga

untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian (Supomo dan Indriantoro, 2002: 89).

Analisis data dilakukan dengan beberapa langkah berikut ini:

1. Memperoleh pemahaman mengenai desain perencanaan audit KAP XYZ, selanjutnya pemahaman tersebut didokumentasikan.
2. Menguji kesesuaian pelaksanaan perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ dengan SPAP dan desain yang telah didapatkan sebelumnya.



BAB IV

PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Singkat KAP XYZ

KAP XYZ merupakan salah satu Kantor Akuntan Publik Internasional di Jakarta yang berdiri pada tahun 2003. Saat ini KAP XYZ memiliki 15 Partner dan *Director* serta lebih dari 230 staf profesional ini adalah salah satu kantor akuntan publik dan konsultan manajemen termasuk dalam kelompok 10 terbesar di Indonesia.

KAP XYZ menangani klien di bawah industri utama untuk audit dan *assurance* dan layanan konsultasi. Kapitalisasi pasar total KAP XYZ untuk klien yang terdaftar secara publik mencapai USD 68,4 miliar. Klien KAP XYZ diantaranya pada bidang asuransi, *banking, securities, pension funds, property & real estate, retail/trading, manufacturing, plantation, mining & energy*, BUMN, dan beberapa perusahaan Tbk, serta pangsa pasar klien reksadana KAP XYZ mencapai 43% dari keseluruhan total market.

2. Struktur Organisasi KAP XYZ

Struktur organisasi menggambarkan fungsi dan wewenang yang ada di perusahaan, sehingga wewenang dan tanggung jawab dapat diketahui dengan jelas.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KAP XYZ

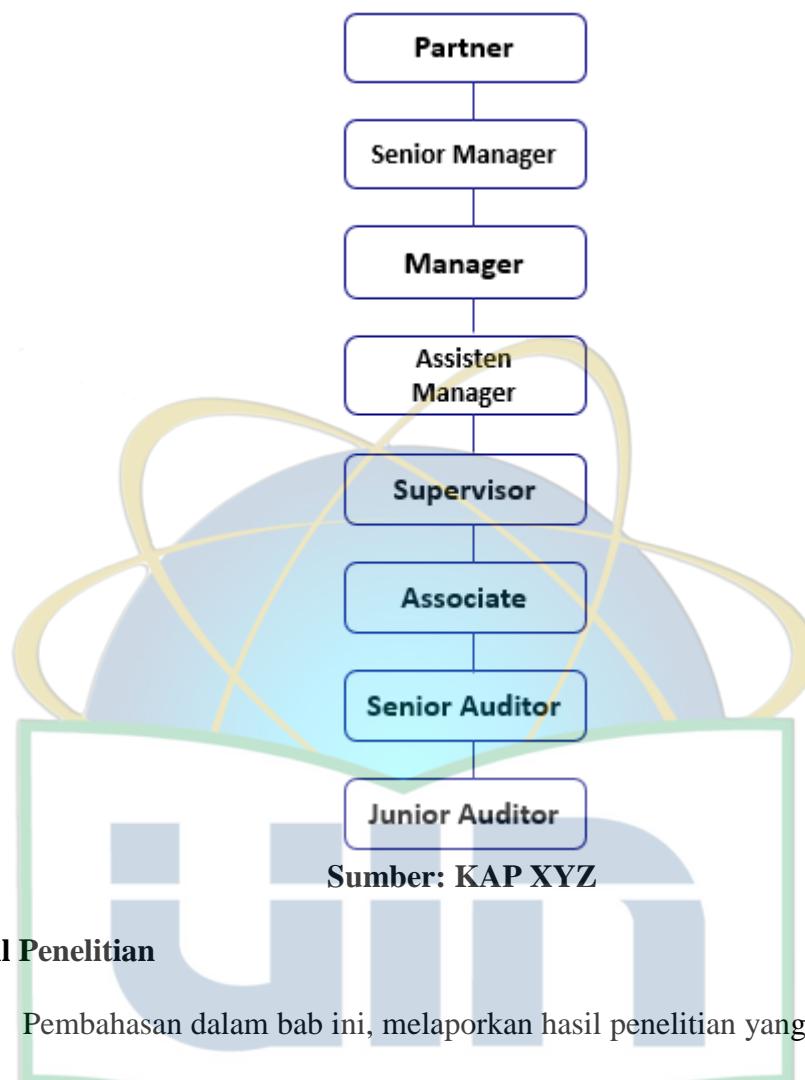


Sumber: KAP XYZ

Manajer partner bertugas sebagai penanggung jawab. KAP XYZ dibagi menjadi empat divisi yaitu *business development and marketing division, assurance and audit assignment, risk management and quality control, dan human resources, training, and administrations.*

Divisi audit dan asuransi terbagi menjadi tiga grup besar yaitu grup asuransi, reksadana, dan properti. Selama peneliti melakukan observasi, peneliti berada pada grup asuransi. Adapun struktur organisasi berdasarkan jabatan pada divisi audit khususnya grup asuransi adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 2
Stuktur Organisasi



B. Hasil Penelitian

Pembahasan dalam bab ini, melaporkan hasil penelitian yang dilakukan pada KAP XYZ. Di samping itu, pembahasan hasil penelitian ini mengacu pada landasan teori yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka pada Bab 2.

1. Desain Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan di KAP XYZ

Sebelum membahas kesesuaian perencanaan audit KAP XYZ, terlebih dahulu peneliti menjelaskan desain perencanaan audit yang diterapkan oleh KAP XYZ dalam setiap penugasan dan pendokumentasian perencanaan audit laporan keuangan suatu perikatan.

Metode pengumpulan informasi atas perencanaan audit KAP XYZ adalah dengan cara studi dokumentasi atas perencanaan audit yang dilakukan selama peneliti melaksanakan observasi. Perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ didokumentasikan pada dokumen yang terpisah. Adapun dokumen terkait perencanaan audit KAP XYZ antara lain E-1 *Audit Strategy Memorandum*, E-2 *Audit Planning Memorandum*, E-3 *Assessment of Fraud Risk*, E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*, E-5 *Planning and Performance Materiality*. Adapun rangkaian desain tersebut akan dijelaskan berikut ini:

a. E-1 Audit Strategy Memorandum

Audit strategy memorandum berisikan gambaran umum mengenai hal-hal yang akan didokumentasikan dalam perencanaan audit. Selanjutnya, masing-masing bagian yang tertera dibawah ini akan dijabarkan secara rinci dalam indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*, E-3 *Assessment of Fraud Risk*, E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*, dan E-5 *Planning and Performance Materiality*.

1) *The Entity's Business*

Pada bagian ini, KAP XYZ mendokumentasikan penjelasan atas entitas bisnis klien. Dengan mempertimbangkan kegiatan dan produk entitas; lokasi operasional; sejarah pendirian; tujuan dan strategi bisnis; pangsa pasar; pelanggan utama; pemasok utama; faktor dan tanggapan bisnis utama oleh entitas seperti dari faktor politik dan peraturan, ekonomi, sosial, dan teknologi; analisis SWOT

(*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*); pemangku kepentingan dan harapan pemegang saham, pemerintah, dan karyawan terhadap bisnis klien; dan proses operasional manajemen.

Auditor dapat memperoleh pengetahuan tentang sektor industri dan entitas dari sejumlah sumber seperti:

- a) Pengalaman sebelumnya dengan entitas dan sektor industri sejenis
- b) Diskusi dengan orang-orang yang mendapat informasi di dalam entitas, seperti direktur dan personil operasi senior
- c) Diskusi dengan auditor internal dan peninjauan laporan audit internal
- d) Diskusi dengan auditor lain dan dengan penasihat hukum dan lainnya yang telah memberikan layanan kepada entitas atau dalam sektor industri
- e) Diskusi dengan orang-orang di luar entitas, seperti regulator, pelanggan, pemasok, dan pesaing
- f) Publikasi yang terkait dengan industri
- g) Perundang-undangan yang secara signifikan memengaruhi entitas
- h) Dokumen yang dihasilkan entitas, seperti notulen rapat manajemen, komunikasi dengan pemegang saham atau diajukan ke pihak yang berwenang, laporan manajemen internal, laporan keuangan sementara, kebijakan manajemen, buku pedoman akuntansi dan kontrol, bagan akun, spesifikasi peran dan rencana pemasaran dan penjualan.

2) *Reporting Objectives, Timing of the Audit and Communications Required*

Berdasarkan dokumen perencanaan audit laporan keuangan KAP yang dapat dilihat pada Lampiran 3: Form E-1 *Audit Strategy Memorandum*. Auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ketika memastikan tujuan pelaporan atas suatu perikatan, waktu audit, dan sifat komunikasi yang diperlukan:

- a) *Time table* sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian Gambar 4.10, pada subbab E-1 *Audit Planning Memorandum* bagian *Assignment Timetable And Responsibility*.
- b) Pertemuan dengan manajemen dan *Those Charged With Governance* (TCWG) atas tata kelola untuk membahas sifat, lingkup, dan waktu kerja audit.
- c) Diskusi dengan manajemen dan TCWG atas tata kelola mengenai jenis dan waktu yang diharapkan dari laporan yang akan diterbitkan dan komunikasi lainnya, baik tertulis maupun lisan, termasuk laporan auditor, *management letters* dan komunikasi dengan TCWG.
- d) Komunikasi dengan auditor komponen (apabila ada) mengenai jenis yang diharapkan dan waktu laporan yang akan dikeluarkan dan komunikasi lain sehubungan dengan audit komponen.

- e) Sifat dan waktu komunikasi yang diharapkan di antara anggota tim perikatan, termasuk sifat dan waktu pertemuan tim dan waktu peninjauan pekerjaan yang dilakukan.
- f) Apakah terdapat komunikasi lain yang diharapkan dengan pihak ketiga, termasuk tanggung jawab pelaporan hukum atau kontraktual yang timbul dari audit.

3) *Direction of the audit*

Berdasarkan dokumen perencanaan audit laporan keuangan KAP yang dapat dilihat pada Lampiran 3: *Form E-1 Audit Strategy Memorandum*. Auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut saat mengatur arah audit:

- a) Sehubungan dengan materialitas yaitu:
 - Pengaturan materialitas untuk tujuan perencanaan
 - Pengaturan dan mengomunikasikan materialitas dengan auditor komponen
 - Mempertimbangkan kembali materialitas sebagai prosedur audit yang dilakukan selama audit
 - Mengidentifikasi komponen material dan saldo akun
- b) Komunikasi dengan perusahaan lain yang terlibat dalam pelaksanaan audit.
- c) Audit area di mana terdapat risiko salah saji material yang lebih tinggi.

- d) Dampak dari risiko salah saji material yang dinilai pada tingkat laporan keuangan keseluruhan terhadap arah, pengawasan, dan peninjauan.
- e) Pemilihan tim keterlibatan dan penugasan kerja audit kepada anggota tim, termasuk penugasan anggota tim yang berpengalaman secara tepat ke area yang mungkin berisiko tinggi salah saji material.
- f) Penganggaran keterlibatan termasuk mempertimbangkan jumlah waktu yang tepat untuk disisihkan untuk area yang mungkin ada risiko salah saji material yang lebih tinggi.
- g) Hasil audit sebelumnya yang melibatkan evaluasi efektivitas operasi pengendalian internal, termasuk sifat kelemahan yang teridentifikasi dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.
- h) Bukti komitmen manajemen terhadap desain dan operasi pengendalian internal yang sehat, termasuk bukti dokumentasi yang tepat dari pengendalian internal tersebut.
- i) Volume transaksi yang dapat menentukan apakah lebih efisien bagi auditor untuk mengandalkan pengendalian internal.
- j) Perkembangan bisnis dan industri yang signifikan memengaruhi entitas, termasuk perubahan dalam teknologi informasi dan proses bisnis, perubahan dalam struktural manajemen, dan aktivitas akuisisi, merger, dan divestasi.

- k) Perubahan signifikan dalam kerangka pelaporan keuangan, seperti perubahan dalam standar akuntansi.
- l) Perkembangan relevan lainnya yang signifikan, seperti perubahan dalam lingkungan hukum yang memengaruhi entitas.

b. E-2 Audit Planning Memorandum

1) Intended Scope of Audit Work

Gambar 4.3 berikut ini merupakan format atas *audit scope* yang harus didokumentasikan oleh KAP dalam perencanaan auditnya.

**Gambar 4. 3
Audit Scope**

Details of significant audit risks are given in the Audit Risk Assessment and Commentary filed at E/5.
Audit plus additional services?
By whom (network member firms for instance) and from where?
Other service and network contact individuals, with telephone and e-mail details.
Ensure that work scope is covered and permitted by the independence and ethical issues commentary; also that it is consistent with the engagement letter.
Interactions with:
- Other audit firms
- Internal audit function
- Other professionals and experts where any reliance is to be placed on their work

Sumber: KAP XYZ

Pada gambar 4.3 di atas format *audit scope* harus memenuhi beberapa hal berikut ini:

a) *Details of significant audit risks*

Audit scope menjelaskan mengenai risiko signifikan apa yang mungkin terjadi pada klien. Penentuan risiko signifikan berasal dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan *judgement*

auditor yang telah ditentukan sebelumnya. Detail atas risiko signifikan akan dijelaskan secara terpisah dan lebih rinci pada bagian E-5 *Assessment significant risk and commentary*.

b) *Audit plus additionl service*

Menyatakan jenis audit apa yang diberikan auditor dalam satu perikatan tersebut. Jenis audit dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Berdasarkan observasi penulis, jenis jasa yang sering diberikan oleh KAP XYZ pada *peak season* adalah pemeriksaan umum, sedangkan jenis jasa pemeriksaan khusus mungkin terjadi pada *low season*.

c) *By whom (network member firms for instance) and from where*

Menyatakan nama manajemen yang bertanggung jawab dalam perikatan ini yang dinamakan *key client personnel*. Biasanya yang menjadi penanggung jawab dari pihak manajemen yaitu direktur keuangan dan direktur utama. Bagian ini disebutkan nama manajemen dan *Those Charged With Governance* (TCWG) atas klien, sehingga dapat diketahui dengan jelas penanggung jawab atas suatu perikatan pada saat itu.

d) *Other service and network contact individuals, with telephone and e-mail details*

Menyatakan tentang jenis jasa audit lain yang dilaksanakan selama penugasan. Beberapa kasus klien tertentu, pada tahun audit yang sama meminta KAP untuk melakukan audit lebih dari satu

jenis jasa. Hal ini dijelaskan dan disebutkan jenis jasa lain yang diberikan oleh KAP. Pihak TCWG yang disebutkan di atas juga disertakan identitas dirinya.

- e) *Ensure that work scope is covered and permitted by the independence and ethical issues commentary; also that it is consistent with the engagement letter*

Setiap perikatan mengharuskan auditor untuk mengisi *form* pernyataan independensi dan isu etika lainnya atas klien yang diauditnya. Pernyataan independensi auditor harus konsisten dengan yang tertera pada *engagement letters*. Hal ini dilakukan untuk memastikan objektifitas auditor terhadap klien yang diauditnya.

- f) *Other audit firm*

Menyatakan bahwa ada atau tidaknya KAP lain yang ada dalam satu masa audit yang sama. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila dalam melakukan audit perusahaan yang memiliki anak atau melakukan audit laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan anak yang diaudit oleh KAP lain, harus dinyatakan pada bagian ini.

- g) *Internal audit function*

Menyatakan ada atau tidaknya fungsi auditor internal atas pengendalian internal yang terdapat pada perusahaan klien. Apabila ada, diisi dengan seberapa efektif dan berpengaruh audit

internal terhadap operasional perusahaan. Hal ini digunakan sebagai penilaian awal atas risiko pengendalian perusahaan klien.

- h) *Other professionals and experts where any reliance is to be placed on their work*

Bagian ini dilengkapi apabila terdapat jasa profesional lain pada klien yang sama dalam menangani perusahaan. Hal ini harus dinyatakan untuk menentukan prosedur audit selanjutnya dalam melakukan *inquiry* pada jasa profesional tersebut. Contoh jasa profesional lain sering didapati yaitu aktuaris.

2) *Commercial and Financial Environment*

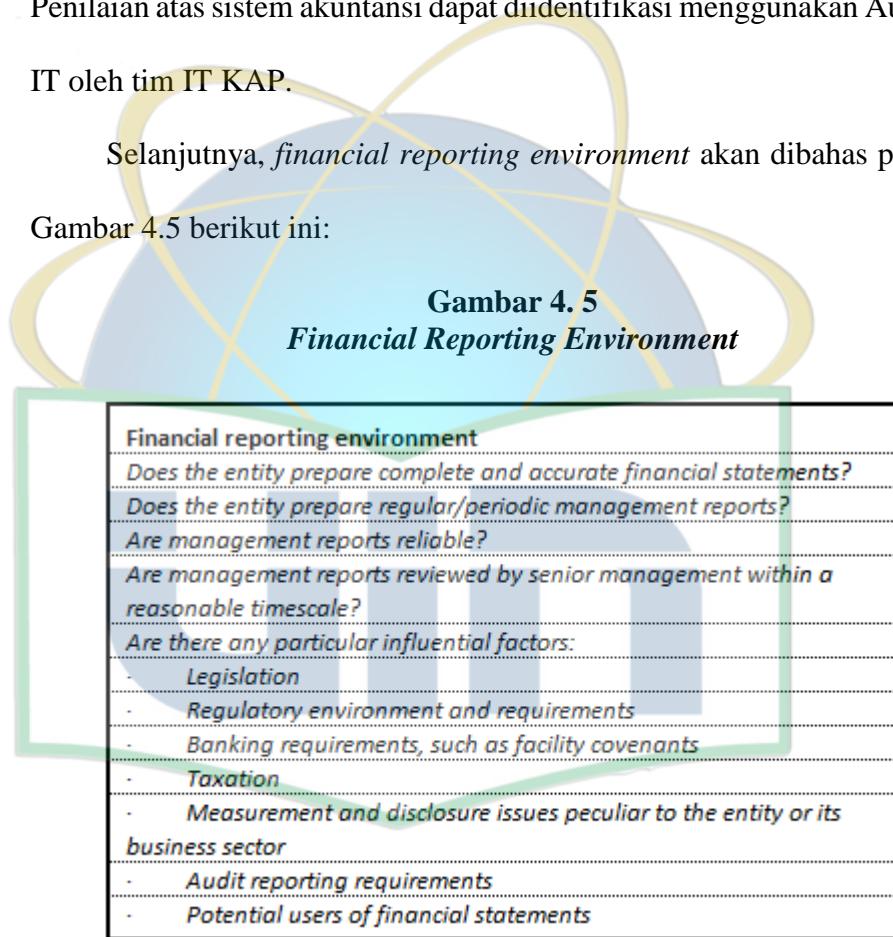
**Gambar 4.4
Commercial Environment**

Commercial environment
<i>The principal activity of the entity has continued to be Details of the commercial environment are given in section C of this file. There are no key audit issues identified during planning as arising from the commercial environment.</i>
Accounting systems and control environment
<i>Systems: List the main accounting ledgers in use, indicating whether computerised or otherwise Detail the accounting software in use, confirm that it is licensed and has current capabilities Integration with non-accounting functions Suppliers of software and support; in-house support and development capabilities Current period changes in systems and procedures Incidence of processing delays and inaccuracies Sufficiency of the system for the needs of the entity</i>
Control environment:
<i>Does the entity operate back-ups for its systems and are these sufficient Adequate segregation of duties Access controls and password protection Systems and program development controls Disaster recovery plan, with periodic testing Contingency planning User training and manuals</i>

Sumber: KAP XYZ

Terdapat dua bagian dalam tahap *commercial environment* yaitu *accounting system and control environment* dan *financial reporting environment*. Gambar 4.4 menjelaskan tentang *accounting system and control environment*, yaitu menjelaskan mengenai *software akuntansi* yang digunakan oleh perusahaan klien dan bagaimana pengaruh sistem akuntansi tersebut terhadap pengendalian internal perusahaan. Penilaian atas sistem akuntansi dapat diidentifikasi menggunakan Audit IT oleh tim IT KAP.

Selanjutnya, *financial reporting environment* akan dibahas pada Gambar 4.5 berikut ini:



Sumber: KAP XYZ

Financial reporting environment menyatakan bahwa perusahaan klien telah menyiapkan laporan keuangan yang lengkap dan akurat; perusahaan klien telah menyiapkan laporan manajemen

secara berkala; apakah laporan tersebut tepat diandalkan; apakah laporan manajemen yang disiapkan telah diperiksa oleh pihak yang berwenang; dan apakah terdapat faktor-faktor tertentu yang berpengaruh. Pernyataan tersebut didapati melalui *inquiry* dan pengamatan dokumen klien.

3) *Overall approach to Components of Financial Statements*

**Gambar 4.6
Comercial Environment**

	This period	Last period	Audit file section(s)
Profit and loss account			
<i>Components</i>	<i>Figures</i>	<i>Figures</i>	<i>Specify file sections covering the financial statement caption</i>
Balance sheet			
<i>Components</i>	<i>Figures</i>	<i>Figures</i>	<i>Specify file sections covering the financial statement caption</i>
<i>Give brief commentary on the reasons for significant fluctuations in values when compared with prior period for each of the financial statements captions at the macro-level.</i>			
<i>Replay the approach to identified key risk areas in broad terms. Address specifically the going concern issue</i>			

Sumber: KAP XYZ

Berdasarkan Gambar 4.6 di atas, membandingkan saldo setiap komponen di laporan keuangan tahun berjalan dengan saldo laporan keuangan *audited* tahun sebelumnya. Masing-masing dari komponen laporan keuangan merujuk pada *working paper* setiap komponen. Selanjutnya memberikan kesimpulan atas kenaikan atau penurunan yang signifikan secara keseluruhan atas komponen *Profit and Loss* dan *Balance sheet*. Kesimpulan diberikan

berdasarkan analisis awal setelah auditor mendapatkan laporan keuangan. Setelah melihat dan menganalisis secara keseluruhan, auditor menanggapi dengan mengidentifikasi akun apa saja yang memiliki risiko tinggi pada area tertentu.

4) *Analytical Review*

Analytical review ditentukan berdasarkan hasil analisis kenaikan dan penurunan atas saldo akun yang ada pada *Profit and Loss* dan *Balance Sheet*. Selanjutnya, pada akun yang mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan diberikan alasan terhadap kenaikan atau penurunan tersebut dengan melakukan verifikasi atau *inquiry* kepada manajemen baik yang berhubungan dengan akuntansi atau alasan pengendalian terhadap akun tersebut.

Analytical review pada tahap perencanaan dinamakan *preliminary analytical review* dan menggunakan angka laporan keuangan *unaudited*.

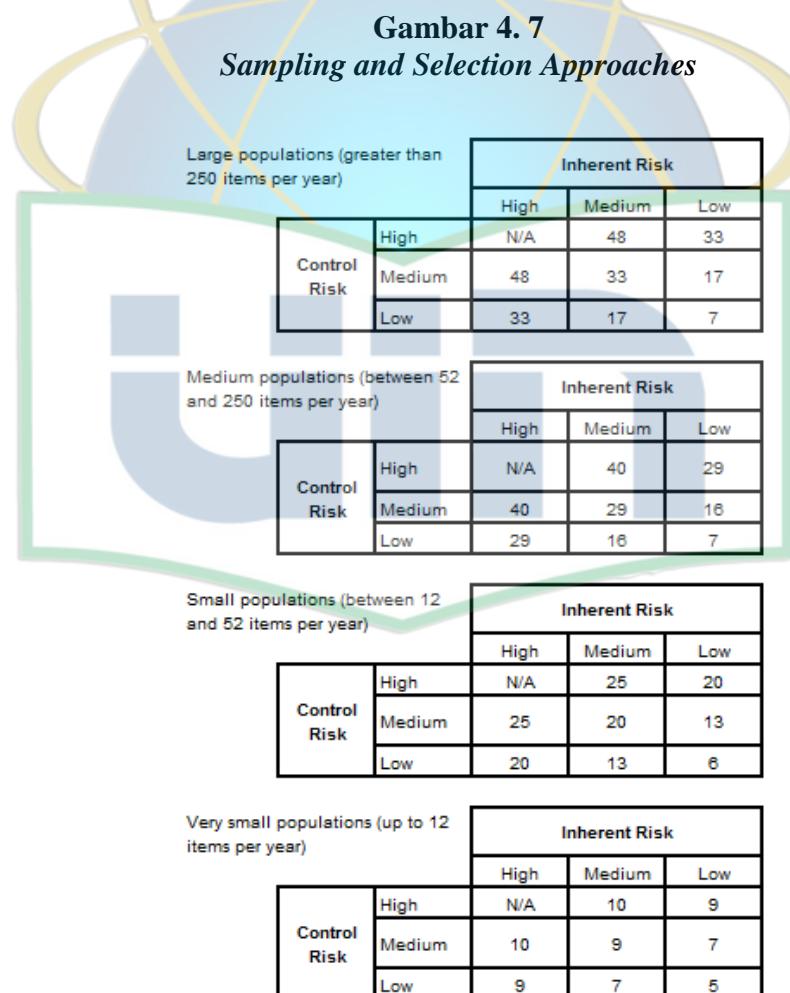
5) *Materiality Indicators*

Menentukan indikator perhitungan materialitas menggunakan komponen dalam laba rugi dan neraca. Setelah basis materialitas ditentukan, selanjutnya menilai seluruh akun apakah saldo masing-masing akun kurang dari, sama dengan, atau lebih dari jumlah materialitas. Hal ini akan menyebabkan prosedur lanjutan apa yang akan dipilih atas akun tersebut.

6) Overall Audit Approach Planned

Pada tahap ini, auditor menjelaskan bahwa melakukan prosedur audit berdasarkan pemahaman tentang bisnis perusahaan, dan melakukan prosedur substantif dan tinjauan analitis pada akun-akun yang telah dinyatakan signifikan untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Prosedur audit untuk akun-akun yang tidak dinyatakan material, tetap dilakukan prosedur minimum yaitu konfirmasi saldo dan pemeriksaan fisik aset tetap.

7) Sampling and Selection Approaches



Sumber: KAP XYZ

Penentuan sampel berdasarkan Gambar 4.7 dibedakan berdasarkan golongan total populasi. Terdapat empat level dalam penggolongan total populasi yaitu, level pertama golongan populasi besar (*large populations*), level kedua populasi menengah (*medium populations*), level ketiga populasi kecil (*small populations*), dan level keempat populasi sangat kecil (*very small populations*).

Penentuan jumlah sampel level pertama digunakan apabila populasi data klien yang di audit termasuk dalam golongan populasi besar (*high populations*) yaitu populasi sebanyak lebih dari 250 *items* per tahun. Pertama-tama, penentuan jumlah sampel didasarkan pada risiko pengendalian (*control risk*) dan risiko bawaan (*inherent risk*) yang terjadi pada bisnis klien. Setelah menentukan tingkat risiko pengendalian dan risiko bawaan, selanjutnya penentuan jumlah secara lebih pasti dilihat dari berbagai kondisi.

Kondisi pertama apabila risiko pengendalian tinggi dan risiko bawaan tinggi, sampel yang diambil tidak terbatas atau sampai dengan 100% hal ini dikarenakan risiko salah saji material yang terjadi pada klien tersebut sangat tinggi, jadi sampel yang diambil haruslah banyak sampai dengan 100% yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan auditor terhadap proses bisnis klien telah dilaksanakan dengan wajar.

Kondisi kedua apabila *control risk* tinggi namun *inherent risk*nya medium atau rendah, hal ini terjadi karena *inherent risk* pada

bisnis klien medium atau rendah, namun tidak diiringi dengan pengendalian internal yang dilakukan oleh klien, sehingga menyebabkan *control risk* tetap tinggi. Jumlah sampel yang harus didapatkan auditor apabila *control risk* tinggi namun *inherent risk* medium sejumlah 48.

Kondisi ketiga apabila *control risk* medium sedangkan *inherent risk* nya tinggi, risiko bawaan atas bisnis klien tinggi, namun pengendalian internal yang dilakukan klien dapat mengurangi *inherent risk* sehingga mengakibatkan turunnya *control risk* ketingkat medium. Jumlah sampel yang harus didapatkan apabila *control risk* medium sedangkan *inherent risk* nya tinggi sejumlah 48.

Kondisi keempat apabila *control risk* tinggi namun *inherent risk* rendah atau sebaliknya, maka jumlah sampel yang harus didapatkan auditor sebanyak 33 sampel. Jumlah sampel 33 ini merupakan jumlah medium antara 48, 33, 17, dan 7 sampel. Dipilih jumlah sampel 33 karena posisi *control risk* dan *inherent risk* dalam keadaan seimbang. Karena, apabila *control risk*nya tinggi namun *inherent risk*nya rendah, artinya bisnis klien merupakan bisnis dengan risiko bawaan yang rendah akan salah saji material, dengan keadaan seperti ini tentu tidak dilakukannya pengendalian yang rumit sehingga menimbulkan *control risk* yang tinggi. Begitupun dengan posisi *control risk* rendah namun *inherent risk* yang tinggi,

artinya bisnis klien merupakan bisnis dengan risiko bawaan yang tinggi namun diikuti dengan pengendalian yang baik sehingga *control risk* menjadi rendah.

Kondisi kelima apabila *control risk* rendah dan *inherent risk* nya medium atau sebaliknya, maka jumlah sampel yang harus didapatkan auditor sebanyak 17 sampel. Hal ini dikarenakan pengendalian yang dilakukan oleh klien dapat dikatakan memadai, sehingga kesalahan pencatatan atau penyajian suatu transaksi akan rendah dan auditor hanya perlu mengumpulkan sampel sebanyak 17 untuk mewakili seluruh populasi yang ada.

Kondisi terakhir, apabila *control risk* dan *inherent risk* rendah, jumlah sampel yang harus dikumpulkan auditor cukup sejumlah 7 sampel. Artinya, bisnis klien tidak berisiko akan adanya salah saji material, dan pengenalian yang dilakukan oleh klien telah memadai. Sehingga sampel yang perlu didapatkan auditor cukup sejumlah 7 untuk mewakili seluruh populasi yang ada.

Penentuan jumlah sampel level kedua digunakan apabila populasi data klien yang di audit termasuk dalam golongan populasi medium (*medium populations*) yaitu populasi sebanyak antara 52 sampai 250 *items* per tahun.

Penentuan jumlah sampel level ketiga digunakan digunakan apabila populasi data klien yang di audit termasuk dalam golongan

populasi kecil (*small populations*) yaitu populasi sebanyak antara 12 sampai *items* per tahun.

Penentuan jumlah sampel level keempat digunakan apabila populasi data klien yang di audit termasuk dalam golongan populasi sangat kecil (*very small populations*) yaitu populasi sebanyak sampai dengan 12 *items* per tahun.

8) *Staffing on Assignment*

Langkah selanjutnya dalam desain perencanaan audit KAP yaitu *staffing*, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul penentuan *staffing* dilakukan berdasarkan pengelompokan staf saat awal penugasan. Setiap bulan auditor diberikan daftar *staffing* per tim. *Staffing* ditentukan senior manajer. Senior manajer melakukan alokasi staf berdasarkan pengalaman atau *background* audit tahun sebelumnya, dan menilai kinerja staf tersebut pada pekerjaan yang telah dikerjakan.

Pengalokasian staf bertujuan untuk mencapai tujuan audit secara efisien dan hemat biaya. Prosedur ini berisikan rincian level dan *grade* auditor yang akan ditugaskan mulai dari junior, senior, manajer, dan partner. Berikut ini adalah isian format yang harus dipehuni dalam setiap *staffing* dalam perencanaan audit.

Gambar 4.8
Staffing and Time Cost

Staffing and Time Costs			<i>Initials</i>	<i>Date</i>
Objective: To achieve the audit objectives efficiently and cost-effectively.				
Detail the levels and grades of staff required (including specialists):				
Grade	Name	Week Commencing	Number of days required	
Book the relevant staff			<i>Initials</i>	<i>Date</i>
Prepare budgets and time analysis forms (if required)				
Agree dates for the following reviews: (refer to client's year-end timetable)				
Manager (preferably on site)				
Partner				
Second Partner/Audit Report Committee				
Plan a date for discussion on manner in which the audit has been carried out and appraisal of students.				

Sumber: KAP XYZ

Gambar 4.8 menggambarkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam satu tim audit yang ditugaskan, tanggal manajer memeriksa pekerjaan audit yang dilakukan oleh staff audit, tanda tangan manajer saat proses *reporting*, tanda tangan partner yang bertugas untuk menandakan bahwa partner setuju dan tidak ada kesalahan lain dalam hal angka yang disajikan maupun informasi umum yang ditanyatakan dalam laporan keuangan *audited*, dan tanda-tangan persetujuan oleh *Quality Control* (QC) bahwa semua hal yang dinyatakan dilaporan keuangan telah sesuai dengan standar

yang berlaku. Tabel ini disiapkan pada saat perencanaan namun akan dilengkapi dan ditandatangani setelah pelaksanaan audit selesai.

Tujuan program perencanaan audit ini adalah untuk memastikan semua staf yang terlibat dalam audit mengetahui keseluruhan pertimbangan perencanaan dan tanggung jawab spesifik mereka. Hal ini harus dicapai dengan memberikan pengarahan sepenuhnya kepada semua staf yang terlibat dalam penugasan audit tersebut melalui *audit strategy memorandum* dan *audit planning memorandum*.

9) *Overall Audit Approach By Caption*

Langkah kesembilan yaitu pendekatan audit per area atau persiklus, langkah terakhir ini menentukan area risiko yang signifikan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, penilaian awal risiko bawaan dan risiko pengendalian per siklus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul langkah ini bertujuan untuk menentukan risiko yang kemungkinan terjadi pada setiap siklus bisnis yang akan terjadi.

Gambar 4.9
Overall Audit Approach

<i>Cycle code</i>	<i>Cycle name</i>	<i>Initial plan</i>
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>documentation of the system and control</i> <i>Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment:	
	-Inherent	Low/Medium/High
	-Control	Low/Medium/High
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

Sumber: KAP XYZ

Pendekatan audit per area didokumentasikan berdasarkan siklus transaksi. Siklus transaksi yang didokumentasikan merupakan transaksi signifikan yang terjadi pada klien yang diaudit. Gambar 4.9 menggambarkan bagaimana pendokumentasian pendekatan area setiap siklus, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu area risiko yang signifikan terhadap siklus tersebut dan perencanaan awal yang dilakukan dalam menanggapi risiko yang signifikan, dan penentuan risiko awal atas *inherent risk* dan *control risk*, serta asersi tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu siklus transaksi tersebut.

10) Assignment Timetable and Responsibility

**Gambar 4. 10
Assignment Timetable and Responsibility**

	Dates	Practical Responsibility (Partner, Manager, Senior)
<i>Interim team briefing</i>		
<i>Interim audit</i>		
<i>Interim management letter</i>		
<i>Debtors circularisation</i>		
<i>Creditors circularisation</i>		
<i>Stocktake attendance</i>		
<i>Bank, lender and other confirmations</i>		
<i>Legal letter</i>		
<i>Full period management accounts</i>		
<i>Final audit plan</i>		
<i>Final team briefing</i>		
<i>Final audit fieldwork</i>		
<i>Manager review</i>		
<i>Partner review</i>		
<i>Final management letter</i>		
<i>Second partner review</i>		
<i>Approval meeting</i>		
<i>Audit report date</i>		

Sumber: KAP XYZ

Time table digunakan sebagai jadwal dalam satu masa audit, mulai dari *team briefing* hingga *audit report date*. Gambar 4.10 di atas menggambarkan format *time table* yang harus dilengkapi manajer dalam menyusun perencanaan audit laporan keuangan.

Format tersebut dilengkapi dengan tanggal masing-masing tahap diproses hingga selesai dan tanda-tangan pihak yang bertanggung jawab atas tahapan tersebut. *Time table* berfungsi sebagai acuan dan target atas suatu perikatan audit.

c. E-3 Assessment of Fraud Risk

Penilaian atas risiko kecurangan didokumentasikan untuk penilaian awal dari salah saji material atas kecurangan berdasarkan skeptisme profesional auditor yang sesuai sebagai bagian dari proses perencanaan.

- 1) *Assessment of fraud risk by management and Those Charged With Governance*

Gambar 4.11
Preliminary Assessment of Fraud Risk

Enquiries made of:	Management 1 – President Director Management 2 – Accounting & Tax Division Head
Assessment of fraud risk inherent in:	Revenue recognition
Business sector	
Geographical markets	None
Other factors	None

Sumber: KAP XYZ

Berdasarkan Gambar 4.11 di atas, untuk menilai risiko kecurangan manajemen, terlebih dahulu mengonfirmasi manajemen yang bertanggung jawab dalam perikatan, yaitu diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Akuntansi atau Direktur Keuangan. Selanjutnya, penilaian atas risiko bawaan dinilai dari sektor bisnis entitas, pangsa pasar berdasarkan letak geografis, dan faktor lainnya. Risiko bisnis entitas menilai dari sisi pengakuan pendapatan, pendapatan dapat dikatakan menjadi akun dengan risiko kecurangan yang paling tinggi, karena pada akun ini sangat memungkinkan

manajemen untuk meningkatkan laba, ekuitas, dan akan berpengaruh pada *balance sheet* perusahaan.

Selanjutnya auditor menilai risiko kecurangan yang timbul dari keterbatasan pengendalian internal. Pada bagian ini, dokumentasi yang harus didapatkan yaitu mengenai pernyataan manajemen dan TCWG atas tata kelola perusahaannya, selanjutnya auditor menilai risiko kecurangan atas tata kelola tersebut pada posisi rendah, menengah, atau tinggi beserta alasannya.

Bagian selanjutnya auditor menjelaskan teknik manajemen untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan kontrol yang relevan atas operasional perusahaan. Bagian ini diisi dengan metode pengendalian apa yang diadopsi perusahaan untuk menilai dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Selain itu, dijelaskan juga peran internal auditor dalam mengawasi sistem pengendalian internal untuk memberikan kepastian yang memadai bahwa kegiatan operasional telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur operasi standar yang ditetapkan.

Gambar 4.12 dibawah ini merupakan format dalam menyajikan penilaian atas risiko kecurangan dan pengendalian yang dilakukan guna mengurangi risiko tersebut.

Gambar 4.12
Assessment of Fraud Risk

	Description	Potential significance	Likelihood of occurrence
Revenue recognition	Please refer to WP ref. E/1 – Audit Planning Memorandum	Significant	Less likely
	Description of instances	Description of responses	
Instances of fraud identified during the period	None identified		
Instances of fraud suspected or remaining under investigation during the period	None identified		
	Initials	Date	
Review entity's risk register(s), where prepared and assess completeness	N/A		

Sumber: KAP XYZ

Berdasarkan Gambar 4.12 di atas, penilaian atas risiko kecurangan dinilai berdasarkan pengakuan pendapatan. Selanjutnya, penilaian risiko signifikan lebih lanjut dibahas pada indeks E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*.

2) *Assessment of Risk Environment*

Bagian ini menyajikan identifikasi risiko yang ditemukan untuk diterapkan dalam menilai risiko pengendalian, risiko yang diidentifikasi antara lain risiko yang berlaku untuk laporan keuangan, faktor risiko yang mungkin terjadi pada kondisi penyalahgunaan aset, dan faktor risiko yang mungkin terjadi pada kondisi selain pada laporan keuangan dan penyalahgunaan aset atau *general risk factors*.

Penilaian risiko kecurangan yang dapat diterapkan dalam pelaporan keuangan antara lain karakteristik manajemen, karakteristik sektor bisnis, dan karakteristik entitas bisnis. Penilaian kecurangan risiko yang mungkin terjadi pada kondisi penyalahgunaan aset dinilai pada aset-aset yang mungkin dapat digunakan sebagai objek penyalahgunaan dan dinilai pada tahap awal dan final. Penilaian faktor risiko yang mungkin terjadi pada kondisi selain pada laporan keuangan dan penyalahgunaan aset atau *general risk factors* berdasarkan *adjustment* yang bersifat secara umum mengenai laporan keuangan. Format yang harus dipenuhi dalam penilaian pada masing-masing risiko kecurangan terdapat pada Lampiran 5: *Form E-3 Assessment of Fraud Risk.*

Selanjutnya, ketiga area yang telah diidentifikasi, didokumentasikan untuk menentukan pendekatan audit yang tepat untuk memitigasi risiko kecurangan yang terjadi dengan cara merancang prosedur audit yang tepat dan rinci selama pelaksanaan audit. Apabila kecurangan dapat diidentifikasi, pertimbangan implikasinya untuk faktor-faktor lain yang menjadi komponen penilaian risiko kecurangan secara keseluruhan, dilakukan evaluasi ulang jika dianggap perlu, hal ini mengakibatkan perubahan rencana audit secara terperinci. Auditor juga harus memastikan transaksi sepanjang periode harus diaudit, khususnya memperpanjang durasi

sampel hingga akhir periode di mana pengujian transaksi pada saat interim telah dilakukan.

Dalam menilai risiko kecurangan yang merugikan, terdapat form untuk menilai risiko tersebut dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pada tingkat asersi dan pendekatan pada tingkat laporan keuangan yang sehubungan dengan pelaporan keuangan yang telah teridentifikasi kecurangan. Pada Lampiran 5: *Form E-3 Assessment of Fraud Risk* menyajikan dua pendekatan tersebut untuk auditor lengkapi apabila klien teridentifikasi risiko kecurangan, atau dapat diisi dengan N/A apabila tidak teridentifikasi kecurangan.

3) *Conclusion at the initial planning stage*

Kesimpulan atas perencanaan awal atas penilaian risiko kecurangan dilengkapi dengan pernyataan ada atau tidaknya risiko kecurangan tersebut. Selain itu, juga dijelaskan pada siklus mana risiko tersebut terjadi. Selanjutnya tahap perencanaan awal atas penilaian risiko kecurangan diperiksa dan ditanda-tangani oleh partner *in charge*.

4) *Confirmation of risk environment at completion stage*

Sebagai bagian dari proses peninjauan dan penyelesaian, auditor wajib mempertimbangkan apakah penilaian awal terhadap lingkungan risiko benar dan berdasarkan pada pekerjaan verifikasi yang dilakukan, apakah faktor yang tidak diperkirakan muncul selama audit dan apakah tanggapan semua risiko yang teridentifikasi

cukup untuk memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji material atas informasi keuangan atau penyalahgunaan aset.

Pada bagian ini dijelaskan faktor tambahan yang telah diidentifikasi selama audit dan prosedur yang dipilih, termasuk pernyataan manajemen, yang memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji material informasi keuangan atau penyalahgunaan aset.

Pada bagian ini juga auditor memberikan alasan bahwa terdapat faktor yang diidentifikasi pada tahap perencanaan tetapi tidak dilaksanakan pada tahap audit.

5) *Completion and clearance*

Setelah penilaian risiko kecurangan dilengkapi, pada bagian ini, apabila terdapat risiko kecurangan auditor harus membuat *management letters*. *Management letters* berisikan poin-poin temuan kecurangan yang ditemukan auditor di dalam pengendalian internal klien. Selain itu, sertakan saran atas temuan tersebut.

6) *Conclusion at completion stage*

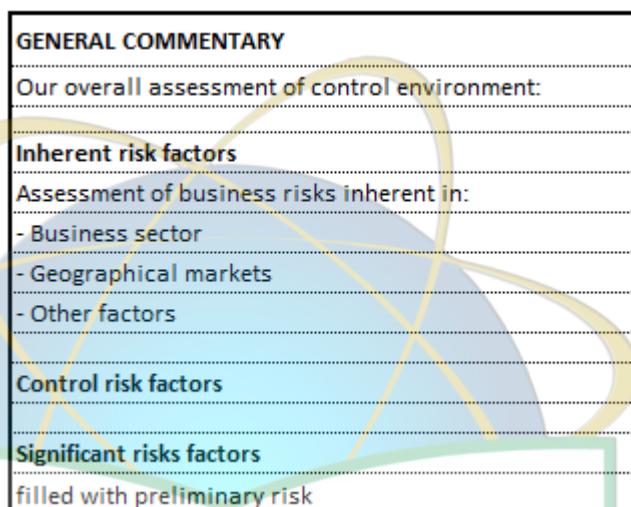
Pada bagian ini auditor membuat kesimpulan atas penilaian risiko kecurangan, dengan menyatakan bahwa seluruh tujuan penilaian risiko kecurangan yang dinilainya telah terpenuhi, dan menyatakan juga bahwa ada atau tidaknya kesalahan penyajian material informasi keuangan atau penyalahgunaan aset yang dikarenakan adanya tindak kecurangan. Bagian ini buat dan ditanda-

tangani oleh Manajer *in charge* dan diperiksa serta disetujui oleh partner *in charge*.

d. E-4 Audit Risk Assessment and Commentary

1) Details of significant audit risks

**Gambar 4.13
Significant Risk**



Sumber: KAP XYZ

Gambar 4.13 di atas menjelaskan mengenai format risiko signifikan yang harus diungkapkan dalam pendokumentasian perencanaan audit. Pertama-tama auditor menilai secara keseluruhan atas lingkungan pengendaliannya, hal ini diisi dengan pernyataan auditor bahwa manajemen telah menyadari pentingnya pengendalian internal terhadap perusahaannya, gaya manajemen yang memengaruhi pengendalian internal, manajemen memiliki pengalaman dalam bisnis industri yang dijalani, dan struktur organisasi manajemen telah disusun dengan baik dan oleh orang yang berkompeten.

Selanjutnya menjelaskan tentang faktor-faktor risiko bawaan bisnis manajemen, adapun faktor-faktor yang harus dinilai menjelaskan sektor bisnis klien, dan dari faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi risiko bawaan klien. Setelah menjelaskan *inherent risk*, risiko yang dinilai lainnya yaitu *control risk factors*, disini auditor menilai apakah pengendalian yang telah dilakukan klien cukup untuk memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan yang disusun oleh manajemen.

Setelah menyatakan risiko bawaan dan risiko pengendalian, yang dinilai selanjutnya yaitu risiko signifikan. Pada tahap perencanaan audit, risiko signifikan dinyatakan berdasarkan penilaian risiko awal pada keseluruhan laporan keuangan. Tahap selanjutnya atas penilaian risiko signifikan akan dijelaskan pada

Gambar 4.14.



Gambar 4. 14
Detailed Significant Risk

RISK ASSESSMENT BY FINANCIAL STATEMENT CAPTION AND ASSERTION		Preliminary (H,M,L,N/A)		Final (H,M,L,N/A)	
Financial statement caption and risk assessment section of the assessed financial statements		Inherent	Control	Inherent	Control
<i>Concerning classes of transactions and events for the period:</i>					
Occurrence	'O'				
Completeness	'C'				
Accuracy	'A'				
Cutoff	'F'				
Classification	'L'				
<i>Concerning account balances at the period end:</i>					
Existence	'E'				
Rights and obligations	'R'				
Completeness	'C'				
Valuation and allocation	'P'				
<i>Concerning presentation and disclosure:</i>					
Occurrence and rights and obligations	'Q'				
Completeness	'C'				
Accuracy and valuation	'S'				
Classification and understandability	'T'				
<i>Commentary</i> Significant risks identified as applying to this file section at the planning stage are as follows:					
Significant Risks	Inherent or control risk?	Mitigating Controls	Control reference		

Sumber: KAP XYZ

Detail atas risiko signifikan yang disajikan dalam Gambar 4.14

menjelaskan mengenai penilaian risiko signifikan yang terdapat dalam laporan keuangan. Setiap asersi manajemen dinilai berdasarkan *inherent risk* dan *control risk*. Kolom tersebut diisi dengan identifikasi risiko bawaan dan pengendalian terhadap masing-masing asersi, dinyatakan dalam *high/medium/low*.

Penilaian risiko tersebut diserahkan kepada manajer yang bertugas, dan dinilai berdasarkan *judgment* manajer.

e. **E-5 Planning and Performance Materiality**

Bagian ini merupakan penjelasan subbab *Materiality Indicators* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*

Gambar 4. 15
Basis for Computation of Materiality

Basis for Computation of Planning Materiality	
Description	Measurement
	Percentage
Income from continuing operations (before tax)	5.0%
Normalized income from continuing operations (before tax)	5.0%
Total revenues	2.0%
Total assets	2.0%
Net assets or total equity	5.0%

Basis for Computation of Tolerable Error	
Risk Assessment	Percentage
High	15%
Moderate	30%
Low	50%

Basis for Computation of Nominal Amount	
Description	Measurement
	Percentage
Pre-tax materiality amount	5% to 10%

Explanations for levels of planning materiality indicator selected

Sumber: KAP XYZ

Gambar 4.15 di atas menjelaskan mengenai cara menentukan materialitas. Materialitas yang ditentukan dibagi menjadi tiga, yaitu *planning materiality*, *performance materiality* atau *tolerable error*, dan *nominal account*. Terdapat lima basis dalam menentukan jumlah *planning materiality* yaitu *income from continuing operations (before tax)*, *normalized income from continuing operations (before tax)*, total pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Apabila menggunakan *income before tax*, *planning materiality* ditentukan sebesar 5% dari *income before tax*. Apabila menggunakan basis *total revenue* dan *total asset*, persentase yang digunakan yaitu sebesar 2%. Apabila menggunakan basis *net asset* atau *total equity*, persentase yang digunakan yaitu sebesar 5%. Penentuan basis yang digunakan dalam menentukan besarnya *planning materiality* yaitu berdasarkan *judgement* manajer yang bertugas.

Basis dalam menghitung *tolerable error* (TE) yaitu berdasarkan penilaian risiko atas *inherent risk* dan *control risk*, apabila analisis *risk assessment* rendah maka penentuan TE sebesar 50% dari *planning materiality*. Apabila analisis *risk assessment* medium, maka penentuan TE sebesar 30% dari *planning materiality*. Apabila analisis *risk assessment* tinggi, maka penentuan TE sebesar 15% dari *planning materiality*. Hal ini merupakan ketentuan dari afiliasi internasional KAP XYZ.

Basis dalam menghitung nominal account yaitu antara 5-10% dari *planning materiality*. Penentuan persentase yang pasti merupakan *judgement* dari manajer yang bertugas.

Pada kolom terakhir berisikan penjelasan atas keputusan penggunaan masing-masing basis perhitungan pada masing-masing jenis materialitas.

Gambar 4.16
Summary of Materiality Factors Selected

File section	Factor		Performance materiality value
	Base Amount	%	

Explanations for levels of performance materiality values selected

Determination of Nominal Amount (PAJE and PRJE listing scope) – 10%

Amount

Currency IDR

xxx

xxx

Sumber: KAP XYZ

Gambar 4.16 menjelaskan mengenai kesimpulan atas *performance materiality* yang dipilih, dan disajikan bersama dengan jumlah nominal berdasarkan perhitungan yang telah dijelaskan pada Gambar 4.15.

2. Membandingkan Desain Perencanaan Audit dengan Operasional

Operasional perencanaan audit laporan keuangan akan dibahas pada data satu klien yaitu PT ABC. PT ABC merupakan salah satu Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang asuransi. Perencanaan audit PT ABC akan digunakan sebagai data perbandingan perencanaan audit laporan keuangan dengan desain perencanaan audit KAP.

Metode pengumpulan informasi atas data perencanaan audit KAP XYZ adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atas perencanaan audit yang dilakukan selama peneliti melaksanakan observasi. Wawancara dilakukan dengan Bapak Syamsul selaku Manajer *in charge* pada PT ABC. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsul, didapatkan informasi bahwa perencanaan audit yang dilakukan di KAP XYZ mengacu pada format *Audit Strategy Memorandum* dan *Audit Planning Memorandum* KAP XYZ dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2013.

Dalam subbab ini akan menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu “Apakah perencanaan audit dan operasional perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XYZ sesuai dengan desain perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ?”. Selama melakukan observasi dari Januari sampai dengan April 2018, peneliti melakukan pengamatan dan pekerjaan lapangan, sehingga pada subbab ini peneliti menganalisis kesesuaian pendokumentasian dan pelaksanaan perencanaan audit KAP XYZ dengan desainnya yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya.

Data yang akan diuji kesesuaiannya yaitu perencanaan audit laporan keuangan PT ABC. PT ABC dipilih sebagai data penelitian karena peneliti terlibat langsung dalam proses audit PT ABC.

Tabel 4.1 di bawah ini menyajikan perbandingan perencanaan audit antara dokumentasi perencanaan audit PT ABC dengan desain perencanaan audit KAP XYZ.

Tabel 4.1
Perbandingan Perencanaan Audit antara Operasional PT ABC dan KAP

Dokumentasi Perencanaan Audit pada PT ABC	Perencanaan Audit pada KAP XYZ
<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik Perikatan <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup penugasan b. Kegiatan usaha entitas 2. Tujuan Pelaporan, saat pelaporan, dan sifat komunikasi <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan laporan keuangan entitas b. <i>Time table</i> 3. Arahan audit <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi risiko b. Pendekatan audit 4. Penentuan materialitas 5. Sampling 6. Staffing 7. Asersi manajemen 8. Pendekatan audit per area 	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-1 <i>Audit Strategy Memorandum</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Entity's Business</i> b. <i>Reporting Objectives, Timing of the Audit and Communications Required</i> c. <i>Direction of the audit</i> 2. E-2 <i>Audit Planning Memorandum</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Intended Scope of Audit Work</i> b. <i>Commercial and Financial Environment</i> c. <i>Overall approach to Components of Financial Statements</i> d. <i>Analytical Review</i> e. <i>Materiality Indicators</i> f. <i>Overall Audit Approach Planned</i> g. <i>Sampling and Selection Approaches</i> h. <i>Staffing on Assignment</i> i. <i>Overall Audit Approach by Caption</i> j. <i>Assignment Timetable And Responsibility</i> 3. E-3 <i>Assessment of Fraud Risk</i> 4. E-4 <i>Audit Risk Assessment and Commentary</i> 5. E-5 <i>Planning and Performance Materiality</i>

Sumber: Olahan peneliti

Perencanaan audit laporan keuangan PT ABC dirancang oleh manajer *in charge*. Format yang digunakan dalam membuat perencanaan audit laporan keuangan PT ABC berdasarkan indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* digabungkan dengan indeks lainnya yang disisipkan dalam subbab perencanaan audit laporan keuangan PT ABC. Sehingga, pada analisis awal berdasarkan format penyusunan perencanaan audit laporan keuangan PT ABC telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP XYZ.

Sebelum membahas mengenai perencanaan audit PT ABC. Proses wawancara dimulai dengan membahas proses penerimaan perikatan antara KAP XYZ dengan PT ABC. Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul, proses penerimaan perikatan PT ABC dilakukan dengan cara tender audit oleh BUMN yang dilaksanakan secara terbuka (*open tender*). Pertama-tama KAP XYZ mengajukan diri dan bersaing dengan KAP lainnya di Indonesia untuk melakukan audit laporan keuangan PT ABC. Setelah *open tender* selesai dan proses pertimbangan yang dilakukan oleh pihak PT ABC telah dilewati, dipilihlah KAP XYZ sebagai KAP untuk melakukan audit. Proses tersebut terjadi pada tahun pertama audit. Namun, pada tahun 2017 merupakan tahun kedua perikatan dengan PT ABC, sehingga KAP XYZ ditunjuk langsung untuk melakukan audit laporan keuangan dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh KAP dan dilanjutkan dengan *engagement letters*. Format *engagement letters* dapat dilihat pada Lampiran 9: Format *Engagement Letters blank*.

Selanjutnya SPK ditanda-tangani bermaterai oleh *Managing Partner* dan pihak PT ABC sebagai tanda dimulainya proses audit pertama yaitu perencanaan audit. SPK bersifat rahasia, sehingga tidak dapat dilampirkan dalam penelitian ini.

Setelah dinyatakan menerima perikatan, selanjutnya memasuki tahap pendokumentasian perencanaan audit laporan keuangan. Pada langkah pertama, dalam menyusun perencanaan audit PT ABC, auditor menilai karakteristik perikatan sesuai dengan SPK (Surat Perintah Kerja). SPK berisikan lingkup audit laporan keuangan tahun berjalan, *fee audit* dan term pembayaran, hasil audit yang diminta, jangka waktu pelaksanaan, pusat pertanggung jawaban klien, sanksi dan denda, serta *warranty*. Mengacu pada SPK tersebut, Bapak Syamsul menyusun karakteristik perikatan dan lingkup kerja dengan PT ABC. Selanjutnya, penjelasan masing-masing tahapan perencanaan audit laporan keuangan PT ABC akan dijelaskan berikut ini.

a. Karakteristik Perikatan

Karakteristik perikatan dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup audit dan kegiatan bisnis entitas yang akan dibahas berikut ini:

1) Ruang Lingkup Audit

Pelaksanaan penyusunan ruang lingkup audit dibuat berdasarkan SPK dan *engagement letters* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu KAP XYZ dan PT ABC.

Dokumentasi ruang lingkup audit menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh tim audit yang bertugas pada klien PT ABC memahami jenis perikatan yang dijalani, jadwal *realase* laporan keuangan *audited*, dan sejauh mana tanggung jawab auditor terhadap laporan keuangan atau ruang lingkup kerja auditor. Adapun karakteristik ruang lingkup audit PT ABC yaitu terdiri dari audit umum dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Selain itu ruang lingkup audit juga menjelaskan mengenai pemeriksaan laporan kinerja. *Review* laporan kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam hal material, kesesuaian laporan kinerja dengan pedoman penilaian untuk tingkat kesehatan PT ABC sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai bidang usaha perasuransian dan jasa penjamin. Penilaian laporan kinerja dibutuhkan oleh PT ABC mengingat bahwa PT ABC merupakan BUMN yang bergerak pada bidang asuransi, yang dimana menampung dana masyarakat. Sehingga, kinerja PT ABC sangat menjadi perhatian masyarakat.

Selanjutnya, ruang lingkup audit juga menjelaskan mengenai tujuan audit laporan keuangan secara umum, penyampaian *management letters* untuk mengomunikasian penilaian awal atas pengendalian internal, pernyataan jenis laporan yang akan dihasilkan berdasarkan dengan dasar penyusunannya, dan

menyatakan laporan keuangan yang akan dihasilkan dari perikatan ini.

Perikatan yang dijalankan dengan PT ABC tidak hanya audit umum atas laporan keuangan konsolidasian, namun juga audit kepatuhan atas perundang-undangan, audit kinerja atas perusahaan induk dan perusahaan anak PT ABC.

Ruang lingkup audit didokumentasikan berdasarkan desain perencanaan audit KAP XYZ pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* dengan format dan penjelasan lebih rinci pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* pada tahap *The Entity's Business* dan *Intended Scope of Audit Work*. Perencanaan audit laporan keuangan PT ABC telah dijelaskan sesuai kondisi PT ABC.

2) Kegiatan Bisnis Entitas

Pelaksanaan penyusunan kegiatan bisnis entitas dibuat berdasarkan pengalaman audit tahun lalu, *working paper* tahun lalu, dan SPK dan *engagement letters* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu KAP XYZ dan PT ABC.

Kegiatan bisnis PT ABC ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua (THT), dana pensiun, Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan jaminan Kematian (JKM) khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada bagian ini, dijelaskan satu persatu mengenai program yang terdapat dalam PT ABC, hal tersebut dimaksudkan agar tim audit mengetahui dan

memahami produk dan jenis usaha yang terdapat pada PT ABC.

Selanjutnya informasi PT ABC akan sangat diperlukan dalam pertimbangan profesional dalam pengambilan keputusan diberbagai aspek dalam pelaksanaan audit.

Selain pemahaman atas produk, auditor juga harus memahami faktor eksternal yang akan memengaruhi bisnis PT ABC dan didokumentasikan pada tahap ini. Faktor eksternal yang sangat berpengaruh yaitu faktor politik dan regulasi, ekonomi, bisnis, hukum, teknologi, dan keamanan.

Selanjutnya, disebutkan juga bahwa PT ABC memiliki perusahaan anak, dalam perikatan ini KAP XYZ melakukan audit terhadap ketiga entitas tersebut, dan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian auditan. Hal tersebut akan berpengaruh pada tahap *staffing* yang akan didokumentasikan pada tahap yang berbeda.

Ruang lingkup audit didokumentasikan berdasarkan desain perencanaan audit KAP XYZ pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* bagian *Scope of Audit Work*. Hal minimum yang harus dinyatakan pada tahap ini sebagaimana pada Lampiran 8: Perencanaan audit laporan keuangan PT ABC.

Tahap kegiatan bisnis entitas didokumentasikan dengan tujuan agar tim audit memahami bisnis industri kliennya, hal ini penting agar auditor mengetahui risiko bisnis klien dan risiko

bawaan, yang akan memengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan kearifan profesionalnya.

Berdasarkan analisis di atas, apabila dilihat dari tahap awal desain perencanaan audit KAP telah sesuai yaitu menjelaskan *entity's business* dan *scope of audit work*. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit atas penilaian karakteristik perikatan telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP.

b. Tujuan Pelaporan, Saat Pelaporan, dan Sifat Komunikasi

Langkah kedua yaitu tujuan pelaporan, saat pelaporan, dan sifat komunikasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Tujuan Pelaporan

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa tujuan pelaporan perikatan ini tidak hanya memberikan keyakinan atas laporan keuangan, namun juga pada laporan kepatuhan dan laporan kinerja. Tujuan pelaporan pada tahap ini lebih dispesifikasi lagi pada tujuan pelaporan setiap produk atau program yang terdapat pada PT ABC.

Peraturan perundang-undangan disajikan dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam penyelesaian audit laporan keuangan. Mengingat bahwa PT ABC merupakan BUMN sehingga tidak sedikit peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Pendokumentasian peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi, dimaksudkan agar seluruh auditor dalam tim audit

memahami peraturan tersebut. Sehingga pada proses pelaksanaan audit, auditor tidak perlu lagi mencari peraturan yang berhubungan dengan PT ABC, kerena semua perundang-undangan telah tercantum dalam perencanaan audit.

2) Saat Pelaporan

Time table disusun berdasarkan kearifan profesional manajer *in charge* yang ditentukan dengan mengacu pada tanggal awal perikatan dan tanggal pelaporan yang terdapat pada SPK dan *engagement letters* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu KAP XYZ dan PT ABC. Tidak ada ketentuan mutlak oleh KAP XYZ mengenai penyusunan *time table*. Sehingga, jangka waktu pekerjaan yang ditentukan berdasarkan ketentuan manajer dengan kesepakatan tim audit PT ABC.

Saat pelaporan menjelaskan mengenai waktu pelaksanaan audit berlangsung yang dituangkan dalam *time table* sebagaimana format KAP XYZ yang disajikan pada Gambar 4.10, yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. *Time table* menyajikan waktu dan penanggung jawab selama penugasan mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan, hingga proses pelaporan audit. Format pendokumentasian *time table* menggunakan format KAP XYZ, sehingga tidak terjadi perbedaan apapun. *Time table* didokumentasikan bertujuan agar tim audit yang bertugas

mengetahui *deadline* pekerjaan pertahapan, sehingga tidak terjadi penerbitan laporan keuangan audit yang tergesa-gesa.

Time table PT ABC menunjukan bahwa perikatan dimulai dengan *kick of meeting* dan selesai dengan mengirimkan final *management letters* kepada PT ABC. Masa pelaksanaan mulai pada tanggal 6 Oktober 2017 dan berakhir pada 31 Januari 2018.

Pada tahap ini, pendokumentasian tujuan pelaporan, saat pelaporan, dan sifat komunikasi telah sesuai dengan desain KAP XYZ pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* bagian *Reporting Objectives, Timing of the Audit and Communications Required*. Berdasarkan kesesuaian tersebut dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit atas penilaian karakteristik perikatan telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP.

c. Arahan Audit

Langkah ketiga yaitu menentukan arahan audit. Arahan audit dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Identifikasi Risiko

Pengidentifikasi risiko awal dibuat berdasarkan pemahaman audit tahun lalu, mendapatkan SOP terbaru, melakukan *inquiry* dengan manajemen mengenai implementasi SOP pada operasional perusahaan, dan melakukan prosedur *walkthrough* untuk menguji dokumen. Pelaksanaan identifikasi risiko tersebut dilakukan untuk mendapatkan pemahaman atas

pengendalian internal yang dilakukan oleh klien, apakah telah memadai ataukah belum. Hasil identifikasi risiko tersebut didokumentasikan pada bagian ini, dan digunakan sebagai pertimbangan penilaian risiko pengendalian PT ABC.

Selain itu, pelaksanaan identifikasi risiko dengan melakukan prosedur di atas, didokumentasikan oleh auditor dengan membagi dua hasil dokumentasi yaitu identifikasi risiko atas bisnis dan lingkungan industri klien dan identifikasi risiko atas risiko signifikan yang mungkin terjadi dalam proses bisnis klien.

Risiko bawaan (*inherent risk*) PT ABC dikategorikan *high risk* karena PT ABC merupakan BUMN yang dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, dan program yang dijalankan pun merupakan program pemerintah, selain itu ekonomi politik yang memengaruhi APBN dan APBD juga sangat memengaruhi penerimaan iuran yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah.

Risiko signifikan awal diidentifikasi pada kinerja dan kebijakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan/atau Jaminan Kematian (JKM). Selain itu risiko signifikan diidentifikasi pada status kepemilikan salah satu aset yang akan memengaruhi pengakuan akuntansi secara signifikan. Identifikasi risiko ini sangat penting karena akan memengaruhi penentuan sampel dan keputusan auditor pada tahap perencanaan audit selanjutnya.

2) Pendekatan audit

Pendekatan audit menjelaskan mengenai penilaian atas risiko pengendalian dan keputusan untuk melakukan *test of control* (TOC), TOC juga dilakukan pada peraturan yang berlaku yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup penugasan. Pengendalian internal PT ABC dinilai kondusif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, oleh karena itu perlu dilakukan TOC untuk mendukung *judgement* awal auditor yang selanjutnya didokumentasikan.

Selain menyatakan bahwa dilakukan TOC, ditentukan juga akun-akun signifikan yang membutuhkan pengujian substantif yaitu diuji dengan *analytical review* dan *test of details*. Akun-akun signifikan PT ABC antara lain akun bank, investasi, piutang, utang, dan modal. Konfirmasi dilakukan secara *sampling* kecuali investasi. Prosedur pengecekan fisik dilakukan terhadap surat berharga dan aset tetap.

Selanjutnya, disebutkan juga bagian laporan keuangan yang memiliki risiko signifikan, yaitu pada cadangan teknis yang pembentukannya dihitung oleh aktuaris internal dan eksternal. Cadangan teknis dinilai signifikan karena angka tersebut bukan merupakan hasil dari perhitungan auditor, namun dihitung oleh aktuaris. Menanggapi hal ini, prosedur yang akan dilaksanakan yaitu *inquiry* dengan aktuaris internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk mendatangkan keyakinan yang memadai bagi

auditor atas angka-angka yang disajikan. Tahap ini merupakan tahap identifikasi risiko, baik risiko bawaan maupun risiko pengendalian, dan penentuan area yang berisiko signifikan yang berada pada desain perencanaan audit KAP XYZ.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit telah sesuai dengan desainnya. Hal tersebut terbukti dengan desain perencanaan audit KAP XYZ pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* bagian *Direction of The Audit*, dan dijelaskan lebih rinci mengenai identifikasi risiko pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* dan indeks E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*.

d. Penentuan Materialitas

Penentuan materialitas dihitung berdasarkan laporan keuangan interim 30 September, basis perhitungan dan persentase yang digunakan berdasarkan format dan ketentuan KAP XYZ yang disesuaikan dengan kondisi PT ABC.

Basis materialitas yang dipilih untuk PT ABC yaitu berdasarkan pendapatan. Basis ini dipilih karena sebagian besar aset berasal dari dana titipan yaitu akumulasi iuran pensiun PNS, sedangkan beban sebagian besar digunakan untuk pembayaran pensiun namun diganti oleh pemerintah secara proporsional. Penitipan dan pengelolaan ini bersifat *non-profit-oriented*. Hal tersebut menyebabkan pendapatan

akan tetap stabil dan penggunaan total aset atau *earning before tax* sebagai basis perhitungan materialitas tidak tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul, penentuan materialitas KAP terjadi pada tiga tahap, tahap pertama yaitu menentukan materialitas pada audit interim, tahap kedua yaitu menentukan materialitas berdasarkan laporan keuangan *unaudited*, dan ketiga yaitu menentukan materialitas berdasarkan laporan keuangan *audited*. Perhitungan materialitas tahap pertama digunakan untuk menentukan materialitas pada *test of control*. Perhitungan materialitas tahap kedua atau saldo laporan keuangan *year end unaudited* digunakan untuk menentukan materialitas pada *test of details* atau *substantif test*. Perhitungan materialitas tahap ketiga atau saldo laporan keuangan *audited* untuk menentukan materialitas pada batas *adjustment immaterial pass (impass)*.

Perikatan audit PT ABC terjadi untuk mengaudit laporan keuangan interim 30 September dan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2017. *Time table* PT ABC menunjukkan jadwal mulai proses audit jatuh pada tanggal 27 September, sehingga penentuan materialitas awal dalam perencanaan audit PT ABC ditentukan berdasarkan saldo pendapatan 30 September. Jumlah materialitas ini digunakan untuk melakukan *test of control* atas akun-akun signifikan dan didokumentasikan pada *working paper* interim.

Test of control dilakukan untuk menilai pengendalian PT ABC apakah

pengendalian intrnal yang dilakukan telah mencukupi untuk mendatangkan kepercayaan auditor atas laporan keuangan yang disajikan manajemen. Penilaian pengendalian internal juga dievaluasi untuk menentukan tingkat *control risk* PT ABC dan memengaruhi jumlah penentuan *sample* dalam proses *test of control*.

Selanjutnya, apabila laporan keuangan *unaudited* 31 Desember telah diterima, auditor melakukan revisi perhitungan materialitas menggunakan saldo 31 Desember sebagai acuan dalam melakukan *test of details* atau *substantive test*. Jumlah materialitas ini tidak lagi didokumentasikan dalam *audit planning*, namun didokumentasikan pada *working paper* audit laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember.

Sedangkan penentuan materialitas tahap ketiga yaitu berdasarkan saldo laporan keuangan *audited*. Penentuan materialitas ini untuk menentukan apakah jumlah selisih yang terjadi pada tingkat akun melebihi materialitas akhir atau tidak. Apabila tidak mencapai, selisih tersebut dianggap tidak material pada tingkat laporan keuangan. Namun, apabila jumlah keseluruhan selisih melebihi tingkat materialitas, maka auditor memberikan *purpose journal adjustment* (*PAJE*) atas kesalahan material tersebut.

Selain waktu penentuan materialitas, persentase dalam menghitung materialitas juga harus ditentukan. Terdapat tiga tingkatan materialitas yang dihitung yaitu *planning materiality*, *performance*

materiality/ tolerable error, dan *nominal account materiality*. Ketiga jenis materialitas telah sesuai dengan ketentuan materialitas dalam desain KAP pada indeks E-5 *Planning and Performance Materiality*.

Planning materiality ditentukan sebesar 2% dari total pendapatan. Hal ini merupakan ketentuan KAP XYZ yang dapat dilihat pada Gambar 4.15. *Performance materiality* atau *tolerable error* ditentukan sebesar 30% dari total *planning materiality*. Besaran persentase ditentukan atas penilaian risiko klien, penilaian risiko PT ABC yang telah dinilai sebelumnya terletak pada tingkat *moderate*, oleh karena itu persentase yang dipilih sebesar 30%. *Nominal account materiality* sebesar 10% dari total *planning materiality*, tingkat 10% dipilih dari *range* persentase yang terbesar yang mengacu pada basis penentuan perhitungan *nominal account* sebagaimana yang tertera pada Gambar 4.15. Materialitas yang telah ditentukan, nantinya dinyatakan dalam setiap *working paper* (WP), bertujuan untuk mengontrol nominal pada setiap akun yang akan memengaruhi keputusan akan pengujian akun tersebut.

Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pada implementasi perencanaan audit PT ABC telah melakukan perhitungan materialitasnya sesuai dengan desain materialitas KAP XYZ.

e. *Sampling*

Sampling dilakukan sesuai dengan ketentuan KAP yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penentuan *sampling* didasarkan

pada jumlah populasi yang akan di audit. Hasil penentuan jumlah sampel digunakan pada tahap pengujian pengendalian maupun pengujian substantif.

Tahap *sampling* juga menentukan cabang mana yang akan menjadi sampel pengujian, mengingat bahwa PT ABC memiliki beberapa cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Penentuan sampel cabang, ditentukan berdasarkan cabang telah tercakup atas seluruh transaksi yang akan dilakukan pengujian pengendalian, selain itu juga cabang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap saldo-saldo dalam laporan keuangan PT ABC secara keseluruhan. Hasil dari sampel cabang, diberikan kesimpulan bahwa cabang mana saja yang akan didatangi berserta jadwal keberangkatannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa operasional penentuan *sampling* telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP XYZ yang tertera pada indeks E-5 *Planning and Performance Materiality*.

f. *Staffing*

Langkah keenam *staffing*, penentuan *staffing* dilakukan oleh Senior Manajer. Pertimbangan dalam *staffing* ditentukan berdasarkan *grade* pendidikan terakhir, pengalaman audit sebelumnya, kinerja auditor, dan jabatan auditor. Selain menentukan tim audit, *staffing* juga menentukan partner yang bertanggung jawab, manajer yang bertugas, ketua tim (*in charge*), dan staf junior auditor. Penentuan *staffing*

diumumkan setiap bulan, seluruh staf menerima pengumuman pembagian tim audit, nama klien, dan masa audit melalui email.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsul, proses *staffing* telah terlaksana sesuai dengan perencanaan audit KAP, namun apabila dalam proses pelaksanaan audit, tim audit membutuhkan auditor tambahan karena kekurangan anggota, ketua tim atau manajer yang bertugas dapat meminta bantuan staf audit dari tim lain untuk menjadi tenaga pertambahan selama proses audit berlangsung dengan meminta persetujuan oleh manajer atau *in charge* staf audit pertambahan tersebut. Proses ini tidak didokumentasikan, karena malalui proses informal.

Namun secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa format penugasan awal telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP XYZ yaitu pada E-2 *Audit Planning Memorandum* bagian *Staffing on Assignment*.

g. Asersi Manajemen

Langkah ketujuh yaitu menetapkan asersi manajemen, pada perencanaan audit seluruh asersi manajemen didokumentasikan, baik yang signifikan maupun tidak. Asersi manajemen didokumentasikan guna untuk mengetahui tujuan audit yang akan dicapai dalam proses pelaksanaan audit. Proses pelaksanaan *substantive test* dan audit per akun, asersi manajemen didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (*working paper*) sesuai dengan tujuan audit khusus apa yang harus dicapai dalam setiap audit per akun.

Asersi manajemen dalam desain KAP terdapat pada penilaian risiko signifikan per akun atau per siklus transaksi. Sehingga, disajikan bersamaan dengan penilaian risiko signifikan dan pendekatan audit per area. Pada desain KAP tidak terdapat perintah atau tahapan yang harus mencantumkan semua asersi. Namun, berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsul, asersi manajemen ini diungkapkan untuk memastikan semua akun dan siklus telah memenuhi semua asersi pada tingkat transaksi, saldo akun, maupun penyajian dan pengungkapan.

Berdasarkan operasional perencanaan audit atas asersi manajemen, dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit laporan keuangan pada PT ABC tidaklah melanggar atau menyalahi desain KAP karena bertujuan nntuk mendokumentasikan dan memastikan seluruh asersi terpenuhi, oleh karena itu operasional dapat dikatakan telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP XYZ.

h. Pendekatan Audit per Area

Langkah kedelapan yaitu pendekatan audit per area, operasional pendekatan audit per area didokumentasikan berdasarkan format yang telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP. Hal tersebut dapat dilihat pada Lampiran 8: Perencanaan Audit Laporan Keuangan PT ABC. Lampiran tersebut menggambarkan keseluruhan implementasi perencanaan audit termasuk didalamnya pendekatan audit per area pada enam siklus signifikan yang terjadi pada PT ABC. Siklus yang signifikan PT ABC yaitu siklus pendapatan iuran, siklus pembayaran

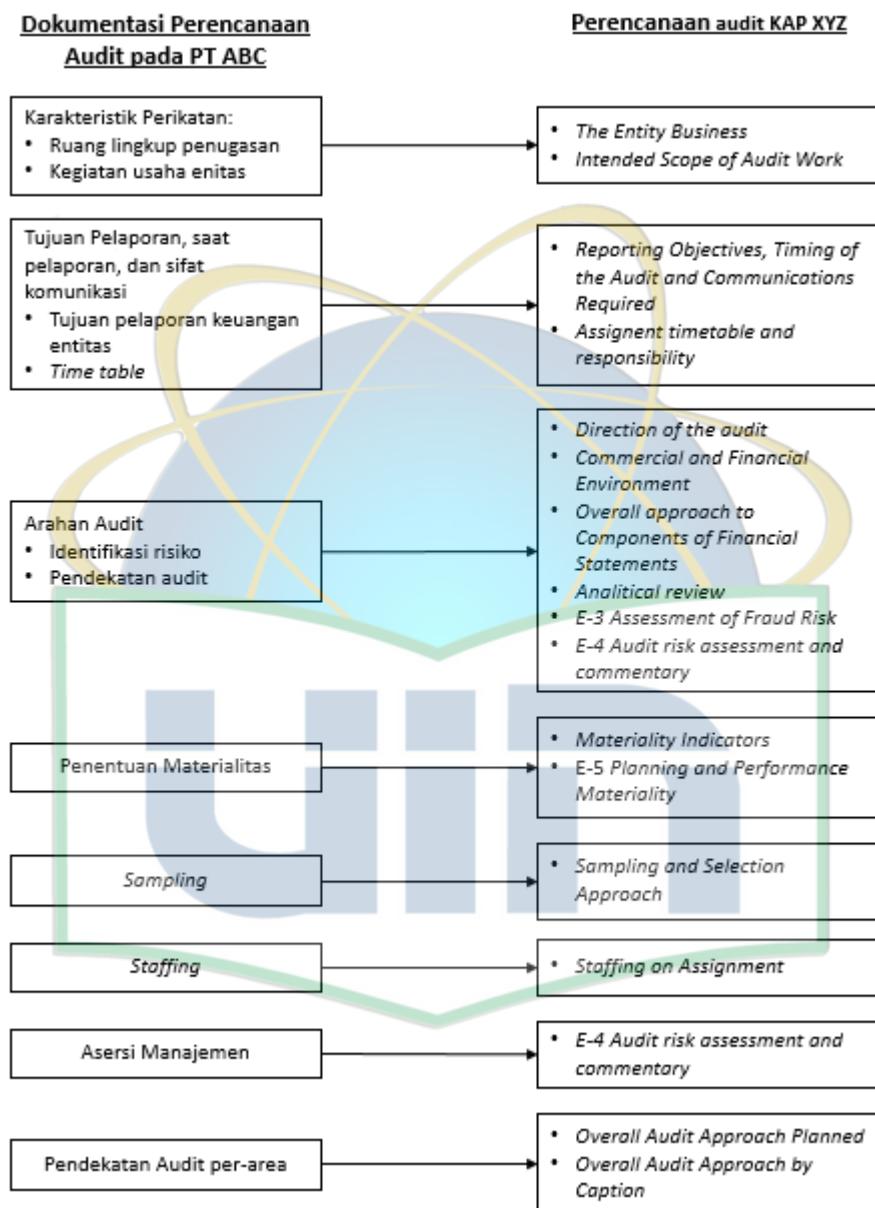
klaim/manfaat, siklus investasi, siklus beban operasional, siklus aset tetap, dan siklus kepegawaian. Masing-masing siklus dinilai risiko bawaan dan risiko pengendaliannya. Siklus pendapatan iuran, siklus pembayaran klaim/manfaat, dan siklus investasi dinilai signifikan karena berhubungan dengan *core bisnis* PT ABC yang bergerak pada bidang asuransi yang menampung dan mengelola dana peserta polis. Siklus beban operasional menguji kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dalam memonitoring pengeluaran yang dilakukan. Siklus aset tetap dianggap signifikan untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan manajemen atas penambahan, pelepasan, dan pengelolaan aset tetap pada tahun berjalan. Sedangkan siklus kepegawaian dinilai signifikan karena berhubungan dengan PSAK 24 mengenai imbalan kerja jangka panjang yang dinilai oleh aktuaris independen.

Berdasarkan dokumen yang ada, dapat disimpulkan bahwa operasional perencanaan audit laporan keuangan telah sesuai dengan desain perencanaan audit KAP yaitu pada tahap *Overall Audit Approach by Caption* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada perencanaan audit laporan keuangan PT ABC, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kegiatan operasional KAP dalam tahap perencanaan audit telah sesuai dengan desain yang dibuat oleh KAP XYZ. Gambar 4.17 berikut ini merangkum pembahasan perbandingan antara dokumentasi perencanaan

audit pada PT ABC dengan perencanaan audit berdasarkan desain KAP XYZ.

Gambar 4. 17
Ringkasan Pembahasan



Sumber: Olahan Peneliti

3. Membandingkan Perencanaan Audit KAP XYZ dengan SPAP

Subbab ini akan menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu “Apakah perencanaan audit atas laporan keuangan pada KAP XYZ telah sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)?”. Setelah mengetahui bagaimana perencanaan audit di KAP XYZ, perencanaan audit tersebut dibandingkan dengan perencanaan audit menurut SPAP. Tabel 4.2 berikut menyajikan perbandingan subbab perencanaan audit KAP XYZ dengan perencanaan audit menurut SPAP.

**Tabel 4.2
Perbandingan Perencanaan Audit antara KAP dan SPAP**

Perencanaan Audit SPAP	Perencanaan Audit KAP XYZ
<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategi audit menyeluruh 2. Menentukan dan menggunakan materialitas 3. Diskusi tim audit 4. Mengidentifikasi risiko bawaan 5. Risiko signifikan 6. Memahami pengendalian internal 7. Mengevaluasi pengendalian internal 8. Mengomunikasikan kelemahan pengendalian internal 9. Menyelesaikan tahap penilaian risiko 	<ol style="list-style-type: none"> 1. E-1 <i>Audit Strategy Memorandum</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>The Entity's Business</i> b. <i>Reporting Objectives, Timing of the Audit and Communications Required</i> c. <i>Direction of the audit</i> 2. E-2 <i>Audit Planning Memorandum</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Intended Scope of Audit Work</i> b. <i>Commercial and Financial Environment</i> c. <i>Overall approach to Components of Financial Statements</i> d. <i>Analytical Review</i> e. <i>Materiality Indicators</i> f. <i>Overall Audit Approach Planned</i> g. <i>Sampling and Selection Approaches</i> h. <i>Staffing on Assignment</i> i. <i>Overall Audit Approach by Caption</i> j. <i>Assignment Timetable And Responsibility</i>

Bersambung ke halaman berikutnya

Tabel 4.2
Perbandingan Perencanaan Audit antara KAP dan SPAP

Perencanaan Audit SPAP	Perencanaan Audit KAP XYZ
	3. E-3 <i>Assessment of Fraud Risk</i> 4. E-4 <i>Audit Risk Assessment and Commentary</i> 5. E-5 <i>Planning and Performance Materiality</i>

Sumber: Olahan peneliti

Perbandingan awal antara perencanaan audit menurut SPAP dengan perencanaan audit laporan keuangan yang dirancang oleh KAP XYZ telah sesuai dengan SPAP. Perbedaan hanya terletak pada urutan dokumentasi. Namun, dalam SPAP tidak disebutkan bahwa perencanaan audit ini merupakan sebuah urutan, dalam SA 300 hanya menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas yang harus dipenuhi dalam proses perencanaan audit. Oleh karena itu, perbedaan urutan pendokumentasian perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ dengan SPAP tidaklah dapat dikatakan menjadi suatu kesalahan.

Setelah mengetahui bagaimana perbandingan awal dari perencanaan audit KAP dengan perencanaan audit SPAP, maka selanjutnya akan dianalisis lebih rinci bagaimana perbandingan perencanaan audit tersebut. Analisis perbandingan ini akan dilakukan dengan cara menjadikan perencanaan audit SPAP sebagai acuan sehingga dapat diperlihatkan sebagaimana tingkat kesesuaian perencanaan audit KAP terhadap perencanaan audit SPAP.

a. Analisis Strategi Audit Menyeluruh

Pada langkah pertama perencanaan audit SPAP, auditor wajib menyusun strategi audit menyeluruh. SA 300 alinea 7 (2013:7) mengungkapkan bahwa strategi audit menyeluruh berisi lingkup, pengaturan waktu, luas sumber daya, dan arahan audit yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan audit.

Pada perencanaan audit KAP, lingkup audit terdapat dalam *intended scope of audit work* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* KAP XYZ. Pengaturan waktu telah dilakukan pada *time table* pada tahap *assignment timetable and responsibility* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Luas sumberdaya atau alokasi sumberdaya dilakukan pada tahap *staffing on assignment* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Arahan audit telah didokumentasikan pada *direction of the audit* pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum*.

Pada operasional yang terjadi pada PT ABC, lingkup audit telah dijelaskan pada bagian karakteristik perikatan. Pengaturan waktu telah dilakukan pada *time table* bagian tujuan, pelaporan saat audit, dan sifat komunikasi. Luas sumberdaya dilakukan pada bagian *staffing*. Arahan audit dilakukan pada bagian arahan audit.

Berdasarkan analisis yang dijelaskan, maka perencanaan audit langkah pertama ini telah dilakukan oleh KAP telah sesuai dengan SPAP.

b. Analisis Menentukan dan Menggunakan Materialitas

Langkah kedua dalam perencanaan audit SPAP, auditor wajib menentukan materialitas. SA 320 alinea 11 (2013:4) menyatakan bahwa auditor wajib menetapkan besarnya *performance materiality* dengan tujuan untuk menilai risiko salah saji yang meterial dan menentukan sifat (*nature*), waktu (*time*), dan luasnya (*extent*) prosedur audit selanjutnya. Alinea 12 pada SA 320 (2013:4) juga menyatakan bahwa auditor wajib merevisi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan materialitas untuk tingkat jenis transaksi, saldo akun, atau *disclosure* tertentu apabila diperlukan, ketika memperoleh informasi selama auditnya yang menyebabkan auditor menentukan angka materialitas yang berbeda dari yang telah ditentukan sebelumnya.

Secara rinci KAP mendokumentasikan penentuan materialitasnya pada tahap *materiality indicators* pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum* dan dijelaskan secara rinci pada indeks E-5 *Planning and Performance Materiality*. Dokumentasi materialitas menurut desain perencanaan audit KAP telah mencakup tujuan menurut SA 320 alinea 11 yaitu untuk menentukan sifat (*nature*), waktu (*time*), dan luasnya (*extent*) prosedur audit selanjutnya.

Pada operasional yang terjadi pada PT ABC, *preliminary materiality* ditentukan berdasarkan saldo interim PT ABC 30 September 2017. Oleh karena itu, revisi materialitas sebagaimana yang telah dinyatakan dalam SA 320 alinea 12, dilakukan dengan merevisi jumlah

materialitas dari saldo 30 September ke saldo 31 Desember. Jumlah materialitas yang berdasarkan saldo pendapatan 31 Desember bertujuan untuk menentukan materialitas untuk pengujian substantif, dan jumlah materialitas revisi didokumentasikan pada *working paper* per akun. Perubahan penggunaan basis penentuan materialitas juga mungkin terjadi, apabila saldo pendapatan yang digunakan sebagai basis perhitungan dalam *preliminary materiality* berubah signifikan dari tanggal interim laporan keuangan hingga *year end date*.

Berdasarkan analisis yang dijelaskan, maka dalam tahap ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit KAP telah sesuai dengan SPAP.

c. **Analisis Diskusi Tim Audit**

Pada langkah ketiga perencanaan audit SPAP, SA 240 alinea 15 (2013:5) menyatakan bahwa tim penugasan auditor wajib melakukan diskusi dengan partner untuk memberi penekanan mengenai bagaimana dan di mana laporan keuangan klien rentan terhadap salah saji yang material karena kecurangan, termasuk bagaimana kecurangan tersebut bisa terjadi. Selain itu, diskusi ini juga bertujuan agar auditor memahami klien lebih detail seperti bisnis klien, manajemen klien, risiko klien, dan hal lainnya. Pengetahuan dari setiap auditor terhadap kliennya dapat berbeda-beda, oleh karena itu dengan adanya diskusi ini dapat menyetarakan informasi antara personil penugasan.

Berdasarkan desain perencanaan audit laporan keuangan KAP, diskusi tim audit dijelaskan secara implisit pada indeks E-1 *Audit*

Strategy Memorandum bagian *Direction of The Audit* yang menyatakan bahwa selama perikatan harus berdiskusi mengenai pengendalian internal dan informasi mengenai klien.

Berdasarkan operasionalnya diskusi tim audit dilakukan pada awal sebelum masuk proses audit PT ABC. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul, diskusi tim audit dipimpin partner *in charge* PT ABC. Diskusi tim audit membahas mengenai prosedur audit apa yang akan digunakan dalam melakukan audit PT ABC, dan selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk *Minutes of Meeting* (MOM). Format MOM *blank* dapat dilihat pada Lampiran 10: Format *Minutes of Meeting* (MOM) *blank*.

Berdasarkan analisis yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit KAP sesuai dengan SPAP.

d. Analisis Mengidentifikasi Risiko Bawaan

Langkah keempat dalam perencanaan audit SPAP, SA 240 alinea 10 (2013:4) menyatakan bahwa tujuan auditor adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Salah satu caranya yaitu dengan mengidentifikasi risiko bawaan untuk menilai apakah terdapat indikasi kecurangan. Berdasarkan SA 240 alinea 12 (2013:4) menyatakan bahwa auditor wajib mempertahankan skeptisme profesional sepanjang audit, hal tersebut harus dipertahankan karena menyadari kemungkinan terjadinya salah saji material yang disebabkan

oleh kecurangan, sekalipun pengalaman audit masa lalu telah mengenal kejujuran dan integritas manajemen dan *Those Charged With Governance* (TCWG).

Pada desain perencanaan laporan keuangan KAP XYZ, mengidentifikasi risiko terutama mengidentifikasi risiko kecurangan terdapat pada indeks E-3 *Assessment of Fraud risk*. Mengidentifikasi risiko bawaan terdapat dalam *significant audit risks* pada tahap *intended audit scope* dengan indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Kemudian, risiko bawaan yang ditentukan bersama dengan risiko pengendalian digunakan sebagai dasar dalam perhitungan risiko signifikan. Risiko bawaan yang telah dinilai dalam tingkat *low*, *medium*, atau *high* menjadi dasar dalam penentuan jumlah sampel bersamaan dengan penentuan risiko pengendalian.

Hasil *fraud risk assessment* pada perencanaan audit PT ABC berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul yaitu kemungkinan terjadinya fraud masih tetap ada namun kecil, karena pengendalian internal dinilai baik. Contoh pengendalian internal terletak pada pengendalian akun investasi. Melihat perusahaan asuransi yang sangat berisiko pada akun investasinya, persetujuan penempatan maupun pencairan harus melalui direktur utama dan direktur investasi, apabila salah satu dari pihak tersebut tidak berada di tempat, proses persetujuan akan digantikan oleh direktur operasional. Dokumentasi *fraud risk assessment* PT ABC dilakukan terpisah dari perencanaan audit sesuai

format E-3 *Assessment of Fraud Risk* KAP, sehingga peneliti tidak mendapatkan dokumen tersebut.

Berdasarkan analisis dan kesesuaian tahapan perencanaan audit yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit KAP sesuai dengan SPAP.

e. Analisis Menilai Risiko Bawaan

Berdasarkan SA 240 alinea 25 (2013:8) menyatakan bahwa sesuai dengan SA 315, auditor wajib mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material karena kecurangan pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. SA 240 alinea 27 (2013:8) juga menyatakan bahwa auditor wajib menilai risiko salah saji material akibat kecurangan sebagai risiko yang signifikan, jika menentukan risiko signifikan belum dilakukan, auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai pengendalian entitas yang terkait, termasuk kegiatan pengendalian yang berkenaan dengan risiko tersebut.

Pada dokumentasi perencanaan audit KAP tahap identifikasi dan menilai risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko akibat kecurangan dilakukan pada tahap yang bersamaan. Sehingga, setelah mengidentifikasi risiko tersebut, selanjutnya risiko dinilai apakah risiko tersebut termasuk risiko signifikan. Sama seperti tahap mengidentifikasi risiko bawaan, menilai risiko bawaan terdapat pada *significant audit risks* pada tahap *intended audit scope* dengan indeks E-2 *Audit Planning*.

Memorandum. Kemudian, risiko bawaan yang ditentukan bersama dengan risiko pengendalian digunakan sebagai dasar perhitungan risiko signifikan. Risiko bawaan yang telah dinilai dalam tingkat *low*, *medium*, atau *high* menjadi dasar dalam penentuan jumlah sampel bersamaan dengan penentuan risiko pengendalian. Sedangkan dalam operasional menilai risiko bawaan dilakukan oleh PT ABC pada identifikasi risiko pada tahap arahan audit.

Berdasarkan analisis dan kesesuaian tahapan perencanaan audit yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit KAP tahap menilai risiko bawaan sesuai dengan SPAP.

f. **Analisis Risiko Signifikan**

SA 315 alinea 27 (2013:9) menyatakan bahwa auditor wajib menentukan apakah risiko yang diidentifikasi adalah risiko signifikan. Berdasarkan *judgement* auditor, menentukan risiko signifikan dilakukan dengan mengeyampingkan dampak pengendalian yang diidentifikasi terkait risiko tersebut. SA 315 alinea 21 (2013:7) juga menyatakan bahwa jika risiko signifikan telah ditentukan, auditor wajib melaksanakan prosedur substantif yang khusus maupun prosedur wajib uji rincian untuk melengkapi risiko tersebut.

Analisis risiko signifikan dilakukan pada *significant audit risks* pada tahap *intended audit scope*. Selain pada tahap *significant risk*, penilaian risiko signifikan dilakukan pada *Commercial And Financial Environment, overall approach to components of financial statement*,

analytical review pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*, indeks E-3 *Assessment of Fraud Risk* dan indeks E-4 *Audit Risk Assessment and Commentary*.

Area signifikan yang dinilai pada tahap penilaian risiko kecurangan biasanya terletak pada pengakuan pendapatan. Berdasarkan hasil wawancara, pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dianggap area yang memiliki risiko signifikan, karena biasanya manajemen melakukan manajemen laba melalui pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka akan berpengaruh ke *balance sheet* yang terbawa pada akun ekuitas atau akun laba pada tahun berjalan. Sehingga, karena hal tersebut, kebanyakan perusahaan melakukan *mark up* laba. Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan skeptisme profesional pada akun pendapatan.

Operasional dalam pendokumentasian perencanaan audit laporan keuangan pada PT ABC, penentuan risiko signifikan dilakukan pada tahap arahan audit. Pada tahap arahan audit, pertama auditor menjelaskan dimana letak risiko signifikan yang ada pada PT ABC, selanjutnya auditor menyatakan untuk melakukan *substantive test* atas akun-akun signifikan yang telah diidentifikasi. Dokumentasi dan pelaksanaan perencanaan audit telah sesuai dengan SA 315 alinea 21 yang disampaikan di atas.

Berdasarkan analisis dan kesesuaian tahap perencanaan audit yang dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit KAP sesuai dengan SPAP.

g. Analisis Memahami Pengendalian Internal

SA 315 alinea 20 (2013:7) menyatakan bahwa auditor wajib memperoleh pemahaman mengenai kegiatan pengendalian yang relevan untuk auditnya, yakni pengendalian yang dipandang auditor adalah penting untuk menilai risiko salah saji material di tingkat asersi, dan merancang prosedur audit lanjutan untuk menanggapi risiko tersebut. Suatu audit tidak mewajibkan pemahaman semua kegiatan pengendalian yang berkenaan dengan jenis transaksi, saldo akun, dan *disclosure* yang penting dalam laporan keuangan atau mengenai setiap asersi.

Desain perencanaan audit KAP, tahap memahami pengendalian internal klien dilakukan pada tahap *commercial and financial environment* dan pada indeks E-2 *Assessment of fraud risk*. Pada tahap *commercial and financial environment* auditor dituntut untuk memahami bisnis dan industri klien dan pengendalian internal klien. Pengendalian internal seperti penggunaan akuntansi berbasis *Information Technology* (IT) juga diidentifikasi sebagai salah satu cara memahami pengendalian internal terhadap laporan keuangan yang dihasilkan atas sistem tersebut.

Pendokumentasian PT ABC tahap memahami pengendalian internal dilakukan pada pendekatan audit tahap arahan audit. Pemahaman atas pengendalian internal didokumentasikan sekaligus dengan menilai

pengendalian tersebut. Pada operasionalnya, memahami pengendalian internal dapat dilakukan auditor dengan cara melaksanakan audit di PT ABC. Pada proses pelaksanakan audit di PT ABC, auditor dapat memahami pengendalian dengan cara mempelajari Satuan Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Prosedur mengunjungi tempat klien membuktikan bahwa proses pemahaman pengendalian internal tidak cukup pada tahap perencanaan audit, namun juga dilakukan terus menerus selama pelaksanaan audit berlangsung.

Berdasarkan analisis, observasi, dan kesesuaian tahap perencanaan audit dapat disimpulkan bahwa, tahap ini juga telah sesuai dengan SPAP.

h. Analisis Mengevaluasi Pengendalian Internal

SA 315 alinea 13 (2013:4) menyebutkan bahwa dalam memperoleh pengendalian yang relevan dengan audit, auditor wajib mengevaluasi rancangan dari pengendalian tersebut dan menentukan apakah pengendalian tersebut sudah diimplementasi.

KAP mengevaluasi pengendalian internal kliennya dengan cara menganalisis sesuai dengan kearifan profesional auditor dan didokumentasikan pada *Commercial And Financial Environment* dan pada indeks E-3 *Assessment of fraud risk*. Pada tahap *commercial and financial environment* selain disebutkan pengendalian internal yang dilakukan oleh klien, dijelaskan juga analisis pegendalian tersebut dan dampaknya terhadap penurunan risiko audit.

Pada dokumentasi perencanaan audit PT ABC, auditor mengevaluasi pengendalian internal pada pendekatan audit tahap arahan audit. Perikatan dengan PT ABC dilakukan pada 30 September dan sebelum tahun buku berakhir, oleh karena itu auditor melakukan prosedur *test of control* atas operasional PT ABC.

Selama pelaksanaan audit berlangsung, auditor memperoleh pemahaman atas pengendalian internal PT ABC dengan cara meminta keterangan kepada personel klien apakah pengendalian tertentu sudah dilakukan, menguji dokumen dan catatan klien, mengamati aktivitas dan operasi klien, dan menggunakan pengalaman tahun sebelumnya dengan mempelajari *working paper* PT ABC tahun lalu. Hasil dari *test of control* didokumentasikan dalam *working paper* setiap akun.

Pengujian pengendalian internal dimaksudkan untuk mengurangi risiko bawaan dan risiko signifikan yang telah ditentukan sebelumnya, dan apabila pengendalian internal baik akan menghasilkan risiko pengendalian yang rendah. Hasil pengevaluasian risiko pengendalian ini akan berdampak pada sifat (*nature*), saat (*timing*), dan luas (*extent*) sampel atau bukti audit yang akan dikumpulkan auditor dalam proses pengujian substantif. Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan audit SPAP dengan KAP telah sesuai.

i. Analisis Mengomunikasikan Kelemahan Pengendalian Internal

SA 265 alinea 9 (2013:3) menyatakan bahwa auditor harus mengomunikasikan kelemahan pengendalian internal yang ditemukan, terutama apabila kelemahan tersebut dianggap signifikan bagi auditor, maka harus membahasnya dengan manajemen atau *Those Charged With Governance* (TCWG) secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul, didapatkan informasi bahwa proses komunikasi kelemahan pengendalian internal klien dilakukan selama proses pelaksanaan audit berlangsung dan dilakukan secara langsung dengan klien. Tahap ini didokumentasikan dalam *Minutes of Meeting (MOM)* sebagai laporan diskusi antara tim auditor dengan manajemen. *Minutes of Meeting (MOM)* merupakan dokumen yang dibuat oleh junior auditor dengan tujuan dokumen internal KAP, format MOM dapat dilampirkan seperti pada Lampiran 10: *Minutes of Meeting (MOM)*. Kelemahan pengendalian internal yang dikomunikasikan yaitu pengendalian internal yang dianggap signifikan bagi auditor, yaitu mengenai pengendalian internal yang buruk dari manajemen, sehingga tim auditor tidak dapat mempercayai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Komunikasi kelemahan pengendalian kepada pihak manajemen dan TCWG berada pada indeks E-1 *Audit Strategy Memorandum* bagian *Reporting Objectives, Timing of the Audit and Communications Required*, yang menyatakan bahwa diskusi dengan manajemen dan

TCWG perlu mengenai tata kelola perusahaan komunikasi dapat dilakukan secara baik tertulis maupun lisan, termasuk laporan auditor, *management letters* dan komunikasi dengan TCWG. Pada perencanaan audit laporan keuangan PT ABC dibahas pada tahap sifat komunikasi dengan membahas tata kelola PT ABC dengan manajemen yang bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis dan dokumentasi yang telah dijelaskan bahwa tahap ini telah sesuai dengan SPAP.

j. Analisis Menyelesaikan Tahap Penilaian Risiko

SA 315 alinea 26 (2013:8) menyatakan bahwa auditor wajib mengidentifikasi risiko bawaan, risiko pengendalian, dan dengan mempertimbangkan jenis transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dalam laporan keuangan, serta menilai risiko yang diidentifikasi, dan mengevaluasi apakah risiko tersebut lebih berkaitan secara pervasif dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial memengaruhi banyak asersi. Hasil ini akan menjadi dasar untuk merancang prosedur audit selanjutnya. Tahap penilaian risiko akan menghasilkan risiko salah saji material yang didapat dengan mempertimbangkan risiko bawaan dengan adanya pengendalian internal yang telah dinilai pada tahap sebelumnya.

Pada tahap ini, KAP XYZ mendokumentasikannya pada tahap *Overall Audit Approach By Caption*, *Overall Audit Approach* dan ditentukan juga sampel dengan melengkapi bagian *Sampling and*

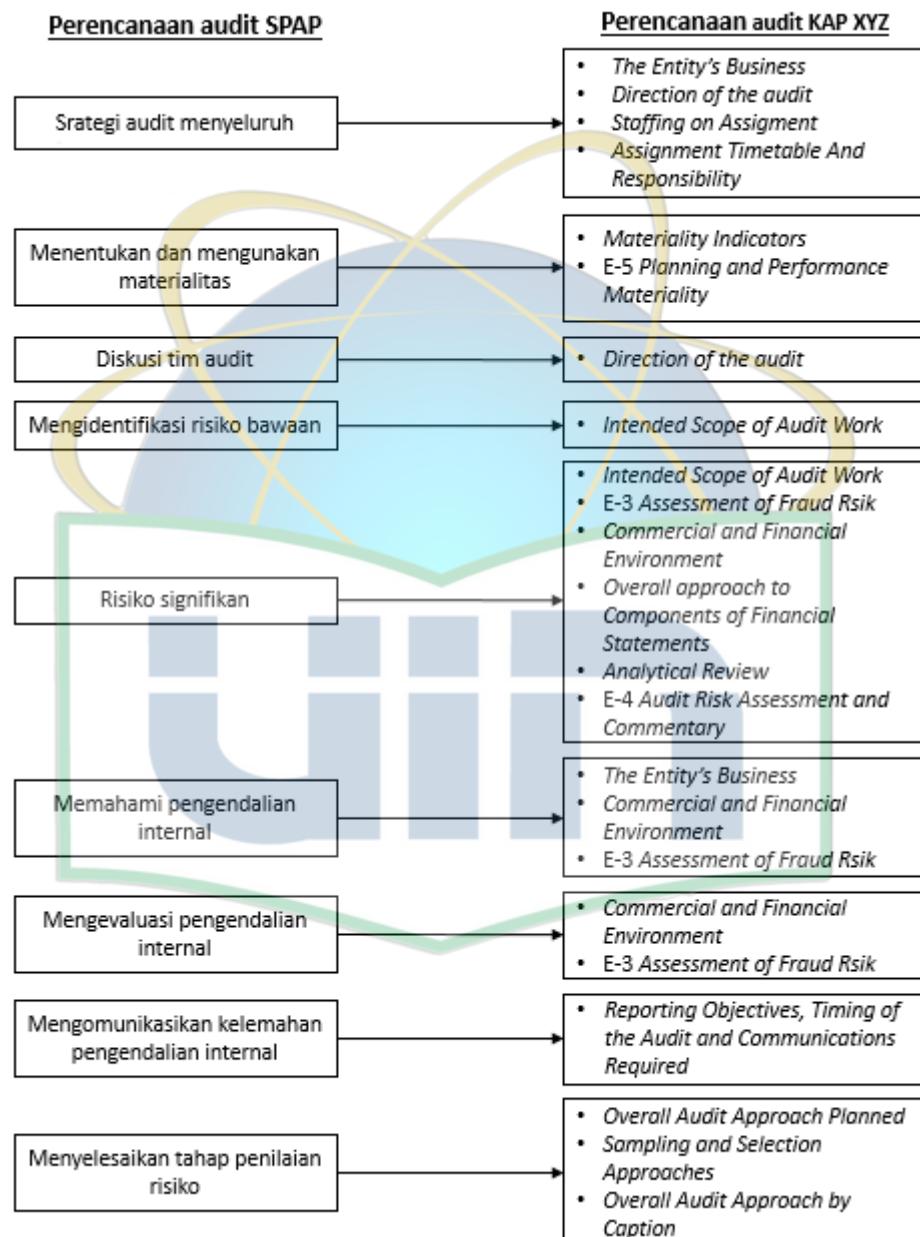
Selection Approaches Planned pada indeks E-2 *Audit Planning Memorandum*. Pada tahap ini, rangkuman penilaian risiko disajikan dalam per *audit cycle* seperti *tangible assets cycle*, *revenue cycle*, *expenditure cycle*, dan lain-lain. Satu siklus mengungkapkan area risiko signifikannya dan penilaian keseluruhan risiko pada tahap perencanaan seperti penilaian *inherent risk* dan *control risk*, serta menyebutkan *performance materiality* pada setiap siklus.

Pada perencanaan audit laporan keuangan PT ABC tahap ini ada pada langkah ke delapan yaitu pendekatan audit per area. Tabel pengungkapan mengenai pendekatan audit per area telah sesuai dengan format KAP XYZ yang dapat dilihat pada Lampiran 8: Perencanaan audit laporan keuangan PT ABC. Oleh karena itu, berdasarkan analisis diatas pada tahap terakhir ini perencanaan audit laporan keuangan KAP telah sesuai dengan SPAP.

Berdasarkan SA 300 menyatakan bahwa perencanaan audit merupakan aktivitas-aktivitas yang harus dipenuhi dalam proses perencanaan audit, tidak ditegaskan menyatakan urutan dalam dokumentasi perencanaan audit. Sehingga, perbedaan urutan pendokumentasian perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ dengan SPAP tidaklah dapat dikatakan menjadi suatu kesalahan. Gambar 4.18 merangkum pembahasan perbandingan antara perencanaan audit SPAP dengan perencanaan audit berdasarkan desain KAP XYZ.

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perencanaan audit laporan keuangan berdasarkan desain maupun operasional pada PT ABC telah sesuai dengan SPAP.

Gambar 4. 18
Ringkasan Pembahasan



Sumber: Olahan Peneliti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ terhadap desain dan perancangan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP. Objek penelitian ini merupakan Kantor Akuntan Publik XYZ. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka hasil penelitian dan pembahasan mengenai perencanaan audit laporan keuangan di KAP XYZ, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Operasional perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan di KAP XYZ telah sesuai dengan desain yang telah dibuat oleh KAP XYZ.
2. Perencanaan audit yang dilakukan oleh KAP XYZ telah mengikuti standar yang berlaku yaitu SPAP.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pada pelaksanaan penyajian atau pendokumentasian perencanaan audit laporan keuangan pada KAP XYZ. Perencanaan yang telah sesuai dengan SPAP membuat pelaksanaan audit menjadi terarah dan dapat menilai risiko untuk menetapkan prosedur audit selanjutnya.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman peneliti baik secara teoritis dan praktisi terbatas. Oleh karena itu, keterbatasan di dalam penelitian ini diantaranya:

1. Masih kurangnya literatur yang relevan di dalam penelitian ini.
2. Jumlah data yang digunakan dalam menganalisis kesesuaian operasional terhadap desain yang telah dibuat oleh KAP XYZ masih terbatas pada satu klien.

D. Saran

Peneliti menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman peneliti baik secara teoritis dan praktisi terbatas. Penelitian dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal, diantaranya:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah lebih banyak literatur yang relevan dengan topik penelitian.
2. Peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik serupa sebaiknya menambahkan *sampling* penelitian perencanaan audit tidak hanya terbatas pada satu perusahaan (klien), sehingga hasil penelitian dapat lebih variatif dan menyempurnakan wawasan peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2004). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: FE-UI.
- Agoes, S. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens , A. A., Randal, E. J., & Beasley, M. S. (2015). *Auditing dan Jasa Asuransi Pendekatan Terintegrasi Jilid 1 Edisi 15*. Jakarta: Erlangga.
- Badjuri, A. (2011). *Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Auditor Independensi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jawa Tengah*. Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3 N0. 2.
- Bhayangkara, I. (2008). *Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boynton, W. C., & Johnson, R. N. (2006). *Modern Auditing: Assurance Service and The Integrity of Financial Reporting*. United States of America: John Wiley & Sons.
- Chang, Y.-S., Chi, W., Hwang, L.-J., & Shiue, M.-J. (2011). *The Association Between Corporate Governance and Audit Quality: Evidence from Taiwan*. Reasearch and Accounting in Emerging Economies Volume 11, 129 - 153, Emerald Group Publishing Limited.
- Dewi, N. N., & Wirasedana, W. P. (2015). *Pengaruh Time Budget Pressure, LOC, dan Task Complexity pada Dysfunctional Audit Behavior Akuntan Publik*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Dwimilten, E., & Riduan, A. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No. 4.
- Gintning, E. H. (2017). *Analisa Perencanaan Audit atas Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy dan Rekan*. Skripsi Universitas Katholik Parahyangan Bandung.
- Hammersley, J. S. (2011). *A Review and Model of Auditor Judgments in Fraud-Related Planning Tasks*. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 101-128.
- Handayani, D. (2009). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit*. Widya Warta No. 02 Tahun XXX III.

- Hasanah, U. (2013). *Pengaruh Perencanaan Audit dan Pelatihan Teknis Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Vol. 14 No. 1, 565-577.
- Hidayat, M. (2011). *Peranan Audit Intern sebagai Strategic Business Partner di PT. Pertani (Persero) Wilayah Sumatera Bagian Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi Vol.1 No. 1.
- Houmes, R., Foley, M., & Cebula, R. J. (2013). *Audit Quality and Overvalued Equity*. Emerald Insight.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). *Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jauharia, A., & Hambali, H. (2016). Dampak Role Conflict Role Ambiguity, dan Role Overload terhadap Judgment Audit. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.
- Kilgore, A., Harrison, G., & Radich, R. (2014). *Audit Quality: What's Important to User of Audit Services*. Emerald Insight.
- Knechel, W. R., Krishnan, G. V., Pevzner, M., Shefchik, L. B., & Velury, U. K. (2013). *Audit Quality: Insight from the Academic Literature*. American Accounting Association.
- Majalah ICT. (2017, 1 April). *Ada Apa Ketika Afiliasi Ernest&Young Salah Audit Laporan Keuangan Indoesat*. Diakses pada 20 April 2018, dari <http://www.majalahict.com/ada-apa-ketika-afiliasi-ernst-young-salah-audit-keuangan-indosat/>
- Pradipto, A. A. (2010). *Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Sulistyo & Rekan*. Skripsi UPN Veteran Yogyakarta.
- Rachmawati, Morasa, J., & B., M. Y. (2016). *Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 3.
- Sarosa, S. (2012). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Indeks.
- Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. H. (2009). *Audit Internal Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit BFEE UGM.

- Tuanakotta, T. M. (2014). *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Utami, D. P. (2014). *Evaluasi Perencanaan Audit Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah & Jerry (KAP ARHJ)*. E-journal Universitas Bina Nusantara.
- Warta Ekonomi. (2017, 28 April). *Gagal Audit Perusahaan Grant Thornton Didenda*. Diakses pada 20 April 2018, dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read139152/gagal-audit-perusahaan-grant-thornton-didenda-%C2%A323juta.html>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 – Surat Keterangan Magang dari KAP XYZ

TO WHOM IT MAY CONCERN
No. 056/IV-2018/HRD

This is certify that **Rusydina Alfiah** has completed her On The Job Training as an Internship in Our Company from January 8, 2018 until April 30, 2018 in Our Audit Division.

We hope the knowledge and skill gained from her assignment will benefit her in pursuing further opportunities.

We wish her every success in her future career.

Jakarta, April 30, 2018

Regards,

Managing Partner



Lampiran 2 – BAP Wawancara dan daftar pertanyaan Wawancara

 <p>PENELITIAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15412 Telp. (021) 7401925</p>		
<p style="text-align: center;"><u>BERITA ACARA WAWANCARA</u></p> <p>Pada hari ini, Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi Skripsi Strata Satu (S1).</p> <p>Tempat : Kantor klien N. Al. Walter M. Jakarta Nama Narasumber : Syamsul Bahri</p> <p>Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di KAP kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.</p> <p>Jakarta, 28 Maret 2018</p> <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;">Peneliti  Rusydina Alfiah NIM. 11140820000062</td><td style="width: 50%; padding: 10px; vertical-align: top;">Narasumber  Syamsul Bahri Manager</td></tr></table>	Peneliti  Rusydina Alfiah NIM. 11140820000062	Narasumber  Syamsul Bahri Manager
Peneliti  Rusydina Alfiah NIM. 11140820000062	Narasumber  Syamsul Bahri Manager	

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa basis dalam penyusunan Perencanaan Audit Laporan Keuangan PT ABC?

Jawab:

Perencanaan audit yang diimplementasikan pada PT ABC mengacu pada format *Audit Strategy Memorandum* dan *Audit Planning Memorandum* KAP XYZ dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) 2013.

2. Bagaimana proses penerimaan perikatan untuk PT ABC yang merupakan BUMN, apakah sama dengan proses penerimaan perikatan pada klien lain?

Jawab:

Proses penerimaan perikatan PT ABC dilakukan dengan cara tander audit oleh BUMN yang dilaksanakan secara terbuka (open tander). Pertama-tama KAP XYZ mengajukan diri dan bersaing dengan KAP lainnya di Indonesia untuk melakukan audit laporan keuangan PT ABC. Setelah open tander selesai dan proses pertimbangan yang dilakukan oleh pihak PT ABC telah dilewati, dipilihlah KAP XYZ sebagai KAP untuk melakukan audit. Proses tersebut terjadi pada tahun pertama audit. Namun, pada tahun 2017 merupakan tahun kedua perikatan dengan PT ABC, sehingga KAP XYZ ditunjuk langsung untuk melakukan audit laporan keuangan dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diajukan oleh KAP dan dilanjutkan dengan *engagement letters*. Selanjutnya SPK ditanda-tangani bermaterai oleh Managing Partner dan pihak PT ABC sebagai tanda dimulainya proses audit pertama yaitu perencanaan audit.

3. Dalam perencanaan audit, terdapat tahapan mengidentifikasi risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko signifikan. Bagaimana Bapak mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikannya?

Jawab:

Kemungkinan terjadinya fraud masih tetap ada namun kecil, karena pengendalian internal baik. Contoh pengendalian internal terletak pada pengendalian akun investasi. Melihat perusahaan asuransi yang sangat berisiko ada akun investasinya, approval penempatan maupun pencairan harus melalui direktur utama dan direktur investasi, apabila salah satu dari pihak tersebut tidak berada di tempat, proses approval akan digantikan oleh direktur operasional. Dokumentasi fraud risk assessment PT ABC dilakukan terpisah dari perencanaan audit sesuai format E-3 Assessment of Fraud Risk KAP, jadi tidak diberikan. Risiko lainnya yaitu risiko bawaan dan pengendalian dapat dilihat dari dokumen perencanaan audit PT ABC yang telah diberikan.

4. Bagaimana proses penentuan materialitas untuk perikatan dengan PT ABC?

Jawab:

Penentuan materialitas KAP terjadi pada tiga tahap, tahap pertama yaitu menentukan materialitas pada audit interim, tahap kedua yaitu menentukan materialitas berdasarkan laporan keuangan unaudited, dan ketiga yaitu menentukan

materialitas berdasarkan laporan keuangan audited. Perhitungan materialitas tahap pertama digunakan untuk menentukan materialitas test of control. Perhitungan materialitas tahap kedua atau saldo laporan keuangan year end unaudited digunakan untuk menentukan materialitas pada test of details atau substantif test. Perhitungan materialitas tahap ketiga atau saldo laporan keuangan audited untuk menentukan materialitas pada batas *adjustment immaterial pass (impass)*.

5. Bagaimana proses staffing untuk perikatan dengan PT ABC?

Jawab:

Penentuan *staffing* dilakukan berdasarkan pengelompokan staf saat awal penugasan. Setiap bulan diberikan daftar *staffing* per tim. *Staffing* dilakukan oleh tingkatan Senior Manajer. Senior Manajer melakukan alokasi staff berdasarkan pengalaman atau *background* audit tahun sebelumnya, dan menilai kinjera staf tersebut pada pekerjaan yang telah dikerjakan. Karena setiap bulan, tim HRD ada penilaian kinerja per staf, nah dari situ juga dapat menjadi pertimbangan untuk proses stafing.

6. Bagaimana apabila di tengah perikatan, terdapat kekurangan tenaga profesional?

Jawab:

Apabila dalam proses pelaksanaan audit, tim audit membutuhkan auditor tambahan karena kekurangan anggota, ketua tim atau manajer yang bertugas dapat meminta bantuan staf audit dari tim lain untuk jadi tenaga pertambahan selama proses audit berlangsung dengan meminta persetujuan oleh manajer atau *in charge* staf audit pertambahan tersebut. Proses ini tidak didokumentasikan, karena malalui proses informal.

7. Apakah kegunaan penyajian asersi manajemen dalam perencanaan audit laporan keuangan PT ABC?

Jawab:

Asersi manajemen disajikan untuk memastikan semua akun dan siklus telah memenuhi semua asersi pada tingkat transaksi, saldo akun, maupun penyajian dan pengungkapan.

8. Kenapa pengakuan pendapatan menjadi hal yang memiliki risiko signifikan?

Jawab:

Pengakuan pendapatan (revenue recognition) dianggap area yang memiliki risiko signifikan, karena biasanya manajemen melakukan manajemen laba melalui pendapatan. Semakin besar pendapatan, maka akan berpengaruh ke balance sheet yang terbawa pada akun ekuitas atau akun laba pada tahun berjalan. Sehingga, karena hal tersebut, kebanyakan perusahaan melakukan mark up laba. Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan skeptisme profesional pada akun pendapatan.

9. Apakah tujuan penyajian pendekatan audit per area dalam perencanaan audit laporan keuangan PT ABC?

Jawab:

Langkah ini bertujuan untuk menentukan risiko yang kemungkinan terjadi pada setiap siklus bisnis yang akan terjadi, nantinya untuk keperluan *substantive test*.

10. Dalam SPAP dan perencanaan audit KAP yang telah ditelaah, apakah terdapat tahap atau langkah diskusi tim audit dalam perencanaan audit PT ABC?

Jawab:

Diskusi tim audit dilakukan pada awal sebelum masuk proses audit PT ABC. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsul, diskusi tim audit dipimpin Partner in charge PT ABC. Diskusi tim audit membahas mengenai prosedur audit apa yang akan digunakan dalam melakukan audit PT ABC, dan selanjutnya didokumentasikan dalam bentuk Minutes of Meeting (MOM). Dokumen ini merupakan dokumen internal KAP sehingga tidak dapat dilampirkan.

11. Bagaimana komunikasi dengan pengendalian internal? Apakah tidak didokumentasikan? Kenapa?

Jawab:

Proses komunikasi kelemahan pengendalian internal klien dilakukan selama proses pelaksanaan audit berlangsung dan dilakukan secara langsung dengan klien. Tahap ini didokumentasikan dalam MOM sebagai laporan diskusi antara tim auditor dengan manajemen. Minutes of Meeting (MOM) merupakan dokumen yang dibuat oleh junior auditor dengan tujuan dokumen internal KAP, format MOM dibuat sesuai format KAP. Kelemahan pengendalian internal yang dikomunikasikan yaitu pengendalian internal yang dianggap signifikan bagi auditor, yaitu mengenai pengendalian internal yang buruk dari manajemen, sehingga tim auditor tidak dapat mempercayai laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Lampiran 3 – Form E-1 Audit Strategy Memorandum

Client name	Schedule reference E/1
Accounting period	Client reference

AUDIT STRATEGY MEMORANDUM

[Content illustration]

Introduction

This memorandum should be read in conjunction with:

- (a) Audit Planning Memorandum filed at **E/2**
- (b) Assessment of Fraud Risk Factors

Scope of the audit engagement

Specify the entity(s) to be audited

Identify any particular users of the audited financial statements

The auditor may consider the following matters when establishing the scope of the audit engagement:

- *The financial reporting framework on which the financial information to be audited has been prepared, including any need for reconciliations to another financial reporting framework.*
- *Industry-specific reporting requirements such as reports mandated by industry regulators.*
- *The expected audit coverage, including the number and locations of components to be included.*
- *The nature of control relationships between a parent and its components that determine how the group is to be consolidated.*
- *The extent to which components are audited by fellow network member firms and other auditors.*
- *The nature of the business segments to be audited, including the need for specialised knowledge.*
- *The reporting currency to be used, including any need for currency translation for the financial information audited.*
- *The need for a statutory audit of standalone financial statements in addition to an audit for consolidation purposes.*
- *The availability of the work of internal auditors and the extent of the auditor's potential reliance on such work.*
- *The entity's use of service organisations and how the auditor may obtain evidence concerning the design or operation of controls operated by the entity to address the outputs of the service organisation and of the controls operated by the service organisation.*
- *The expected use of audit evidence obtained during prior audits, for example audit evidence related to risk assessment procedures and tests of controls.*

- The effect of information technology on the audit procedures, including the availability of data and the expected use of computer-assisted audit techniques.
- The co-ordination of the expected coverage and timing of the audit work with any reviews of interim financial information and the effect on the audit of the information obtained during such reviews.
- The discussion of matters that may affect the audit with firm personnel responsible for performing other services to the entity.
- The availability of entity personnel and data
- Involvement of other professionals - assessment of suitability of other firms involved in the audit, extent to which reliance is to be placed on their input; access to working papers.
- Involvement of other professionals - assessment of suitability of experts (qualifications, expertise, experience of relevant personnel) involved in the origination of the entity's financial data (eg outsourced accounting functions, pensions, investment management, asset valuations), extent to which reliance is to be placed on their input, availability of controls at the expert and at the entity, access to working papers.
- Particular reporting issues

1. The Entity's Business

Details of the business, with details of changes in the period.

Consider:

- Activities and products
- Operational locations
- History
- Business objectives and strategies
- Markets
- Key customers
- Key suppliers
- Key business factors and responses by the entity - political and regulatory, economic, social, technological (* see below)
- Analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats (** see below)
- Stakeholders and their expectations - shareholders, government, employees
- Management processes (** see below)

The auditor can obtain knowledge of the industry sector(s) and the entity from a number of sources; for example:

- Previous experience with the entity and its industry sector(s);
- Discussion with informed people within the entity, such as directors and senior operating personnel;
- Discussion with internal audit personnel and review of internal audit reports;
- Discussion with other auditors and with legal and other advisers who have provided services to the entity or within the industry sector;
- Discussion with knowledgeable people outside the entity, such as industry commentators and economists, industry regulators, customers, suppliers, and competitors;

- Publications related to the industry such as government statistics, surveys, trade journals and similar information, reports prepared by bankers and securities researchers;
- Legislation and regulations that significantly affect the entity;
- Visits to the entity's premises and facilities; and
- Documents produced by the entity, such as minutes of management meetings, communications with shareholders or filed with regulatory authorities, promotional literature, prior period financial information, budgets, internal management reports, interim financial reports, management policy, accounting and control manuals, charts of accounts, role specifications and marketing and sales plans.

Notes

- * **Key business factors and entity responses**
Matters to be considered in evaluating an entity's external factors which may have an impact on the conduct of the audit may include:
 - a. **Political and regulatory factors**
 - Is the entity vulnerable to political considerations such as elections, instability, policy emphases?
 - Is the entity subject to particular government regulations?
 - Does the entity have operations in other jurisdictions?
 - Is the entity subject to particularly onerous regulatory requirements (including environmental aspects), either actual or proposed?
 - Is the entity subject to particularly onerous fiscal requirements or rulings/interpretations?
 - Is the entity susceptible to catastrophic loss factors?
 - b. **Economic factors**
 - Is the entity sensitive to the level of economic activity such as recession and growth locally or internationally?
 - Is the entity particularly sensitive to movements in interest rates and availability of financing?
 - Is the entity particularly sensitive to inflation and/or foreign currency fluctuations?
 - Are the entity's revenues particularly sensitive to high levels of unemployment or economic downturn generally?
 - Are the entity's customers particularly price sensitive to general economic conditions?
 - Does the entity attract financial incentives that may be withdrawn (eg government subsidies or grants)?
 - Are the entity's activities particularly sensitive to political monetary and fiscal activities, such as tariffs, levies and trade restrictions?
 - Is the entity particularly sensitive to credit re-rating?
 - c. **Social and demographic**
 - Are the entity's activities subject to cyclical, seasonal or discretionary activity?
 - Do the entity's activities have a poor public image or receive negative publicity?
 - Is the entity a party to frequent consumer lawsuits?
 - d. **Technological**

- Is the entity innovative and adopting new technologies in production, trading or information systems?
- Does the entity have the capabilities to respond to changing technology and requirements for products and services?
- Do the entity's business sectors have particular barriers to entry for potential competitors?
- Is the entity e-business oriented?

**

Strengths

- What are the entity's advantages as compared with competitors?
- What does the entity do well?
- What are perceived as strengths externally?
- What relevant resources does the entity have available?
- Can the entity respond quickly through effective lines of communication and/or authorisation?
- Does the entity have an established infrastructure for customer care?
- Does the entity have an effective and flexible marketing strategy?
- Can the entity promote itself as offering value for money?
- Are these aspects strengths or competitive necessities?

Weaknesses

- What are the aspects that the entity could improve?
- What does the entity appear to do badly?
- What should the entity avoid as having disproportionate adverse impact?

Opportunities

- Has the entity identified favourable commercial trends?
- Are there changes in the entity's technology or markets?
- Are there changes in the political environment applying to the entity?
- Are there significant changes in the social, population or lifestyle profiles applying to the entity?
- Are there any particular factors applying to any of the entity's places of business?

Threats

- Are there any particular barriers to the development of the entity?
- Do any competitors have a strategy that is prejudicial to the entity?
- Are there changing specifications for the entity's products or services?
- Is changing technology threatening the entity's position?
- Are there significant doubtful debt or cash flow problems at the entity or within the business sector?
- Do any potential threats have the potential to be catastrophic for the entity or its business sectors?

New entrants to the entity's business sector could have a significant impact on market share, prices, customer base at any time. Barriers to entry might include:

- The business sector experiencing a high degree of competition or market saturation or declining margins?
- Declining consumer demand and increasing business failures?
- Rapid changes in technology or rapid onset of obsolescence?
- Impact of legislation or government action?

- Particular sensitivity to economies of scale?
 - Brand loyalty or high costs relating to transfer of supplier?
 - Substantial initial investment and fixed costs?
- The entity may suffer adverse impacts where the sector(s) in which it operates are dominated by a few large suppliers or a single source; there are high costs attaching to a change of supplier; there are no available suppliers of substitute products; or suppliers commence business integration to supply the product(s) provided by the entity. The attractiveness of substitute products may be reduced by close customer relationships, brand loyalty, switching costs and relative prices.*
- The entity may suffer adverse impacts where the sector(s) in which it operates have customers with significant bargaining power; such as where customers buy large volumes from a few suppliers, where products can readily be substituted by an alternative from other suppliers, or the product has particular price sensitivity. Risks can also arise where the entity has unutilised production capacity or would be unable to meet customer demand.*
- The business sector is likely to be particularly competitive where there are many participants of similar size and capabilities, participants have similar commercial strategies, there is little product differentiation, there are low growth rates applying to the market overall or exit costs are high.*

When considering management processes consider:

Organisation structure

- Does the entity have a clear organisation structure with defined reporting responsibilities?
- How frequently are there formal management meetings and are minutes taken and approved?
- Is the entity's organisational structure appropriate for the size and complexity of operations?
- Is the flow of information susceptible to new ideas and concepts?
- Is management involved in the day to day operations of the entity?
- Does management have a good reputation in the business sector?

Internal audit

- Does the entity have an internal audit function?
- Is there an internal audit committee and does it have a majority of independent participants?
- What is the scope of activities of the internal audit function?

Planning and budgeting

- Does the entity have a budgeting and planning process and does the plan include long- and short-term plans in accordance with the entity's objectives?
- Are the budgets and plans realistic?
- Are the objectives of the entity communicated internally?
- Are variances between budgets and actual results investigated and reported upon with adequate explanations?
- Does the entity analyse ratios and use key performance indicators in assessing performance?
- Does the entity have an adequate range of reliable management reports?

- Is there an appropriate relationship between management remuneration and performance?

Duties, responsibilities, experience and qualifications of key personnel

- Are job descriptions and reporting and responsibility lines formalised?
- Do key staff have appropriate degrees of experience in the role or equivalent?
- Do key staff have necessary qualifications?
- Do key staff have a good reputation in the business community?

Management attitudes

Are management:

- Accepting of internal controls and pro-active in their implementation?
- Open to ideas and the flow of information?
- Supportive of the objectives of the entity and their communication?
- Innovative in training and re-skilling of staff?
- Supportive of the regulatory and legislative environments applying to the entity?
- Accepting of recommendations on potential improvements to the entity's internal control environment and not exploiting opportunities for overriding of controls by management?
- Application of adequate controls to all business locations?
- Communicative of attitudes to these issues to all personnel?
- Responsive to competitors' initiatives on a timely basis?



2. Reporting Objectives, Timing of the Audit and Communications Required

The auditor may consider the following matters when ascertaining the reporting objectives of the engagement, the timing of the audit and the nature of the communications required:

- *The entity's timetable for reporting, such as at interim and final stages.*
- *The organisation of meetings with management and those charged with governance to discuss the nature, extent and timing of the audit work; the identities of these two groups.*
- *The discussion with management and those charged with governance regarding the expected type and timing of reports to be issued and other communications, both written and oral, including the auditor's report, management letters and communications with those charged with governance.*
- *The discussion with management regarding the expected communications on the status of the audit work throughout the engagement and the expected deliverables resulting from the audit procedures.*
- *Communication with auditors of components regarding the expected types and timing of reports to be issued and other communications in connection with the audit of components.*
- *The expected nature and timing of communications among engagement team members, including the nature and timing of team meetings and timing of the review of work performed.*
- *Whether there are any other expected communications with third parties, including any statutory or contractual reporting responsibilities arising from the audit.*

3. Direction of the audit

The auditor may consider the following matters when setting the direction of the audit:

- *With respect to materiality: - setting materiality for planning purposes; setting and communicating materiality for auditors of components; reconsidering materiality as audit procedures are performed during the course of the audit; identifying the material components and account balances.*
- *Communications with other firms involved in the conduct of the audit.*
- *Audit areas where there is a higher risk of material misstatement.*
- *The impact of the assessed risk of material misstatement at the overall financial statement level on direction, supervision and review.*
- *The selection of the engagement team (including, where necessary, the engagement quality control reviewer) and the assignment of audit work to the team members, including the assignment of appropriately experienced team members to areas where there may be higher risks of material misstatement.*
- *Engagement budgeting including considering the appropriate amount of time to set aside for areas where there may be higher risks of material misstatement.*
- *The manner in which the auditor emphasises to engagement team members the need to maintain a questioning mind and to exercise professional scepticism in gathering and evaluating audit evidence.*

- Results of previous audits that involved evaluating the operating effectiveness of internal control, including the nature of identified weaknesses and action taken to address them.
- Evidence of management's commitment to the design and operation of sound internal control, including evidence of appropriate documentation of such internal control.
- Volume of transactions, which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control.
- Importance attached to internal control throughout the entity to the successful operation of the business.
- Significant business developments affecting the entity, including changes in information technology and business processes; changes in key management, and acquisitions, mergers and divestments.
- Significant industry developments such as changes in industry regulations and new reporting developments.
- Significant changes in the financial reporting framework, such as changes in accounting standards.
- Other significant relevant developments, such as changes in the legal environment affecting the entity.

(Consider mix of material between Audit Strategy Memorandum (E/1) (this document), Audit Planning Memorandum (E/2)

	Signature	Date
ORIGINATED		Dd/mm/yy
PLANNING REVIEW		Dd/mm/yy
Manager		Dd/mm/yy
Partner		Dd/mm/yy
READ BY (name) (All other team members - to evidence awareness of the audit strategy)		

Lampiran 4 – Form E-2 Audit Planning Memorandum

AUDIT PLANNING MEMORANDUM

[content illustration]

1. Intended scope of MS work Details of significant audit risks are given in the Audit Risk Assessment and Commentary filed at E/5 . <i>Audit plus additional services?</i> <i>By whom (network member firms for instance) and from where?</i> <i>Other service and network contact individuals, with telephone and e-mail details.</i> <i>Ensure that work scope is covered and permitted by the independence and ethical issues commentary; also that it is consistent with the engagement letter.</i> <i>Interactions with:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>Other audit firms</i>• <i>Internal audit function</i>• <i>Other professionals and experts where any reliance is to be placed on their work</i>
Independence and ethical issues Past experience with the management team, their experience and qualifications, would indicate that they are able to take all necessary decisions in connection with the preparation of the financial statements subject to audit. Accordingly it is considered that there is no threat of the auditor undertaking a management role in connection with the conduct of the audit. Enquiries of management have revealed no instances of non-audit services being provided by a fellow member of the network. The firm provides taxation services of a routine compliance nature; taxation entries are reviewed by a taxation specialist not involved in the delivery of the compliance services. The taxation returns are subject to review by the Inland Revenue as a matter of routine. The established safeguard is considered sufficient in the circumstances. <i>[If applicable] Independence considerations applying to other professional firms and experts where any reliance is placed on their work for the purposes of the audit.</i>
Key client personnel and personnel policies <i>Names and titles of those charged with governance, those undertaking accounting roles, other senior executives likely to have information valuable to the analytical review and supplementary evidence for query resolution. Highlight any changes in these key people or their roles during the year or subsequently.</i> Remuneration and appraisal systems <ul style="list-style-type: none">• <i>Formal or informal recruitment</i>• <i>Formal or informal performance evaluation</i>• <i>Approval by senior management</i>• <i>Competitiveness of remuneration packages</i>• <i>Performance-linked incentives</i> Staff relations and morale

- Adequacy of training programmes
- Potential labour disputes and union relationships
- Undue reliance on key personnel
- Holiday, post-retirement and other benefits
- History of employee relations

Communications

- Defined job specifications and lines of responsibility
- Maintenance of personnel records
- Personnel handbooks and other reference material
- Flexibility of communications

Key operating locations

Commercially and where accounting records are maintained and accounting information retained (eg manufacturing areas/stock records; pensions administrators etc - link to any flags to outsourcing risk (likely to be connected to pension arrangements). Highlight any changes when compared with prior period.

2. Commercial environment

The principal activity of the entity has continued to be

Details of the commercial environment are given in section C of this file. There are no key audit issues identified during planning as arising from the commercial environment.

Accounting systems and control environment

Details of the accounting systems and control environment are given in section D of this file. It has been noted that password controls for the access to accounting software have not been well-implemented and it should be assumed that all personnel have access to all accounting functions. Backup procedures are implemented weekly; however backups are retained in the office safe. There is no disaster recovery plan. No other key audit issues identified as arising from the accounting systems and control environment.

Accounting records are maintained using (*specify software and version*), which has been properly licensed for use by the entity. The nominal, sales, purchases and cashbook modules are used; work in progress is controlled using (*specify software and version*) and resultant accounting entries are made monthly as part of the management accounting processes.

Systems:

List the main accounting ledgers in use, indicating whether computerised or otherwise

Detail the accounting software in use, confirm that it is licensed and has current capabilities

Integration with non-accounting functions

Suppliers of software and support; in-house support and development capabilities

Current period changes in systems and procedures

Incidence of processing delays and inaccuracies

Sufficiency of the system for the needs of the entity

Control environment:

Does the entity operate back-ups for its systems and are these sufficient
Adequate segregation of duties
Access controls and password protection
Systems and program development controls
Disaster recovery plan, with periodic testing
Contingency planning
User training and manuals

Financial reporting environment

Does the entity prepare complete and accurate financial statements?

Does the entity prepare regular/periodic management reports?

Are management reports reliable?

Are management reports reviewed by senior management within a reasonable timescale?

Are there any particular influential factors:

- *Legislation*
- *Regulatory environment and requirements*
- *Banking requirements, such as facility covenants*
- *Taxation*
- *Measurement and disclosure issues peculiar to the entity or its business sector*
- *Audit reporting requirements*
- *Potential users of financial statements*

3. Overall approach to components of financial statements

	This period	Last period	Audit file section(s)
Profit and loss account			
<i>Components</i>	<i>Figures</i>	<i>Figures</i>	<i>Specify file sections covering the financial statement caption</i>
Balance sheet			
<i>Components</i>	<i>Figures</i>	<i>Figures</i>	<i>Specify file sections covering the financial statement caption</i>

Give brief commentary on the reasons for significant fluctuations in values when compared with prior period for each of the financial statements captions at the macro-level.

Key risk areas

Cross refer to the Audit Strategy Memorandum ([E/2](#)) and to the Audit Risk Assessment and Commentary ([E/5](#)).

Replay the approach to identified key risk areas in broad terms.

Address specifically the going concern issue

4. Analytical review

Based on what, how reliable has the source been. Key variations and explanations, including sources of information. Seek verification of commercial issues from management outside the accounting function with first hand knowledge of the aspect.

5. Materiality

Overview basis, calculations and application to both profit and loss and balance sheet. Also consider sensitivities in case there is a substantial discrepancy between the information on which the plan is based and the eventual outcome - if this would drive a value for materiality below that used for the work done.

6. Overall audit approach planned

Give overview of mix of compliance and substantive based work, any specialist areas and extent of use of "specimen" work programmes (also whether they are MS general programmes (maybe with minor modifications), programmes developed for specialist industries or sectors (eg financial services, shipping, long term contract work in progress) or programmes specific to this client (explain how they are updated for changes to professional requirements).

7. Sampling approach

Explain where applied and basis of selection. Deal with tolerable error rate; how sampling populations have been determined (especially where errors identified during sampling are not extrapolated to the entire transaction population using the justification of non-homogenous populations). Consider implications of holiday and illness periods for the control environment.

Reason for selecting 7.5% tolerable error

Illustrative sample sizes for substantive testing and controls testing

Large populations (greater than 250 items per year)		Inherent Risk		
At 7.5% tolerable error	Contr ol Risk	High	Medium	Low
		N/A	48	33
		48	33	17
		33	17	7

Medium populations (between 52 and 250 items per year)		Inherent Risk		
At 7.5% tolerable error	Contr ol Risk	High	Medium	Low
		N/A	40	29
		40	29	16
		29	16	7

Small populations (between 12 and 52 items per year)		Inherent Risk		
At 7.5% tolerable error	Contr ol Risk	High	Medium	Low

	Control Risk	High	N/A	25	20
		Medium	25	20	13
		Low	20	13	6

Very small populations (up to 12 items per year)		Inherent Risk			
At 7.5% tolerable error	Control Risk	High	Medium	Low	
		High	N/A	10	9
		Medium	10	9	7
		Low	9	7	5

Where Percentage Coverage is used (where it is efficient to do so based on number of transactions)

Medium populations (between 52 and 250 items per year)		Control Risk		
At 7.5% tolerable error	Inherent Risk	High	Medium	Low
		%	%	%
		High	80 - 100	80 - 100
	Medium	80 - 100	40 - 60 (a)	10 - 30 (b)
	Low	40 - 60 (a)	10 - 30 (b)	10 - 30 (b)

Notes	<p>a Minimum of 40% can be used where there are other audit procedures that can be used, such as analytical review. The maximum of 60% shall be used where there are not other audit procedures available and, consequently, full substantive procedures are to be adopted.</p> <p>b Minimum of 10% can be used where there are other audit procedures that can be used, such as analytical review. The maximum of 30% shall be used where there are not other audit procedures available and, consequently, full substantive procedures are to be adopted.</p> <p>In cases where the assessment of both inherent risk and control risk is high, particular attention shall be given to the retention of the entity as a client and the extent of samples to be used in the compilation of audit evidence.</p>				
		Manager	Partner		
		Initials	Date	Initials	Date
Confirm that 7.5% tolerable error is considered appropriate or specify revised tolerable error and revise sample size matrix.					

8. Staffing of assignment

Names, grades, experience (especially of relevance to client), hours, audit elements allocated to individuals to demonstrate why it is an appropriate team with adequate resources.

Staffing and Time Costs	Initials	Date
Objective: To achieve the audit objectives efficiently and cost-effectively.		

Detail the levels and grades of staff required (including specialists):				
Grade	Name	Week Commencing	Number of days required	
			Initials	Date
Book the relevant staff				
			Schedule reference	
Prepare budgets and time analysis forms (if required)				
Agree dates for the following reviews: (refer to client's year-end timetable)			Date	
Manager (preferably on site)				
Partner				
Second Partner/Audit Report Committee				
Plan a date for discussion on manner in which the audit has been carried out and appraisal of students.				

9. Overall audit approach by caption		
F	SUBSEQUENT EVENTS	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	Completion of specimen audit programmes, including
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

G	LAWS AND REGULATIONS	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	This is summarised in the Business Environment Memorandum filed at C/1. Covered by completion of specimen audit programmes.

	Significant risk areas	<i>Regulated under Specialist audit programmes to be used and audit file to be reviewed by designated financial services specialist at the planning and completion stages prior to signature of the audit report.</i>
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

H	GOING CONCERN	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>No particular concerns at the planning stage as substantial net asset value including surplus of current assets.</i>
	Significant risk areas	<i>Short -term change to market for client's services; however this is not anticipated based on information available at the planning stage.</i>
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

I	RELATED PARTIES	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>No related parties noted in prior years beyond company officers and shareholders. Complete specimen audit programme.</i>
	Significant risk areas	<i>Unidentified related parties. Maintain awareness of implications of any transactions with unusual terms.</i>
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

J	NOMINAL LEDGER	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<p>Systems and controls are documented at section D, no changes are anticipated in the current year.</p> <p>Complete specimen audit programme - particular attention to be given to the nature, authorisation and processing of journal entries.</p>
	Significant risk areas	<p>Security of computer systems and access thereto.</p> <p>Review password systems and disaster recovery plan.</p>
	Overall planning risk assessment	
	- Inherent	
	- Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

K	TANGIBLE FIXED ASSETS	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption - for instance authorisation differing according to value and category of fixed asset)	<p>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year.</p> <p>Completion of specimen audit programme appropriate.</p>
	Significant risk areas	<p>Proper capitalisation of additions</p> <p>Implications of dilapidations clause in premises lease</p>
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

L	INTANGIBLE FIXED ASSETS	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption - for instance authorisation differing according to value and category of fixed asset)	Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.
	Significant risk areas	Proper capitalisation of additions
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

M	REVENUE CYCLE - TRADING ACCOUNT	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

N	REVENUE CYCLE - OTHER	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

O	EXPENDITURE CYCLE - PURCHASES - TRADING ACCOUNT	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

P	EXPENDITURE CYCLE - PURCHASES - OTHER	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

Q	EXPENDITURE CYCLE - PURCHASES - OTHER	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

R	STOCKS AND WORK IN PROGRESS	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

S	TREASURY CYCLE	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

T	TAXATION	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

U	PROVISIONS	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year.</i> <i>Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

V	CAPITAL RESERVES AND DIVIDENDS	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year.</i> <i>Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

W	CONTINGENCIES AND COMMITMENTS	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption - for instance authorisation differing according to value and category of fixed asset)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

X	CASH FLOW STATEMENT	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

Z	CONSOLIDATION	Initial plan
	(where necessary break the information down by components of the overall caption)	<i>Systems and controls are documented at section D, no changes anticipated in the current year. Completion of specimen audit programme appropriate.</i>
	Significant risk areas	
	Overall planning risk assessment	
	-Inherent	
	-Control	
	-Particular assertions where risk assessment differs, together with explanations	
	Non-standard audit approaches to be adopted	

11. Assignment timetable and responsibility		
	Dates	Practical Responsibility (Partner, Manager, Senior)
<i>Interim team briefing</i>		
<i>Interim audit</i>		
<i>Interim management letter</i>		
<i>Debtors circularisation</i>		
<i>Creditors circularisation</i>		
<i>Stocktake attendance</i>		
<i>Bank, lender and other confirmations</i>		
<i>Legal letter</i>		
<i>Full period management accounts</i>		
<i>Final audit plan</i>		
<i>Final team briefing</i>		
<i>Final audit fieldwork</i>		
<i>Manager review</i>		
<i>Partner review</i>		
<i>Final management letter</i>		
<i>Second partner review</i>		
<i>Approval meeting</i>		
<i>Audit report date</i>		

	Signature	Date
ORIGINATED		
PLANNING REVIEW		
Manager		
Partner		
READ BY (name) all other team members - to evidence awareness of the plan		

Lampiran 5 – Form E-3 Assessment of Fraud Risk

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i> E/3
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>

ASSESSMENT OF FRAUD RISK

This audit programme must be completed for all audits. It involves consideration of potential fraud risk factors at the time of initial client acceptance, during the audit planning and fieldwork and acceptance of reappointment. If an impropriety is suspected the engagement partner should be consulted before any procedures are commenced which might alert the client personnel to such suspicions. This assessment should not be based on prior experience with the entity or its management and, where applicable, those charged with governance, but on an objective assessment of the potential risks of fraud prior to mitigation by controls and oversight, having regard to economic and commercial factors in the prior period and anticipated for the current period. Substantiation and corroboration of information should be sought when it should be available, and an attitude of professional scepticism should be maintained.

1. Overall Objectives

- A. To evidence initial assessment of the risk of material misstatement of assertions due to fraud as a part of the planning process, after application of appropriate professional scepticism.
- B. To evidence continuing assessment of the risk of material misstatement of assertions through to audit completion.

2. Introduction

For this purpose fraud is regarded as manifesting itself as deliberate material misstatement of financial information or the misappropriation of assets. The illustrative factors given in this programme should be considered in conjunction with the outcome of other audit procedures and enquiries made. Other factors may arise in particular commercial sectors or in particular legal jurisdictions; consideration should also be given to the laws and regulations applying to the particular entity and the jurisdictions in which it operates, including requirements to make external reports of instances, if any, of actual or suspected fraud.

3. Assessment of fraud risk by management and those charged with governance

Enquiries made of:	Management 1 – President Director Management 2 – Accounting & Tax Division Head
Assessment of fraud risk inherent in: Business sector	<u>Revenue recognition</u>
Geographical markets	None
Other factors	None

Assessment of fraud risk arising from limitations in the control environment

The management and those charged with governance believe that exposure to fraud risk inherent in business sector is low. Safety and effectiveness of the Group's activities are secured by the risk management system adopted by the Group. There are no identified business risks arising from limitation in the control environment.

Describe management techniques for identification of fraud risks and monitoring of the operation of relevant controls

The Company has applied an Enterprise Risk Management (ERM) framework which has a function to assist all levels of the organization in achieving the Company's business goals and protecting the interests of the stakeholders by applying a systematic approach to identify and evaluate the impacts of risks against processes, activities, products and services and then take the measures of mitigation. The Management conducts evaluation regarding the effectiveness of the internal controls through the Company's Internal Audit Division which supervises the internal control system to give adequate assurance that the operational activities have been performed effectively and efficiently in accordance with the determined standard operating procedures.

Specific risks of material misstatement due to fraud and mitigating controls:

	Description	Potential significance	Likelihood of occurrence
Revenue recognition	Please refer to WP ref. E/1 – Audit Planning Memorandum	Significant	Less likely

Instances of fraud identified during the period Instances of fraud suspected or remaining under investigation during the period	Description of instances	Description of responses
	None identified	

Review entity's risk register(s), where prepared and assess completeness	Initials	Date
	N/A	

4. Assessment of Risk Environment

As part of the planning process document the fraud risk factors that have been identified at the particular entity. Based on the identification of risk factors found to apply to the entity indicated in the table below, together with other entity-specific factors documented therein, determine the audit approach to be adopted.

Illustrative risk factors		Initial assessment	Final assessment	Comment reference
<i>Risk factors applying to financial reporting</i>		Y/N	Y/N	
1	Management characteristics			
1.1	Dominant owner managers unable or unwilling to distinguish between entity and personal transactions and balances			
1.2	Unexplained disproportionate lifestyle			

Illustrative risk factors		Initial assessment	Final assessment	Comment reference
1.3	Pressure from investors' or others' expectations			
1.4	Personal guarantees or securities for entity debts or facilities			
1.5	Remuneration linked to profits or other performance measures			
1.6	Inappropriate minimisation of fiscal obligations			
1.7	Dominant individual able to override controls and no compensating controls in the overall control environment			
1.8	Inadequate monitoring of the operation of controls, information and outcomes			
1.9	Unwillingness to accept recommendations for improvements to control environment			
1.10	Excessive participation of senior management in accounting matters			
1.11	Unrealistic explanations offered for transactions or identified errors			
1.12	Continuing acceptance of ineffective accounting or information technology resources, or staff generally			
1.13	Disproportionate turnover of staff or professional advisers			
1.14	Imposition of unrealistic timetables			
1.15	History of improprieties by the company or its management, including claims and legal actions			

2	Business sector characteristics	Initial assessment	Final assessment	Comment reference
2.1	Disproportionate decline in demand or margins			
2.2	Disproportionate vulnerability to fashion or technological change			
2.3	Propensity for unlawful inducements			
2.4	Material incidence of cash and round sum transactions			
2.5	High incidence of transactions apparently cancelled and refunded			
2.6	Significant changes in regulatory environment			
2.7	Adverse industry reputation			

3	Business entity characteristics	Initial assessment	Final assessment	Comment reference
3.1	Unduly complex corporate or ownership structure			
3.2	Use of multiple jurisdictions without credible explanation			
3.3	Adverse jurisdictional reputation			
3.4	Atypical management structure			
3.5	Obscure ownership and/or control			
3.6	Ineffective oversight of management			
3.7	Undue delegation to unskilled or inappropriate staff			
3.8	Unusual transaction types or values, especially close to key financial timetable dates			
3.9	Transaction mechanisms requiring little or no tangible evidence that is verifiable with third parties (potential use for money laundering, especially in jurisdictions where taxation rates would represent a low cost)			
3.10	Significant transactions with related parties or not in the normal course of trade			
3.11	Transactions requiring significant levels of estimation in quantification for financial reporting purposes			
3.12	Prior management estimates found to be unreliable, or identified instances of re-characterisation of prior transactions			
3.13	Performance not comparable with similar business entities			
3.14	Persistent negative cash flow (especially if not expected based on reported performance) or other potential need for refinancing			
3.15	Potential breaches of financial covenants			
3.16	Disproportionate market presence giving opportunities to impose inappropriate relationships on suppliers and/or customers			
3.17	Inadequate physical controls over access to the entity's premises			

<i>General risk factors</i>		Initial assessment	Final assessment	Comment reference
5.1	Discrepancies in accounting records or disproportionate numbers of adjustments to entries			
5.2	Lack of evidential support for transaction balances or lack of original documentation			
5.3	Significant transactions processed as adjustments or outside the routine for that transaction type			
5.4	Unsupported or inconsistent management explanations of transactions and/or adjustments			
5.5	Unexplained or unusual items on reconciliations of balances internally or with third parties			
5.6	Documentation that appears to have been altered or may have come from a source lacking credibility			
5.7	Failure to derive or assess explanations for divergence from expected accounting outcomes			
5.8	Access to records or systems disproportionate to the role of the individual			
5.9	Management or key employees with disproportionate technology skills in an informal accounting environment, especially where there is scope for the introduction of spurious transactions			
5.10	Restrictions of access to individuals or information			
5.11	Inappropriate time pressures imposed and delays in the provision of information or material requested			
5.12	Rumours or allegations of improprieties			
5.14	Inappropriate and/or provocative application of elements of the applicable accounting framework			
5.15	Unaddressed adverse legal, fiscal or regulatory findings			

Comments on characteristics and controls that compensate for adverse risk assessments identified and documented above:

Comments

Document audit approach to identified adverse assessments that do not appear to have credible compensating characteristics or controls. Planned work should provide adequate audit assurance having regard to the adverse risk assessment.

Consider variations in audit approach and/or timing in order to reduce the predictability in the detailed audit procedures undertaken during the audit.

If instances of actual or suspected fraud are identified consider their implications for other factors contributing to the overall assessment of fraud risk and re-evaluate as considered necessary, including the modification of the detailed audit plan.

Ensure that transactions throughout the period are subject to audit; in particular extend sample durations through to the end of the period where interim transaction testing has been undertaken.

Potential approaches to an adverse risk assessment include the following:

	Included in planned procedures Y/N/NA
<i>At assertion level</i>	
Where information is available, performing tests on data by operating location rather than in aggregate, and obtaining credible explanations for variations.	N/A
For significant or unusual transactions, especially adjacent to the period end, assess for there being related parties involved, there being obscure additional terms applying to the transactions or there being linked obscure financing arrangements.	N/A
Refining arrangements for obtaining third party confirmations, including confirmation of transactions as well as balances or at dates other than the period end.	N/A
Undertaking detailed reviews or an extended sample of adjusting entries throughout the period and assessing the reasons for their having arisen, categorising between mathematical mistakes, mistakes in applying accounting policies, oversights or misinterpretation of facts or possible fraud.	N/A
Visiting non-routine locations or on non-routine timings.	N/A
Extending enquiries to non-financial personnel.	N/A
Appropriate interaction with other firms involved in the audit to ensure adequate work is done on the business units for which they are responsible.	N/A
Appropriate interaction with other experts whose work is to be relied upon in compiling the financial statements to ensure that their suitability and qualifications make them appropriate for the role and that their instructions were appropriate.	N/A
Reassessment of prior period judgemental areas with the benefit of subsequent information to provide some confidence on the estimation process for the current period.	N/A
Application of more advanced computer audit techniques.	N/A
<i>In respect of fraudulent financial reporting</i>	
<i>Revenue recognition</i>	

	Included in planned procedures Y/N/NA
Extended analytical review on sub-sets of data (by operating unit, by shorter period, by individual product type etc as reliable data is available)	N/A
Advanced computer audit techniques to identify unusual transactions or unusual relationships between transactions and balances.	N/A
Advanced computer audit techniques to assess the integrity of systems used to originate transactions and accounting information relating thereto.	N/A
Detailed third party confirmations covering completeness of contract terms, for instance.	N/A
Cutoff procedures such as observation of physical deliveries.	N/A
<i>Inventory and work in progress</i>	
Co-ordination of counts across all locations to minimise the risk of items being transferred between locations to support duplicated inventory amounts.	N/A
Applying greater scepticism concerning management's measures of physical quantities.	N/A
Consideration of trading activities to assess the possibility of inventory remaining on the premises where title has been transferred to third parties during the period; potential inclusion of delivery details in third party confirmation requests.	N/A
Consideration of proposed inventory quantities by reference to prior period levels and changes in the entity's business or product range during the period.	N/A
<i>Estimation processes</i>	
Extend enquiries to a wider range of personnel involved, or expected to be involved, in the development of accounting estimates, including appropriate informed non-financial personnel.	N/A
Involve an independent expert to derive alternative estimates (<i>after appropriate consideration of client confidentiality issues</i>).	N/A
Reconsideration of past trends in estimates and their accuracy to identify any bias emerging from the work of particular individuals.	N/A
<i>In respect of misappropriation of assets</i>	
Extension of computer audit techniques to identify instances where same names, addresses or other details appear in unexpected locations (<i>eg supplier address also appearing in personnel records</i>). <i>(Detail below)</i>	N/A
Particular consideration of evidence supporting write offs of stock discrepancies, trade debtors, loan balances.	N/A
Transactions on apparently dormant or little used accounts.	N/A
Discounts, rebates etc applied in accordance with authorised terms.	N/A

	Included in planned procedures Y/N/NA
Consistent application of authorised trading terms generally.	N/A
<i>Unusual business transactions</i>	
Confirmation of rationale, terms etc with transaction counterparty, together with consideration of whether they might be a related party or otherwise not at an arm's length position. Research the status of the transaction counterparty to assess whether it is reasonable for them to be undertaking such a transaction.	N/A
Understand the implications of the reflection of the transaction(s) in the financial statements at both the assertion and the financial statement level and assess whether all elements of the transaction(s) are reflected on a consistent level, including trading terms.	N/A
Obtain explanations from all of those individuals within the entity who would be expected to have knowledge of the matter and not just individuals within the finance function.	N/A
<i>Selection and application of accounting policies</i>	
Assess reasonableness of the accounting policies selected in the context of the applicable financial reporting framework.	N/A
Assess the application of the selected accounting policies.	N/A
Determine the consistency of selection and application of accounting policies with (a) other entities in the business sector and (b) with those in the prior period for the entity.	N/A
Assess the categorisation and characterisation of transactions, balances and events within the financial statements.	N/A

Details of other additional procedures:

5. Conclusion at the initial planning stage

Initial assessment of fraud risk environment*	Signature	Date
Reviewed and approved by partner:		

* Indicate assessment of fraud risk

6. Confirmation of Risk Environment at Completion Stage

As part of the review and completion process consider whether the initial assessment of the risk environment was correct based on the verification work undertaken, whether unanticipated factors emerged during the course of the audit and whether the responses to all identified risks were adequate to provide assurance that there was no material misstatement of financial information or misappropriation of assets.

Risk factors identified during the course of the audit should be marked on the tabulation of illustrative factors under 'final assessment'.

Describe below the additional factors, if any, that have been identified during the course of the audit and the procedures adopted, including enquiries of management, that provided assurance that there had not been material misstatement of financial information or misappropriation of assets. Provide explanations where a factor was identified at the planning stage but considered not to be present during the course of the audit.

Comments

7. Completion and Clearance

	Schedule reference	Initials	Date
Include possible management letter points	N/A		
Include other potential constructive advice to the client	N/A		
Complete appropriate section of Audit Control Sheet	N/A		

8. Conclusion at Completion Stage

Based on the audit work done I am satisfied that the overall objectives A and B above have been met and that there has been no material misstatement of financial information or misappropriation of assets following fraudulent conduct.

	Signature	Date
Originated by Manager:		
Reviewed and approved by Partner:		

Lampiran 6 – Form E-4 Audit Risk Assessment and Commentary

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i> E/4
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>

AUDIT RISK ASSESSMENT AND COMMENTARY

GENERAL COMMENTARY	
Our overall assessment of control environment:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. The positive attitude, awareness and actions of management, the board of directors and owners concerning the importance of controls and the emphasis given to controls. 2. Management's operating style and philosophy is hands-on management. The Company's key management personnel are highly involved in the day to day operations. 3. The Company's management has extensive experience in the business. 4. The Company is currently enhancing its control and organizational structure by hiring by competent personnel for financial, reporting and operational aspects of the business. 5. Reporting controls are in place by requiring the Company to submit monthly reports on financial results and operations and the Company should submit quarterly Financial Statements to OJK. 	
Inherent risk factors	
Assessment of business risks inherent in:	
Business sector	
Geographical markets	
Other factors	
Assessment of business risks arising from limitations in the control environment	
None noted	
Describe management techniques for identification of business risks and monitoring of the operation of relevant controls	
Control risk factors	
The internal control seems conducive to produce reliable financial statements. We plan the audit and to determine the nature, timing, and extent of audit procedures to be performed.	
Significant risks have been identified in the following areas: details are given in the applicable underlying sections of this document: None noted	
Preliminary risk:	

RISK ASSESSMENT BY FINANCIAL STATEMENT CAPTION AND ASSERTION

Financial statement caption and risk assessment	Preliminary (H,M,L,N/A)		Final (H,M,L,N/A)	
	Inherent	Control	Inherent	Control

<i>Concerning classes of transactions and events for the period:</i>				
Occurrence	'O'			
Completeness	'C'			
Accuracy	'A'			
Cutoff	'F'			
Classification	'L'			

<i>Concerning account balances at the period end:</i>				
Existence	'E'			
Rights and obligations	'R'			
Completeness	'C'			
Valuation and allocation	'P'			

<i>Concerning presentation and disclosure:</i>				
Occurrence and rights and obligations	'Q'			
Completeness	'C'			
Accuracy and valuation	'S'			
Classification and understandability	'T'			

<i>Commentary</i>				
Significant risks identified as applying to this file section at the planning stage are as follows:				

Significant Risks	Inherent or control risk?	Mitigating Controls	Control reference

<i>Overall Commentary</i>				
<i>The risk assessment for each account is being considered in the planning.</i>				

	Manager		Partner	
	<i>Initials</i>	<i>Date</i>	<i>Initials</i>	<i>Date</i>
The initial Audit Risk Assessment and Commentary has been properly prepared in accordance with the circumstances of the client.	NN	Dd/mm/y y	NN	Dd/mm/y y
The initial Audit Risk Assessment and commentary, together with the detailed audit plan, has been reconsidered before completion of audit procedures and has been updated, where considered necessary, to reflect the outcome of audit procedures undertaken and additional information obtained.	NN	Dd/mm/y y	NN	Dd/mm/y y



Lampiran 7 – Form E-5 Planning and Performance Materiality

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i> E/5
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>

PLANNING and PERFORMANCE (TOLERABLE ERROR) MATERIALITY WORKSHEET

Planning materiality indicators should be based on prior period figures unless current knowledge of the business indicates significant differences from the prior period and reliable, relevant preliminary financial information for the current accounting period is available from the entity.

Performance materiality indicators should be established for each relevant file section, having regard to (a) the likely significance of the information addressed in that file section to the potential users of the financial statements; (b) the expected incidence of misstatements that require aggregation in order to consider their implications for financial reporting and (c) the value of planning materiality. Initial performance materiality should be documented by file section at **E/5** and updated as necessary. Performance materiality is a matter for professional judgement. It is unlikely to be greater than 10% of planning materiality unless the incidence of errors is expected reasonably to be very low. In such circumstances the implications of aggregation are unlikely to be significant to the identification of potential material misstatements. Where the incidence of errors is greater than expected then it may be necessary to reduce the value of performance materiality in order to consider the implications of aggregation.

It may be necessary to apply differing values of performance materiality to individual transaction groups within a file section when they are subject to differing control environments. Where this is the case these should be documented in the Control environment transaction allocations included by transaction cycle.

Consideration should be given to the implications of the factors selected for materiality indicators. For instance profit thresholds may result in additional bonus entitlements or borrowing covenants may be in question. These considerations should be evidenced within the explanation for the planning materiality indicators identified below.

Initial planning materiality indicators

<i>Base factor selected</i>	<i>Base Amount</i>	<i>Product</i>
<i>Balance sheet</i>	Currency IDR	Currency IDR
Total assets	xxx	xxx
Net assets or total equity	xxx	xxx
<i>Profit and loss account</i>	Currency IDR	Currency IDR
Income from continuing operations (before tax)	xxx	xxx
Normalized income from continuing operations (before tax)	xxx	xxx
Total revenues	xxx	xxx

	Materiality indicators for planning purposes	Threshold for overs/unders to be aggregated*
	Currency IDR	Currency IDR
Profit and loss account	xxx	xxx
Balance sheet	xxx	xxx

* This threshold is meant to be used as a guide for items to be taken to the overs/unders schedule. Please refer to the following table below. However auditor's judgement should be used to plan the level to be used, with particular consideration of the nature of the item, the expected incidence of errors and the reasons that they arise.

Basis for Computation of Planning Materiality	
Description	Measurement Percentage
Income from continuing operations (before tax)	5.0%
Normalized income from continuing operations (before tax)	5.0%
Total revenues	2.0%
Total assets	2.0%
Net assets or total equity	5.0%

Basis for Computation of Tolerable Error	
Risk Assessment	Percentage
High	15%
Moderate	30%
Low	50%

Basis for Computation of Nominal Amount	
Description	Measurement Percentage
Pre-tax materiality amount	5% to 10%

Explanations for levels of planning materiality indicator selected

Summary of performance materiality factors selected

File section	Factor		Performance materiality value
	Base Amount	%	
Income before tax	xxx	x%	xxx

Explanations for levels of performance materiality values selected

--

Determination of Nominal Amount (PAJE and PRJE listing scope) – 10%

	Amount (IDR)
<i>Proposed adjusting journal entries (PAJE)</i>	xxx
<i>Proposed reclassifying journal entries (PRJE)</i>	xxx

Revised planning materiality indicators and performance materiality values

Revised planning materiality indicators and performance materiality values should be computed if, at any stage during the course of the audit, it is found that the financial information used for the computation of the initial planning materiality indicators or performance materiality values are not a reasonable estimate of the actual financial information for the period.

Base factor selected	Revised Base Amount	Revised Product
<i>Balance sheet</i>	Currency	Currency
Total assets	xxx	xxx
Net assets or total equity	xxx	xxx
<i>Profit and loss account</i>	Currency	Currency
Income from continuing operations (before tax)	xxx	xxx
Normalized income from continuing operations (before tax)	xxx	xxx
Total revenues	xxx	xxx

	Revised materiality indicators	Revised threshold for overs/unders to be aggregated*
	Currency	Currency
<i>Profit and loss account</i>	xxx	xxx
<i>Balance sheet</i>	xxx	xxx

Determination of Nominal Amount (PAJE and PRJE listing scope)

	Revised Amount
<i>Proposed adjusting journal entries (PAJE)</i>	Currency
<i>Proposed reclassifying journal entries (PRJE)</i>	xxx
	xxx

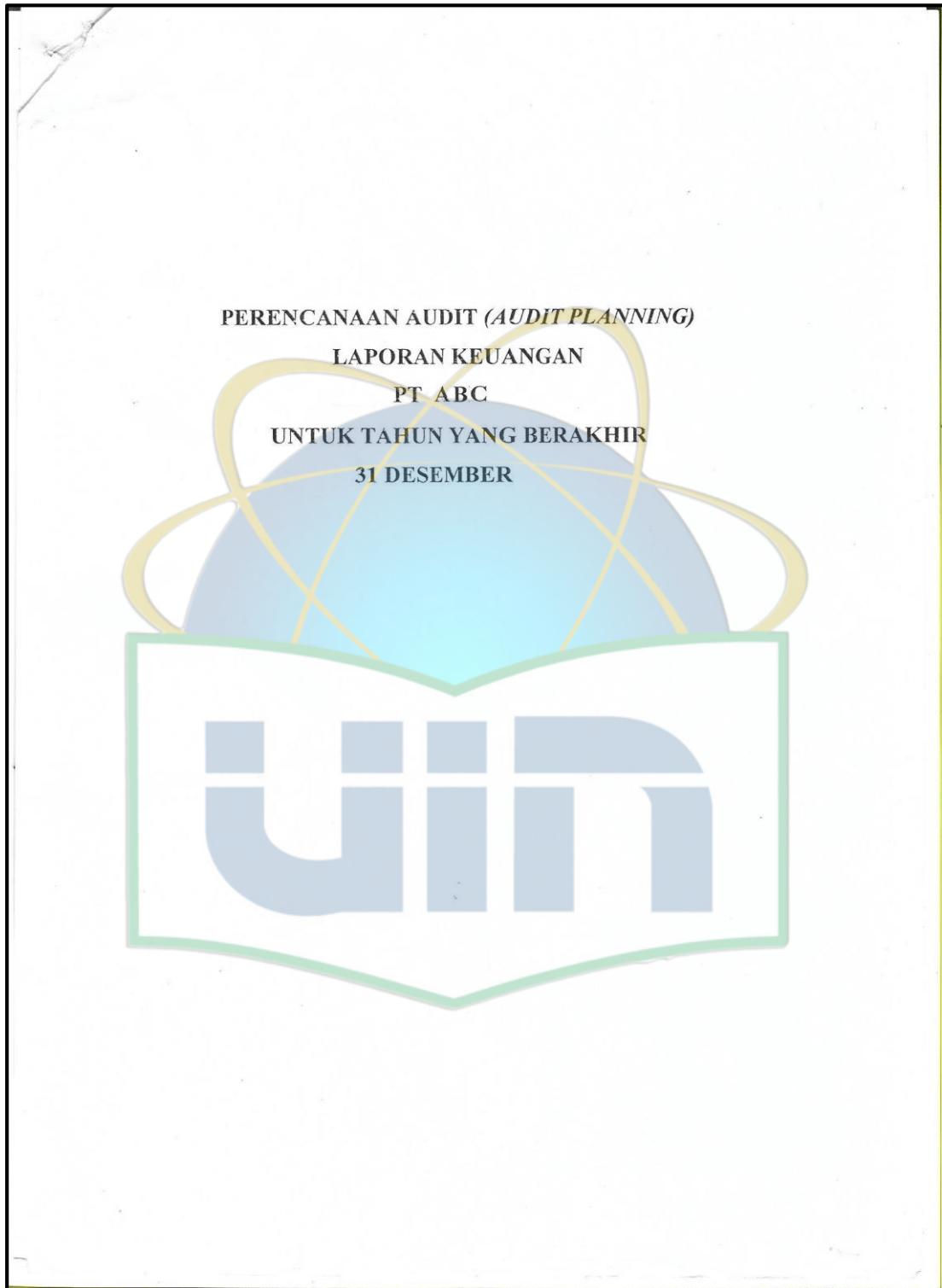
Consideration should be given to adjusting sample sizes and/or audit approach having regard to any revision to materiality. Where revisions are made the relevant underlying working papers should be updated to reflect the revision(s).

Explanation for revised planning materiality indicators and performance materiality values selected

I confirm that I have considered the planning materiality indicators and performance materiality values computed at the planning stage, as adjusted - (*delete unless applicable*), and confirm that I consider them to be appropriate for the purposes of the conduct of the audit.

	<i>Signature</i>	<i>Date</i>
Completed by senior		Dd/mm/yy
Reviewed and approved by manager		Dd/mm/yy
Reviewed and approved by partner		Dd/mm/yy

Lampiran 8 – Perencanaan Audit Laporan Keuangan PT ABC



<i>Nama Klien</i>	PT ABC
<i>Periode:</i>	Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2017
PERENCANAAN AUDIT	

DAFTAR ISI

Halaman

PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN	
1. Karakteristik Perikatan	1
2. Tujuan Pelaporan, Saat Audit dan Sifat Komunikasi	10
3. Arahan Audit	12
4. Penentuan Materialitas	14
5. Sampling	16
6. Staffing	18
7. Asesasi Manajemen	19
8. Pendekatan Audit per Area	20



<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

DETAILED AUDIT PLANNING MEMORANDUM

1. Karakteristik Perikatan

Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup penugasan audit _____ an anak perusahaan untuk tahun buku 2017 terdiri dari:

A. Audit Umum

Audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dilaksanakan berdasarkan Standar Auditing yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Audit umum mencakup:

1. Audit atas laporan keuangan konsolidasian
2. Audit atas laporan keuangan _____
3. Audit atas laporan keuangan _____

Tujuan audit ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan konsolidasian _____ dan laporan keuangan masing-masing entitas anak, dalam hal material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kami juga melakukan audit umum atas laporan keuangan yang bertujuan khusus yang disusun oleh _____ untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017:

1. Laporan keuangan Program Tabungan Hari Tua (THT);
2. Laporan keuangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara;
3. Laporan keuangan administratif Program Pensiun Eks PNS Departemen Perhubungan Pada PT Kereta Api Indonesia;
4. Laporan keuangan administratif Program Pensiun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

B. Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan _____ terhadap peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

- 4. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.010/2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.02/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Peritipan Dana Iuran PNS dan Pejabat Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan No. 212/PMK.05/2015 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.02/2015 sebagaimana diubah dengan PMK No. 23/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelegaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan Oleh PT dan PT
- 11. Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan oleh Perseoroan dan PT
- 12. Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2008 sebagaimana diubah dengan No. PER-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

dan pengendalian internal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Standar Auditing (PSA No. 62) yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Tujuan dari audit ini adalah untuk memberikan keyakinan negatif (*negative assurance*), dalam hal material, pada kepuahan BPJS Kesehatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal yang berlaku pada PT

C. Reviu Laporan Kinerja

Reviu laporan kinerja PT _____, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Standar Jasa Akuntansi dan R^eviu yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Tujuan dari reviu ini adalah untuk memberikan keyakinan negatif (*negative assurance*), dalam hal material, kesesuaian laporan kinerja dengan pedoman penilaian untuk tingkat kesehatan PT _____ sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjamin.

D. Audit Umum atas Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

Audit umum atas laporan keuangan PKBL PT _____ untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 yang disusun oleh manajemen PT _____ berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan audit atas laporan keuangan ini adalah memberikan opini kewajaran laporan keuangan PKBL sesuai dengan standar akuntansi yang diatur pada peraturan tersebut.

Selain itu, akan disampaikan *Management Letter* yang mencakup saran-saran perbaikan atas kelemahan pengendalian internal yang ditemukan selama proses audit dengan pihak manajemen dan komite audit (*those charge with governance*).

Laporan keuangan PT _____ dan entitas anak disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia. PT _____ sendiri telah membentuk pedoman akuntansi yang merujuk pada SAK di Indonesia. Mata uang yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan PT _____ adalah mata uang Rupiah dan juga merupakan mata uang fungsional PT _____.

Sedangkan untuk laporan keuangan bertujuan khusus, dasar penyusunan laporan tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Laporan	Dasar Penyusunan
1. Laporan keuangan Program Tabungan Hari Tua (THT).	<ul style="list-style-type: none"> PMK No. 241/PMK.002/2016 tanggal 12 April 2012. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-01/BL/2012 tanggal 20 Januari 2012.
2. Laporan keuangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara.	<ul style="list-style-type: none"> PMK No. 243/PMK.01/2016 tanggal 4 Januari 2017. Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. PER-02/BL/2007 tanggal 3 Desember 2007.
3. Laporan keuangan administratif Program Pensiun Eks PNS Departemen Perhubungan Pada PT _____.	<ul style="list-style-type: none"> PMK No. 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2015 tanggal 19 Agustus 2015.
4. Laporan keuangan administratif Program Pensiun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),	<ul style="list-style-type: none"> PMK No. 82/PMK.02/2015 tanggal 23 April 2015. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. PER-19/PB/2015 tanggal 19 Agustus 2015.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PT _____ dan entitas anak akan diserahkan ke Kementerian BUMN sebagai pemegang saham dan sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, maka penyelenggara program jaminan sosial

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

diawasi secara eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

Laporan yang akan dihasilkan dari penugasan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
2. Laporan auditor independen atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
3. Laporan akuntan independen atas laporan hasil evaluasi kinerja PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
4. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Program Tabungan Hari Tua (THT) PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
5. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
6. Laporan auditor independen atas laporan keuangan administratif Program Pensiun Eks PNS Departemen Perhubungan Pada PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
7. Laporan keuangan administratif Program Pensiun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
8. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
9. Laporan auditor independen atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
10. Laporan akuntan independen atas laporan hasil evaluasi kinerja PT yang berakhir 31 Desember 2017;
11. Laporan auditor independen atas laporan keuangan PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
12. Laporan auditor independen atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan kepatuhan terhadap pengendalian intern PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
13. Laporan akuntan independen atas laporan hasil evaluasi kinerja PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017;
14. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
15. Laporan auditor independen atas Hasil Evaluasi Kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.

<i>Client name</i> PT ABC	<i>Schedule reference</i>
<i>Accounting period</i> For year ended December 31, 2017	
Kegiatan Usaha Entitas	

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, atau disingkat PT _____ adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program Tabungan Hari Tua (THT), Dana Pensiu, Asuransi Jaminan Kecelakan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, dan Nomor 26 Tahun 1981 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada saat memasuki usia pensiun. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan PP No. 70 tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 16 September 2015, PT mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara terhitung 1 Juli 2015.

Secara rinci program-program PT dijelaskan sebagai berikut:

- **Program Tabungan Hari Tua (THT)**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013, PT _____ mengelola program THT yang merupakan program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi Kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta, apabila istri atau suami, dan anaknya meninggal dunia, atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia. Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun bagi yang masih sekolah dan belum menikah. Hal ini kecuali bila janda dan duda pegawai negeri tersebut menikah lagi. Askem merupakan manfaat tambahan yang diberikan tanpa dipungut iuran.

Peserta dikenai iuran wajib 3,25% dari penghasilan pegawai setiap bulan selama aktif, THT diterima manfaatnya apabila peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia. Sedangkan Asuransi Kematian (Askem) dibayarkan apabila peserta, istri-suami, dan anak (max 3 peristiwa) meninggal dunia.
- **Program Dana Pensiu**

Penyelenggaraan pembayaran pensiun dilakukan berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Sesuai dengan UU tersebut sumber dana pembayaran pensiun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Pay As You Go. Dalam perkembangannya, pembayaran pensiun PNS selain dari APBN juga bersumber dari sharing dana pensiun PNS berdasarkan Kepmenkeu, namun sejak tahun 2009 sepenuhnya (100%) bersumber dari APBN.

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

Sesuai dengan Kepres Nomor 56 Tahun 1974 tentang pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari PNS, pejabat negara, dan penerima pensiun, dilakukan pemotongan iuran pensiun PNS dan pejabat negara, sebesar 4,75% dari gaji. Potongan iuran pensiun tersebut pada awalnya ditempatkan pada Bank-bank Pemerintah yang ditentukan oleh Menkeu. Dengan ditetapkannya PP Nomor 25 tahun 1981 sebagai tindak lanjutnya Dana Pensiun PNS dialihkan kepada PT berdasarkan surat Menkeu Nomor 5-244/MK.011/1985 tanggal 21 Februari 1985. Pengadmnistrasian dan pelaporan dilakukan berdasarkan Peraturan Menkeu Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadmnistrasian, pelaporan, dan pengawasan penitipan dana iuran pensiun PNS dan pejabat negara.

Hak-hak Penerima Pensiun adalah:

1. Pensiun sendiri ($2,5\% \times$ Gaji Pokok \times Masa Kerja) + Tunjangan;
2. Pensiun janda/duda ($36\% \times$ Gaji Pokok + Tunjangan);
3. Pensiun yatim piatu ($36\% \times$ Gaji Pokok + Tunjangan);
4. Pensiun orang tuu ($36\% \times$ Gaji Pokok + Tunjangan);
5. Uang duka wafat (UDW), ($3 \times$ penghasilan).
6. Pengembalian iuran (bagi peserta yang berhenti bukan karena pensiun atau meninggal dunia (keluar tanpa hak pensiun) memperoleh pengembalian iuran pensiun (4,75%) beserta pengembangannya).

Sehubungan dengan pengelolaan Dana Akumulasi Iuran Pensiun dan pembayaran pensiun PNS menurut PMK Nomor 82/PMK.02/2015, PT membuka rekening yang digunakan khusus untuk menampung Dana Belanja Pensiun berdasarkan persetujuan dari KPA BUN dan melakukan penyetoran Jasa Giro atas rekening tersebut ke Kas Negara. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, maka seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan belanja pensiun yang didanai dari APBN dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan yang terpisah (Laporan Administratif Program Pensiun APBN).

Atas pengelolaan pensiun PNS dan pembayaran pensiunan PNS, Pemerintah melalui Surat Menkeu Nomor S-1517/MK.013/1987 memberikan pengantikan Biaya Penyelenggaraan Program Pensiun (BPPP). Ketentuan tentang besarnya Biaya Penyelenggaraan Pensiun berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-41/MK.06/2009 tanggal 21 Januari 2009 adalah sebagai berikut:
 $BPPP = [5\% \times \text{hasil investasi Dana Pensiun PNS}] + [65\% \times \text{total biaya usaha PT}]$

- **Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)**

Pada tanggal 1 Juli 2015 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dipercaya untuk mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja & Jaminan Kematian sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

Pengelolaan dan penyelenggaraan program JKK dan JKM dilakukan berdasarkan Permenkeu RI Nomor 208/PMK.02/2015 tanggal 23 Nopember 2015 tentang tata cara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana iuran JKK dan JKM bagi pegawai aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi pemerintah pusat. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan JKK dan JKM bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dan PNS daerah telah diatur dalam Permendagri RI Nomor 77 tahun 2015 tentang perubahan atas Permendagri RI Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2016.

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat. Sedangkan Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.

Iuran program JKK sebesar **0,24%** dari gaji peserta perbulan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jumlah peserta aktif dan peserta pensiun pada tahun 2017 masing-masing sebesar 4,2 juta dan 2,5 juta peserta.

Faktor-faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap PT **_____** adalah sebagai berikut:

a. **Faktor Politik dan Regulasi.**

PT **_____** merupakan Badan Usaha Milik Negara, yang sangat terpengaruh oleh regulasi dari Pemerintah, sebagai pemegang sahamnya. Selain itu, kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) merupakan pengelolaan dana yang diperuntukan bagi peserta yang merupakan PNS/pejabat negara yang merupakan bagian dari penyelenggara negara. Mengingat Pemerintah sebagai *ultimate stakeholder* menjadikan PT cukup rentan dengan adanya perubahan politik dan regulasi.

Umumnya proses bisnis PT **_____** di setiap divisi diatur oleh regulasi pemerintah, sehingga perubahan kebijakan manajemen PT **_____** dalam menentukan arah bisnis dan kesejahteraan PNS/pejabat negara juga sangat dipengaruhi oleh regulasi Pemerintah yang berlaku. Pemerintah saat ini telah menetapkan adanya moratorium PNS yang dapat berdampak pada ketidakseimbangan antara peserta aktif dan peserta pensiun. Hal ini akan mengakibatkan penerimaan iuran dari peserta aktif tidak sebanyak dengan pengeluaran untuk PNS yang akan pensiun.

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

b. Ekonomi
 Sebagai lembaga penyelenggara asuransi tabungan dan dana pensiun bagi pegawai negeri sipil, bisa dipastikan dipengaruhi oleh tingkat inflasi, nilai mata uang, dan suku bunga pasar. Perubahan faktor-faktor ekonomi tersebut turut menentukan pertumbuhan nilai investasi dana kelolaan PNS/pejabat negara. Semakin baik kondisi ekonomi nasional, maka akan berpengaruh pada peningkatan aset program THT dan pensiun serta program JKK dan JKM, yang dimungkinkan dapat memberikan kontribusi peningkatan manfaat THT dan pensiun dan JKK dan JKM bagi PNS/pejabat negara. Dengan demikian, perubahan ekonomi tersebut sangat mempengaruhi pertumbuhan aset dan nilai manfaat serta pendanaan program THT dan pensiun bagi PNS/pejabat negara.

c. Bisnis
 Sekalipun PT bukan BUMN yang berorientasi bisnis komersial namun dalam penyelenggaraan asuransi sosial PNS/pejabat negara tidak terlepas dari nasabah/peserta, pesaing, dan pemasok serta pelaku bisnis lainnya. Sejak awal bisnis PT bersifat *captive*, hanya menyelenggara asuransi sosial PNS/pejabat negara. Akan tetapi, *captive* tersebut tidak berarti *tidak mempunyai pesaing*. Pada era keterbukaan, peserta bisa dengan kritis membandingkan produk dan pelayanan PT dengan pelaku usaha lain yang sejenis. Hal demikian mendorong PNS/pejabat negara meminta persamaan layanan dan produk yang lebih baik. Bahkan, yang semula bisnis bersifat *captive* diinisiasi oleh pemberi kerja bisa berbalik menjadi PNS/pejabat negara karena mereka yang berkepentingan terhadap masa depan kesejahteraannya sendiri. Dengan demikian, perubahan strategis bisnis pelaku usaha sejenis dan kebutuhan PNS/pejabat negara dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis PT

d. Hukum
 Perubahan peraturan perundang-undangan sangat mungkin mengubah arah bisnis PT
 Beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang memaksa perubahan PT, seperti dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek sehingga program Astek pegawai BUMN harus diserahkan kepada PT. dan pemberlakuan Permenkeu No. 70/PMK.010/2011 mengakibatkan aset THT pegawai BUMN harus dialihkan kepada perusahaan asuransi komersial lainnya. Selain itu, PT yang dalam melakukan kegiatan bisnisnya dengan pihak lain juga dapat mengalami perselisihan akibat perbedaan penerapan perjanjian atau gugat-menggugat akibat perbuatan yang merugikan. Dengan demikian, perubahan hukum sangat mempengaruhi keberlangsungan PT

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	
<p>e. Teknologi Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat membuat semua orang lebih cepat mengetahui perubahan lingkungannya. Keterbukaan informasi ini semakin nyata sehingga semua orang bisa membandingkan di antara produk/jasa layanan sejenis di pasar. Hal tersebut mendorong PNS/pejabat negara menurut kualitas jasa layanan atau produk yang lebih baik. Sebagai masyarakat, PNS/pejabat negara yang telah menikmati kemudahan menerima informasi dan transaksi jasa perbankan melalui online maka sangat dimungkinkan layanan berbasis teknologi ini juga dimintakan pada layanan pembayaran klaim/pensiun yang selama ini diselenggarakan PT . Dengan demikian, perubahan teknologi informasi dapat membangun tuntutan PNS/pejabat negara kepada PT</p> <p>Selain itu, kebutuhan pengolahan data yang cukup besar dan lokasi peserta yang menyebar di seluruh Indonesia menyebabkan kebutuhan akan teknologi informasi sangat penting bagi perkembangan usaha PT</p>	
<p>f. Keamanan Stabilitas negara merupakan kunci kesuksesan dalam pembangunan nasional. Semakin stabil kondisi politik nasional, akan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha. Kondisi yang nyaman inilah diharapkan dapat menggerakkan roda ekonomi atau dunia usaha di bidang jasa maupun manufaktur sehingga dapat tumbuh dengan baik. Pertumbuhan ekonomi dan bisnis ini secara tidak langsung akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan investasi PT yang selama ini ditempatkan antara lain dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, deposito berjangka dan penyertaan. Dengan demikian, perubahan tingkat keamanan nasional sangat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana program THT dan pensiun serta operasional PT</p>	
<p>PT memiliki 2 entitas anak, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PT : PT bergerak dalam bidang usaha sewa properti dan memiliki satu gedung perkantoran yang berlokasi di Jln. Jakarta Pusat dan satu Ruko yang terletak di Denpasar, Bali. PT memiliki 90,13% saham 2. PT : PT bergerak dalam bidang usaha asuransi jiwa dengan sumber bisnis utama adalah para pegawai BUMN dan BUMD. PT memiliki 99,97% saham 	

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

2. Tujuan Pelaporan, Saat Audit dan Sifat Komunikasi

Pelaporan keuangan oleh PT diselenggarakan untuk memenuhi ketentuan peraturan berkaitan dengan kewajiban pelaporan keuangan yang tercakup dalam peraturan-peraturan berikut:

Pelaporan Program THT:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.010/2011 tentang *Kesehatan Keuangan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.*
2. Peraturan Menteri Negara BUMN RI Nomor : PER-10/MBU/2014 TANGGAL 25 Juli 2014 tentang : *Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan. (Pengganti PER-04/MBU/2011*
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 03/POJK.05/2013 tanggal 12 September 2013 tentang : *Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;*
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 13/SEOJK.05/2013 tanggal 25 November 2013 tentang : *Laporan Bulanan PT* ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 04/PMK.02/2014 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 79/PMK.010/2011 tentang *Kesehatan Keuangan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil;*
Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.02/2016 tentang *Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil* dan *Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara.*

Program Pensiun:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.01/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang *Pengadministrasian, Pelaporan dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara*
2. Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No:PER-02/BL/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang : *Bentuk dan Susunan Laporan atas Pengadministrasian Dana Iuran PNS dan Pejabat Negara oleh PT*
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.02/2015 tentang *Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT* DAN PT
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-19/PB/2015 tentang; *Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang dilaksanakan oleh PT.* DAN PT.

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>

For year ended December 31, 2017

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.02/2015 tentang; Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan PMK 23/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 211/PMK.02/2015 tentang Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 243/PMK.02/2016 tentang Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara

Pelaksanaan audit dijadwalkan dalam skedul sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Timetable
1.	Kick off meeting	6 Okt 2017
2.	Pemahaman kegiatan usaha PT <ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman melalui diskusi dan presentasi dari 18 divisi dan desk/unit dalam PT b. Pengujian proses dan kontrol secara <i>walkthrough</i> c. Perencanaan pengujian pengendalian dan substantif d. Pengujian pengendalian – Interim KP & KCU Jakarta 	27 Sept - 3 Okt 2017 4 – 13 Okt 2017 16 – 20 Okt 2017 23 – 27 Okt 2017
3.	Pengujian pengendalian dan substantif PT Interim pada 12 KC Pengujian substantif PT – Year end	30 Okt-24 Nov 2017 27 Nov 17 - 9 Feb 18
4.	Pemahaman kegiatan usaha, pengujian proses dan kontrol secara <i>walkthrough</i> – anak-anak perusahaan	16 – 27 Okt 2017
5.	Pengujian pengendalian dan substantif anak perusahaan – interim Pengujian substantif anak perusahaan – Year end	27 Nov - 15 Des 2017 27 Nov - 30 Jan 2018
6.	Komunikasi perkembangan proses audit (<i>progress meeting</i>)	Setiap tahapan (<i>interim</i> dan <i>tentative year end</i>)
7.	Komunikasi dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit	TBA
8.	Menerima laporan keuangan per 31 Des 2017 beserta trial balance dan rinciannya.	5 Jan 2018
9.	Diskusi atas temuan dan laporan keuangan <ul style="list-style-type: none"> - Draft - Final 	24 Jan 2018 31 Jan 2018
10.	Closing Meeting	31 Jan 2018
11.	Persetujuan penerbitan laporan keuangan	TBA
12.	Tanggal opini/tanggal surat pernyataan direksi	TBA
13.	Penerbitan laporan	31 Jan 2018
14.	Final management letter	31 Jan 2018

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; padding: 5px;"> <i>Client name</i> PT ABC </td> <td style="width: 30%; padding: 5px;"> <i>Schedule reference</i> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <i>Accounting period</i> For year ended December 31, 2017 </td> <td style="padding: 5px;"> <i>Client reference</i> </td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">3. Arahan Audit</p> <p><u>Identifikasi Risiko</u></p> <p>Risiko penugasan dikategorikan tinggi (<i>high risk</i>) dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PT sangat dipengaruhi oleh regulasi dari Pemerintah karena program yang dijalankan merupakan program Pemerintah. b. Lingkungan usaha PT sangat dipengaruhi oleh ekonomi politik di indonesia. Kelangsungan program jaminan asuransi sosial dipengaruhi oleh kondisi APBN dan APBD karena sebagian besar iuran diperoleh dari dana pemerintah pusat dan daerah. <p>Identifikasi awal atas risiko signifikan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja dan Kebijakan akuntansi Program JKK/JKM yaitu apakah program ini diperlukan sebagai dana titipan atau program asuransi. Sampai dengan September 2017, program JKM telah mengalami kerugian karena tidak seimbangnya iuran dan manfaatnya. Sedangkan kebijakan pemerintah akan bisa ditinjau setelah 2 tahun berlakunya PP 70 th. 2015. 2. Pada tahun 2017, terdapat kejadian/event terbitnya HGB Tanah di Jalan yang dikelola oleh PT . , <i>treatment accounting</i> untuk pencatatan kejadian tersebut masih menjadi pembahasan untuk diambil kebijakan secara hati-hati (konservatif). <p><u>Pendekatan Audit</u></p> <p>Pengendalian internal berdasarkan penilaian awal adalah kondusif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sehingga audit yang kami lakukan akan mengandalkan pengendalian internal dari PT . Untuk itu akan dilakukan pengujian atas pengendalian untuk mendukung bahwa pengendalian internal adalah dapat dipercaya. Selain pengujian pengendalian, juga akan dilakukan pengujian terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengujian atas pengendalian internal dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dilakukan juga sehubungan dengan ruang lingkup penugasan.</p> <p>Atas akun-akun signifikan akan dilakukan pengujian substantif dengan melakukan reviu analitis dan pengujian secara detail, terutama untuk akun-akun yang memiliki risiko signifikan. Prosedur audit standar konfirmasi akan dilakukan atas akun bank, investasi, piutang dan utang serta modal. Konfirmasi akan dilakukan dengan sample basis kecuali untuk akun bank dan investasi. Pengecekan fisik surat-surat kepemilikan investasi dan aset tetap juga dilakukan untuk keseluruhan investasi dan aset tetap.</p>	<i>Client name</i> PT ABC	<i>Schedule reference</i>	<i>Accounting period</i> For year ended December 31, 2017	<i>Client reference</i>
<i>Client name</i> PT ABC	<i>Schedule reference</i>				
<i>Accounting period</i> For year ended December 31, 2017	<i>Client reference</i>				

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

Pengujian pengendalian internal akan mencakup pengujian atas *General Computer Control* dan *Application Computer Control* yang akan dilakukan oleh tim audit IT. *General Computer Control* mencakup area *security, operation, system development life cycle, recovery plan* dan *IT masterplan* dan *IT governance*. Pengujian secara sampling juga dilakukan atas transaksi-transaksi yang dilakukan dalam sistem untuk menguji *Application Control* yang ada pada sistem computer PT

Komponen laporan keuangan PT yang signifikan adalah cadangan teknis yang pembentukannya dihitung oleh aktuaris, sehingga audit juga akan melakukan review atas perhitungan cadangan teknis yang dilakukan oleh aktuaris PT , baik internal maupun eksternal. Tujuan utama valuasi aktuarial adalah untuk memastikan kelayakan keuangan program jaminan sosial kesehatan secara jangka pendek dan jangka panjang. Proyeksi jangka pendek dan jangka panjang ini diperlukan untuk menguji bagaimana sistem pendanaan organisasi akan bereaksi terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi dan demografi yang terjadi. Kami menggunakan aktuaris sebagai pakar auditor yang membantu kami dalam melakukan penelaahan valuasi aktuarial tersebut.



<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

4. Penentuan Materialitas

Besarnya tingkat materialitas untuk seluruh laporan keuangan dengan perhitungan sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>Pendapatan</i>
<i>Basis materialitas yang dipilih</i>	
Alasan	Sebagian besar aset dan beban berasal dari penerimaan dana titipan (Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS) dan pengelolaan pembayaran pensiun (yang bebananya diganti secara proporsional oleh pemerintah). Penitipan dan pengelolaan ini merupakan <i>not-for-profit oriented</i> . Hal ini menyebabkan penggunaan total aset dan Earning Before Tax tidak tepat.
<i>Saldo per 30 Sept 2017 (annualized)</i>	Rp 14.112.628.741.
<i>Percentase perhitungan:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>planning materiality (PM)</i> • <i>performance materiality</i> • <i>nominal account (PAJE/RJE scope)</i> 	2% dari total pendapatan 30% dari PM 10% dari PM
<i>Planning materiality (30 Sept 2017)</i>	Rp 289.091.756.
<i>Performance materiality* (30 Sept 2017)</i>	Rp 86.727.527.
<i>Nominal amount (PAJE/RJE scope)</i>	
<i>**) (30 Sept 2017)</i>	Rp 28.909.175.
<i>Nominal amount (PAJE/RJE scope) untuk akun terkait perpajakan (30 Sept 2017)</i>	Rp 14.454.587....

*) Performance materiality merupakan suatu jumlah yang ditetapkan pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi dan yang tidak terdeteksi yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan.

**) Nominal account (PAJE/RJE scope) merupakan batas minimum untuk kesalahan individual.

Tingkat materialitas akan ditinjau ulang pada saat kami menerima laporan keuangan per 31 Desember 2017. Dengan basis yang sama tingkat materialitas akan dilakukan revisi jika basis perhitungan berubah secara signifikan.

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan bertujuan khusus, tingkat materialitas yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan Program Tabungan Hari Tua (THT):

Keterangan	Pendapatan
Basis materialitas yang dipilih	
Alasan	Saldo Income before tax volatil (terus-menerus turun sejak 2014)
Saldo per 30 Sept 2017 (annualized)	Rp 14.512.301.813.
Percentase perhitungan:	
• planning materiality (PM)	2% dari pendapatan
• performance materiality	30% dari PM
• nominal account (PAJE/RJE scope)	10% dari PM
Planning materiality 30 Sept 2017	Rp 290.246.036
Performance materiality 30 Sept 2017	Rp 87.073.810
Nominal amount (PAJE/RJE scope) 30 Sept 2017	Rp 29.024.603
2. Laporan keuangan Dana Akumulasi Iuran Pensiun PNS dan Pejabat Negara;

Keterangan	Sisa dana belanja pensiun (aset bersih)
Basis materialitas yang dipilih	
Saldo per 30 Sept 2017	Rp 121.424.996.222
Planning materiality 30 Sept 2017	Rp 6.071.249.811.1
Performance materiality 30 Sept 2017	Rp 1.821.374.943.
Nominal amount (PAJE/RJE scope) 30 Sept 2017	Rp 607.124.981
3. Laporan keuangan administratif Program Pensiun Eks PNS Departemen Perhubungan Pada PT

Keterangan	Sisa dana belanja pensiun (aset bersih)
Basis materialitas yang dipilih	
Saldo per 30 Sept 2017	Rp 1.279.892.129.
Planning materiality per 30 Sept 2017	Rp 63.994.606.
Performance materiality 30 Sept 2017	Rp 19.198.381..
Nominal amount (PAJE/RJE scope) 30 Sept 2017	Rp 6.399.460...

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

4. Laporan keuangan administratif Program Pensiun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Keterangan	
Basis materialitas yang dipilih	Sisa dana belanja pensiun (aset bersih)
Saldo per 30 Sept 2017	Rp 7.030.987.979.
<i>Planning materiality</i> per 30 Sept 2017	Rp 351.549.398.
<i>Performance materiality</i> 30 Sept 2017	Rp 175.774.699. ...
<i>Nominal amount</i> (PAJE/RJE scope) 30 Sept 2017	Rp 35.154.939

5. Akun-akun Program Jaminan Kecepataan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)

Keterangan	Pendapatan
Basis materialitas yang dipilih	
Saldo per 30 Sept 2017	Rp 961.206.356
<i>Planning materiality</i> per 30 Sept 2017	Rp 19.224.127
<i>Performance materiality</i> 30 Sept 2017	Rp 5.767.238
<i>Nominal amount</i> (PAJE/RJE scope) 30 Sept 2017	Rp 1.922.412.

5. Sampling

Menentukan sample, baik untuk pengujian pengendalian maupun untuk pengujian substantif. Sample ditentukan dengan menggunakan standar sampling yang terapan oleh dengan ilustrasi sebagai berikut:

Populasi besar (> 250 item per tahun)

Risiko Inheren				
	High	Medium	Low	
Risiko Pengendalian	High	N/A	48	33
	Medium	48	33	17
	Low	33	17	7

<i>Client name</i>	PT ABC	<i>Schedule reference</i>																													
<i>Accounting period</i>	For year ended December 31, 2017																														
Populasi menengah (antara 52 dan 250 item per tahun)																															
Risiko Pengendalian	High	Medium	Low																												
High	N/A	40	29																												
Medium	40	29	16																												
Low	29	16	7																												
Populasi kecil (between 12 and 52 items per year)																															
Risiko Pengendalian	High	Medium	Low																												
High	N/A	25	20																												
Medium	25	20	13																												
Low	20	13	6																												
<p>Dalam pemilihan sample, kami akan memilih transaksi-transaksi baik yang terjadi di kantor pusat dan kantor cabang. Pemilihan kantor cabang yang akan dikunjungi dengan memperhatikan bahwa dalam cabang tersebut ielah tercakup seluruh jenis transaksi yang akan kami lakukan pengujian. Kantor cabang yang akan kami kunjungi merupakan kantor cabang yang memiliki kontribusi signifikan terhadap saldo-saldo dalam laporan keuangan PT secara keseluruhan. Cabang yang akan dikunjungi terdiri dari 6 Kantor Cabang Utama, 2 Kantor Cabang Type A, 2 Kantor Cabang Type B dan 2 Kantor Cabang Type C. Kunjungan ke kantor cabang bertujuan untuk menilai penerapan pengendalian internal pada kantor cabang dilakukan secara konsisten.</p>																															
<p>Kantor cabang yang dikunjungi adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KCU</th> <th>KC-A</th> <th>KC-B</th> <th>KC-C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Jakarta</td> <td>1. Malang</td> <td>1. Pekalongan</td> <td>1. Kendari</td> </tr> <tr> <td>2. Medan</td> <td>2. Bogor</td> <td>2. Pematang Siantar</td> <td>2. Pontianak</td> </tr> <tr> <td>3. Surabaya</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Makasar</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Bandung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. Semarang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				KCU	KC-A	KC-B	KC-C	1. Jakarta	1. Malang	1. Pekalongan	1. Kendari	2. Medan	2. Bogor	2. Pematang Siantar	2. Pontianak	3. Surabaya				4. Makasar				5. Bandung				6. Semarang			
KCU	KC-A	KC-B	KC-C																												
1. Jakarta	1. Malang	1. Pekalongan	1. Kendari																												
2. Medan	2. Bogor	2. Pematang Siantar	2. Pontianak																												
3. Surabaya																															
4. Makasar																															
5. Bandung																															
6. Semarang																															
<p>Kunjungan ke kantor-kantor cabang akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan 24 November 2017.</p>																															

<i>Client name</i>				<i>Schedule reference</i>
PT ABC				
<i>Accounting period</i>				<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017				

6. Staffing

a) Personel Kunci

No.	Nama	Posisi	Uraian Tugas
1.		Lead Engagement Partner	Merupakan signing partner dan bertanggung jawab mengomunikasikan hasil audit kepada komite audit dan manajemen.
2.		Engagement Partner	Memonitor proses audit dan reviu proses audit secara detail; mengomunikasikan hasil audit kepada manajemen dan komite audit.
3.		Quality Control	Mereviu laporan auditor untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku, serta reviu laporan keuangan untuk memastikan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan telah sesuai dengan PSAK.

18

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

b) Anggota Tim

No.	Nama	Posisi	Uraian Tugas
1.	Syamsul	Manager	Melakukan proses audit dan reviu
2.		IT Leader	Memonitor sejurus pekerja tim IT dan melakukan koordinasi dengan tim audit untuk mengidentifikasi kebutuhan tim audit atas audit IT.
3.		IT Manager	Melakukan proses IT audit dan reviu
4.		Asso Manager	Melakukan proses audit dan reviu
5.		Supervisor	Melakukan proses audit dan reviu
6.		Asso. Supervisor	Melakukan proses audit dan reviu
7.		Asso. Supervisor	Melakukan proses audit dan reviu
8.		Asso. Supervisor	Melakukan proses audit dan reviu
10.		Asso. Supervisor	Melakukan proses audit dan reviu
11.		Senior Auditor	Melakukan proses audit dan reviu
12.		Senior Auditor	Melakukan proses audit dan reviu
13.		Senior Auditor	Melakukan proses audit dan reviu
14.		Junior Auditor	Melakukan proses audit dan reviu
15.		Junior Auditor	Melakukan proses audit dan reviu
16.		Junior Auditor	Melakukan proses audit dan reviu
17.		IT Auditor	Melakukan proses IT audit dan reviu

7. Asersi Manajemen

Kami akan melakukan pengujian asersi manajemen atas laporan keuangan PT yang mencakup:

1. Asersi terkait dengan transaksi atau peristiwa yang terjadi pada suatu periode, yaitu:
 - a. Keterjadian (*Occurrence*): transaksi dan peristiwa yang dicatat merupakan transaksi dan peristiwa yang terkait dengan PT ;
 - b. Kelengkapan (*Completeness*): semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat;
 - c. Akurasi (*Accuracy*): jumlah dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa telah dicatat dengan tepat (akurat);
 - d. *Cut off*: transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar;
 - e. Klasifikasi (*Classification*): transaksi dan peristiwa telah tercatat dalam akun yang tepat.

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

2. Asersi terkait dengan saldo akun pada tanggal laporan posisi keuangan, yaitu:

- Eksistensi (*Existence*): aset, liabilitas dan ekuitas ada pada tanggal laporan posisi keuangan;
- Hak & kewajiban (*Right & obligation*): hak atas aset merupakan milik PT dan liabilitas merupakan kewajiban PT
- Kelengkapan (*Completeness*): semua aset, liabilitas dan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat;
- Valuasi (*Valuation*) dan Alokasi (*Allocation*): aset, liabilitas dan ekuitas dalam laporan keuangan diakui pada jumlah yang tepat dan penyesuaian atas valuasi dan alokasi telah dicatat secara tepat.

3. Asersi terkait dengan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan, yaitu:

- Keterjadian (*Occurrence*) dan Hak & kewajiban (*Right & obligation*): transaksi dan peristiwa yang terkait dengan PT telah diungkapkan dalam laporan keuangan;
- Kelengkapan (*Completeness*): semua informasi yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan telah diungkapkan seluruhnya;
- Akurasi (*Accuracy*) dan Valuasi (*Valuation*): informasi keuangan dan lainnya diungkapkan dengan wajar dan memadai;
- Klasifikasi (*Classification*) dan Dimengerti (*Understandability*): informasi keuangan disajikan dan dijelaskan secara memadai, serta diungkapkan dengan tepat.

8. Pendekatan Audit per Area

1. Siklus pendapatan iuran

Area risiko signifikan:
Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

Penilaian risiko awal:
-Inheren
-Pengendalian

Perencanaan awal

- Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan monitoring yang dilakukan oleh manajemen.
- Reviu atas kecukupan pencadangan piutang tak tertagih.

Tinggi
Medium

<i>Client name</i>	PT ABC	<i>Schedule reference</i>
<i>Accounting period</i>	For year ended December 31, 2017	
<i>Client reference</i>		

2. Siklus Pembayaran Klaim/Menfaat

Area risiko signifikan:

1. Kecukupan atas cadangan teknis.
2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
3. Siklus Investasi

Penilaian risiko awal:

- Inheren
- Pengendalian

Area risiko signifikan:

Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Penilaian risiko awal:

- Inheren
- Pengendalian

Perencanaan awal

1. Reviu atas perhitungan cadangan teknis termasuk menilai kewajaran dari asumsi dan teknis aktuarial.
2. Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan monitoring yang dilakukan manajemen.

Tinggi
Medium

Perencanaan awal

1. Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan monitoring yang dilakukan manajemen.
2. Reviu penentuan nilai wajar investasi yang dimiliki dan reviu penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan untuk melihat kesesuaian dengan PSAK 50, 55 dan 60.
3. Reviu atas pencadangan penurunan nilai investasi.

Tinggi
Medium

<i>Client name</i>	PT ABC	<i>Schedule reference</i>																		
<i>Accounting period</i>	For year ended December 31, 2017																			
<p>4. Siklus Beban Operasional</p> <p>Area risiko signifikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecukupan penilaian penggantian terhadap biaya operasional. 2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. <p>Penilaian risiko awal:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inheren -Pengendalian -Asersi tertentu dimana penilaian risiko berbeda. 																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Perencanaan awal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Reviu analisa kecukupan penilaian penggantian terhadap biaya operasional.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan monitoring yang dilakukan manajemen.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Tinggi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak ada</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Perencanaan awal		1.	Reviu analisa kecukupan penilaian penggantian terhadap biaya operasional.	2.	Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan monitoring yang dilakukan manajemen.							Tinggi		Medium		Tidak ada	
Perencanaan awal																				
1.	Reviu analisa kecukupan penilaian penggantian terhadap biaya operasional.																			
2.	Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan monitoring yang dilakukan manajemen.																			
Tinggi																				
Medium																				
Tidak ada																				
<p>5. Siklus Aset Tetap</p> <p>Area risiko signifikan:</p> <p>Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, terutama dalam pengadaan aset tetap.</p> <p>Penilaian risiko awal:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Inheren -Pengendalian 																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Perencanaan awal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan monitoring yang dilakukan manajemen.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Tinggi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medium</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Perencanaan awal		Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan monitoring yang dilakukan manajemen.						Tinggi		Medium							
Perencanaan awal																				
Reviu atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan monitoring yang dilakukan manajemen.																				
Tinggi																				
Medium																				

<i>Client name</i>	<i>Schedule reference</i>
PT ABC	
<i>Accounting period</i>	<i>Client reference</i>
For year ended December 31, 2017	

6. Siklus Kepegawaian

Perencanaan awal			
Area risiko signifikan:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian pengakuan liabilitas manfaat karyawan dengan PSAK 24 revisi. 2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 		
Penilaian risiko awal:	<ul style="list-style-type: none"> -Inheren -Pengendalian 		
	<table border="1"> <tr> <td>Tinggi</td> </tr> <tr> <td>Medium</td> </tr> </table>	Tinggi	Medium
Tinggi			
Medium			
<p>Risiko pengendalian pada siklus-siklus tersebut di atas akan ditinjau kembali sesuai dari hasil pengujian pengendalian dari masing-masing siklus.</p>			
Prepared by Manager:	Date: 19 October 2017		
Reviewed by Partner:	Date: 20 October 2017		

Lampiran 9 – Format *Engagement Letter blank*

September 00, 201X

No./XI/201X/GA/ KAP XYZ

PT ABC
Jakarta

Subject: Engagement Letter for the Audit of the Financial Statements of
PT ABC

Dear Sir,

You have requested that we audit the financial statements of PT X (“the Company”), which comprise the statement of financial position as of December 31, 201X, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended. We are pleased to confirm our acceptance and our understanding of this audit engagement through this letter. Our audit will be conducted with the objective of expressing an opinion on the financial statements.

We understand that no other public accountant is appointed or had been appointed to perform the same general audit of the Company’s financial statements for the same period as mentioned above and for the purpose of expressing our opinion on the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The responsibilities of the auditor

We will conduct our audit in accordance with the auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). Those standards require that we comply with the Code of Ethics issued by IAPI and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement, whether due to fraud or error. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant estimates made by management, as well as the overall presentation of the financial statements.

Because of the inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of internal control, there is an unavoidable risk that some material misstatements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with auditing standards.

In making our risk assessments, we consider internal control relevant to the Company's preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. However, we will communicate to you in writing concerning any significant deficiencies in internal control relevant to the audit of the financial statements that we have identified during the audit.

Our ability to express an opinion, and the wording of our opinion, will, of course, be dependent on the facts and circumstances at the date of our report. If, for any reason, we are unable to complete the audit or are unable to form or have not formed an opinion, we may decline to express an opinion or decline to issue a report as a result of this engagement. If we are unable to complete our audit or if our auditors' report requires modification, the reasons thereof will be discussed with the Company's management. If such matters cannot be amicably settled, we have the right to withdraw from this engagement.

Our audit scope will also be in compliance with the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 13/POJK.03/2017 (the Regulation) and its implementation provisions regarding Use of Services of Public Accountants and Public Accountant Firms in Financial Services Activities. Based on a provision of the Regulation, we should communicate with the Financial Services Authority (OJK) about our appointment by you to be the Company's external auditor, prior to commencement of the audit

Identification of the applicable financial reporting framework

The preparation and presentation of the financial statements are in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of IAI.

The responsibilities of management

Our audit will be conducted on the basis that management acknowledge and understand that they have responsibility:

- (a) For the preparation and presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- (b) For such internal control as management determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; and
- (c) To provide us with:
 - (i) Access to all information of which management is aware that is relevant to the preparation of the financial statements such as records, documentation, and other matters;
 - (ii) Additional information that we may request from management for the purpose of the audit; and
 - (iii) Unrestricted access to persons within the Company whom we determine it necessary to obtain audit evidence.

Management's failure to provide us, on a timely basis, with the information referred to above or access to persons within the Company may cause us to delay our report, modify our procedures, or terminate our engagement.

Management is also responsible for adjusting the Company's financial statements to correct misstatements.

As part of our audit process, we will request from management, written confirmation concerning representations made to us in connection with the audit. We will also request that management confirms certain representations made to us during our audit, including the management's representations that the effects of unrecorded misstatements are immaterial, individually and in aggregate, to the Company's financial statements as a whole. The responses to those inquiries and related written representations of management as required by auditing standards in Indonesia are part of the evidential matter that we will rely on as auditors in forming our opinion on the financial statements.

Because of the importance of management's representations, the Company agrees to release and indemnify KAP XYZ and its personnel from all claims, liabilities, and expenses relating to our services under this engagement letter attributable to any misrepresentation by management.

We look forward to full assistance to be supplied by your staff and directors during our audit process, including preparation of schedules and analyses of accounts. These matters will be discussed in a separate letter which will be provided to you before we commence our interim and year-end audit. We trust that your personnel will make available to us whatever records, documentation and other information required in connection with our audit.

When there is an examination on the Company or request to give clarification on certain matters by any regulatory authorities, including the Tax Office, in relation to financial statements that have been issued or certain information on the issued financial statements, the Company's management permits us to submit our audit working papers related to the matters, directly to the regulatory authorities upon request.

In accordance with a provision in the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 13/POJK.03/2017 (the Regulation) and its implementation provisions regarding Use of Services of Public Accountants and Public Accountant Firms in Financial Services Activities, the Company's management permits us (and we also have an obligation) to directly deliver to OJK, any other information needed by OJK at any time.

Reporting

We will submit ten (10) copies of audit report in Bahasa Indonesia and English. The form and content of our report may need to be amended in the light of our audit findings.

Fees

Our fee for the above engagement is **Rp xxxx (xxxx)**, excluding VAT and out-of-pocket expenses such as transportation, meals, daily allowance, accommodation, postage,

courier, photocopies, communications, additional copies of reports, document translation fees, etc., which will be billed separately at cost.

The fee will be billed as the audit progresses. On this basis, payments are due in accordance with the stipulations of the following timetable:

	Rp
30% upon signing of this engagement	Xxx
40% upon 2 weeks of our fieldwork	Xxx
30% upon submission of the draft audit report	Xxx
 Total Audit Fees	 Xxx

Inclusion of KAP XYZ reports or references to KAP XYZ in other documents or electronic files

If the Company intends to publish or otherwise reproduce in any document our report on the Company's financial statements, or otherwise make reference to KAP XYZ in a document that contains other information in addition to the audited financial statements (e.g., in a periodic filing with a regulator, in a debt or equity offering circular, or in a private placement memorandum), thereby associating KAP XYZ with such document, the Company agrees that its management will provide us with a draft of the document to read and obtain our approval for the inclusion or incorporation by reference of our report, or the reference to KAP XYZ, in such document before the document is printed and distributed.

If the Company receives any request for information or any other communication from OJK or its staff or other regulatory bodies related to our engagement, the Company agrees that its management will notify us promptly of such request or communication and will provide us promptly with copies of all such requests or communications. Prior to sending any response or other written communication to OJK, or its staff or other regulatory bodies, that references KAP XYZ, services provided by KAP XYZ, or any report issued by KAP XYZ, the Company agrees that its management will provide us with such proposed response or written communication and allow us a reasonable amount of time to review such proposed response or written communication and comment on the accuracy of such references

Other terms and conditions

We understand the Company's reporting deadlines and requirements in relation to the audit works referred to herein. As such, we would like to inform you that we shall be able to commence our audit work procedures as soon as you have agreed to this Engagement Letter and we shall complete the work within the required timetable. Please note that our liability to meet the deadlines and requirements shall be heavily dependent on the availability and quality of the information required to be provided to us by the Company.

Limitation of liability and indemnification

The Company agrees that KAP XYZ and its personnel will not be liable to the Company for any claims, liabilities, or expenses relating to this engagement for an aggregate amount in excess of the fees paid by the Company to KAP XYZ pursuant to this engagement.

The Company will indemnify and hold harmless KAP XYZ and its personnel from all claims, liabilities, and expenses whatsoever, whether brought or incurred by the Company or any third parties, arising directly or indirectly from the services provided under this letter.

Applicable law and jurisdiction

The provisions herein shall be governed by and construed in accordance with the Laws of Indonesia and any legal disputes shall be settled within the exclusive jurisdiction of the Court of Central Jakarta.

If differences arise in the conduct of this engagement cannot be settled amicably, such differences will be settled through IAPI.

Please sign and return the attached copy of this letter to indicate your acknowledgement of, and agreement with the arrangements for our audit of the financial statements including our respective responsibilities.

Yours faithfully,

(Partner In Charge) – Registered Public Accountants

Partner



Acknowledged and agreed on behalf of PT ABC by:

Name : _____
Title : _____
Signature : _____
Date : _____

Lampiran 10 – Format *Minutes of Meeting* (MOM) blank

MINUTES OF MEETING			
	Pembahasan Meeting Audit PT ABC		
RAPAT DIUNDANG OLEH			
PT. ABC			
HARI / TANGGAL:		MULAI	SELESAI
Day/ date-month-year	00.00	00.00	
LOKASI			
PESERTA RAPAT			
	Pihak PT ABC: 1. Manajemen 2. TCWG	Pihak MSId: 1. Manager KAP XYZ 2. Staff Auditor KAP XYZ	
NOTULIS:		DOCUMENT DISTRIBUTION:	
NN		Internal documentation purpose	
AGENDA			
MINUTES OF MEETING :			
<u>Pertanyaan, Pembahasan dan jawaban</u>			
<u>Pertanyaan 1:</u>			
<u>Pembahasan dan jawaban 1:</u>			